PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I dan Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bare.bsre.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran utama yang menjadi *ultimate goal* pada Indonesia Emas 2045 antara lain: pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

Visi Indonesia Emas merupakan visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pencapaian visi dimaksud melalui tahapan pembangunan menengah lima tahunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada periode ini rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,3%-8,0%. Dengan skenario transformatif dan super transformatif, sasaran pembangunan nasional, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 4,0%-5,0%; tingkat kemiskinan ditargetkan pada kisaran 4,5%-5,0%; Rasio Gini ditargetkan pada kisaran 0,372-0,375; Indeks Modal Manusia pada angka 0,59; dan penurunan intensitas emisi GRK pada angka 62,37%.

Target dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L). Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025-2029 merupakan periode renstra pertama dalam RPJPN 2025-2045 dan akan menjadi tahapan penting dalam meletakkan dasar-dasar transformasi yang akan menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya. Selain itu renstra ini juga akan mendukung *engine of growth* yang baru antara lain: industri/ekonomi biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi hingga produk akhir dan industri/ekonomi hijau.

Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kemenkeu yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kemenkeu, dokumen ini juga menunjukkan peran Kemenkeu dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Selain itu,

penyusunan Renstra Kemenkeu juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kemenkeu diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 memerhatikan beberapa hal, antara lain perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan perkembangan perekonomian terkini antara lain: risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, pemulihan perekonomian global belum kuat dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, pemulihan aktivitas manufaktur global masih terbatas, serta sebagian besar negara berkembang (EMs) masih dalam tekanan yang tinggi, dan pemerataan pembangunan di tanah air yang belum cukup merata.

Sebagai langkah dalam merancang strategi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi kondisi umum dan memetakan potensi dan masalah. Tahapan evaluasi kondisi umum terdiri atas evaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya dan menjaring aspirasi masyarakat. Pemetaan potensi dan permasalahan dilakukan dengan menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah baik lingkup Kemenkeu maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045 serta masuk dalam lingkup kesesuaian tugas dan fungsi serta kewenangan Kemenkeu.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup Kemenkeu. Evaluasi telah dilakukan pada paruh waktu pertama dan di akhir periode Renstra. Secara umum, Kemenkeu telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1.1.1 Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Kemenkeu mendukung pencapaian 7 (tujuh) Agenda Pembangunan 2020-2024 sesuai amanat dalam RPJMN 2020-2024. Dukungan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 dalam bentuk penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional.

Secara umum seluruh strategi Kemenkeu dalam rangka pencapaian Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 telah diimplementasikan oleh unit eselon I lingkup Kemenkeu dengan capaian sesuai target. Rincian capaian indikator terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Capaian Indikator RPJMN 2020-2024 terkait Kementerian Keuangan

Agenda Pembangunan	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)*	8,51 - 8,69	8,25 - 8,63	8,27 - 8,70	8,38 - 9,09	8,59 - 9,55	8,17	9,11	10,41	10,31	10,08

Agenda Pembangunan	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
yang Berkualitas dan Berkeadilan											
	Imbal Hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara (%)	Naik	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun (6,69)	Turun (5,98)	Naik (6,62)	Tetap (6,62)	Naik (6,78)
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	22,94	25,94	28,94	31,94	34,94	26,05	26,18	29,05	33,72	48,29
	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*) (%)	1,97	11,9	48,0	87,8	100	1,97	28	66	86	100
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	n/a	92%	93%	94%	95%	n/a	97,7%	95,4%	98,8%	95,24%

Capaian implementasi strategi sebagai perwujudan dukungan pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024:

AGENDA PEMBANGUNAN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan dengan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang mengatur *tax holiday* atas sektor pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi, dilaksanakan dengan pemberian insentif fiskal untuk mendorong kegiatan ekspor bagi Industri Kecil Menengah (IKM) melalui PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan tujuan untuk Diekspor. Dukungan agar terciptanya peluang usaha dan *start-up*, dilakukan dengan memberikan insentif fiskal melalui penerbitan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan dengan melakukan perbaikan regulasi dalam *Omnibus law* maupun turunannya yang berkaitan dengan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi dan serta pemberian insentif fiskal, diantaranya:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang HPP).
   b. Pengaturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengenai penyederhanaan Retribusi Daerah.
   c. Penerbitan PMK Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
   d. Penerbitan PMK Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi, yang mengatur perluasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk bagi industri pendukung (*supporting industries*).

   Selain dari sisi regulasi, penerapan sistem perizinan berusaha elektronik juga telah dilaksanakan untuk mendorong investasi dan industrialisasi dalam hal simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi dan penyediaan infrastruktur sistem informasi pendukung otomasi penerbitan SKB dan SKTD BKP Strategis.

4. Arah Kebijakan Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan melalui beberapa strategi dengan meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Penerbitan PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, yang mengatur tentang Pengembalian KITE dan PMK Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, yang mengatur tentang Pembebasan KITE serta PMK Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana diubah

dengan PMK Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, yang mengatur tentang Pembebasan KITE (Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kebijakan tersebut menghasilkan peningkatan jumlah perusahaan KITE, dimana sampai dengan bulan Desember tahun 2024 telah terdaftar sebanyak 190 perusahaan KITE pembebasan, 105 perusahaan KITE pengembalian, dan 126 perusahaan KITE IKM.

5. Arah Kebijakan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, salah satunya dengan strategi meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga dengan pengembangan *national logistics ecosystems* dan reformasi fiskal telah dilaksanakan selama periode 2020-2024.

   Perbaikan sistem logistik nasional melalui simplifikasi proses bisnis dan integrasi teknologi informasi dalam kerangka *National Single Window* telah berdampak signifikan kepada pelaku usaha dari aspek efisiensi waktu dan biaya. Pada tahun 2023, implementasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) di 14 pelabuhan menghasilkan efisiensi waktu dengan rata-rata sebesar 51,5% dan efisiensi biaya sebesar 34,7%. Selanjutnya tahun 2024 implementasi NLE menghasilkan efisiensi waktu rata-rata sebesar 46,32% dan efisiensi biaya sebesar 44,97% pada 32 pelabuhan baru lainnya (Survei PROSPERA dan Kementerian Keuangan). Selain itu, *preliminary research* pada 6 bandara tahun 2024 menunjukkan implementasi NLE menghasilkan rata-rata efisiensi waktu sebesar 73% dan efisiensi biaya sebesar 17% (kajian internal Tim NLE).

   Dari sisi reformasi fiskal, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara, beberapa hal signifikan yang telah dilaksanakan antara lain pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) dan modernisasi CEISA. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak juga dilaksanakan dengan pembangunan basis data perizinan dan pemajakan penghasilan penyedia konten digital serta penyusunan kajian potensi cukai atas *luxury goods*, produk minuman berpemanis dalam kemasan, produk plastik (kantong plastik, kemasan plastik *multilayer, styrofoam* dan sedotan plastik), produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, sepeda motor, batu bara, dan pasir laut; kebijakan tarif cukai hasil tembakau; dan kebijakan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol. Khusus selama masa pandemi Covid-19, pemberian insentif fiskal untuk sektor-sektor yang terdampak juga dilaksanakan secara selektif dan terukur untuk menjaga roda perekonomian.

AGENDA PEMBANGUNAN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Arah kebijakan dan capaian pada Agenda Pembangunan 2 antara lain sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dilaksanakan dengan strategi optimalisasi

pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, dengan capaian antara lain:

a. Penugasan kepada LPEI untuk pengembangan infrastruktur marina dan penunjang destinasi pariwisata super prioritas, serta menyediakan pembiayaan ekspor untuk mendukung KEK Pariwisata Mandalika II.
b. Kebijakan pengalokasian DAK Fisik bidang UMKM dan bidang IKM.
c. Penguatan kebijakan PDRD untuk meningkatkan *local taxing power* dalam rangka penguatan kemandirian daerah.
d. Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik Dana PK2UMK (Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil), Dana PK2SIKM ((Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM dalam Industri, Khusus Industri Kecil dan Menengah), serta Dana FPM (Fasilitasi Penanaman Modal).

2. Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar, Daya Saing, serta Kemandirian Daerah, dilaksanakan melalui strategi:
   a. Peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa (Aceh, Papua, dan Papua Barat) untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
   b. Pengembangan kerjasama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, yang diimplementasikan melalui penyelesaian Hibah dari Daerah Induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB), monitoring dan evaluasi terhadap DOB, serta pembayaran deviden dari perusahaan di daerah kepada pemerintah daerah sekitar.
   c. Penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai salah satu upaya mewujudkan penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.

3. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Antarwilayah, Kawasan Barat dan Timur, Jawa dan Luar Jawa, Maupun Kebijakan Pembangunan Wilayah Per Pulau melalui pengalokasian DAK Fisik Tematik untuk pembangunan afirmatif mempercepat pembangunan daerah tertinggal, Dana Desa untuk percepatan pembangunan desa, serta pembangunan wilayah pulau secara terintegrasi.

AGENDA PEMBANGUNAN 3: Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 5 (lima) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dilaksanakan melalui strategi Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, yang implementasikan melalui:
   a. Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, perawatan jangka panjang berbasis kontribusi, dan program rehabilitasi kerja, dengan capaian sebagai berikut:
      1) Penambahan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK di luar kesepakatan yang diperjanjikan berupa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja.
      2) Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
      3) Penetapan Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023–2024.
      4) Analisis Kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial.
   b. Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, telah dilaksanakan melalui:
      1) Penerbitan Perpres Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
      2) Penyesuaian sistem iuran, tarif dan manfaat bagi penerima layanan dengan adanya perubahan regulasi program yang dapat direviu secara berkala, yaitu perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
      3) Pengaturan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Data Berbasis Teknologi Informasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial, kebijakan integrasi data yang sudah dituangkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024.
      4) Pelaksanaan monitoring melalui *one on one meeting* dengan BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.
      5) Pelaksanaan evaluasi aktuaria kecukupan iuran DJS Kesehatan, serta program jaminan pensiun SJSN dan ASN melalui laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi risiko BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan Asabri serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan persiapan implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Rawat Inap Standar (KDK-KRIS).

2. Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta, yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak, dilaksanakan melalui:
   a. Pengenaan cukai terhadap *vape*/rokok elektrik, melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
   b. Kenaikan CHT melalui PMK Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris.
   c. Perubahan tarif cukai etil alkohol melalui PMK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
   d. DBH CHT diposisikan sebagai bantalan dari dampak kebijakan cukai yang dapat digunakan untuk membantu petani tembakau pekerja industri hasil tembakau yang terdampak.

3. Arah Kebijakan Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dilaksanakan melalui strategi peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, melalui peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah dilaksanakan melalui:
   a. Sinkronisasi penganggaran antara belanja di K/L dengan TKD.
   b. Penajaman Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
   c. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
   d. Kebijakan DAK Fisik Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, peningkatan IPM, pencapaian SPM, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan memperkuat budaya literasi.
   e. Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan berupa revitalisasi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB, serta pembangunan layanan perpustakaan daerah.
   f. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan melalui Layanan Beasiswa, Layanan Pendanaan Riset, Peningkatan Ranking Dunia Perguruan Tinggi, dan Dukungan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan.

4. Arah Kebijakan Mengentaskan Kemiskinan dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan. Implementasi strategi dimaksud antara lain:
   a. Menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku UMKM.
   b. Menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemerintah.
   c. Membuka kesempatan pelaku UMKM untuk naik kelas.
   d. Penetapan PMK 130 tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah.
   e. Pengembangan Sistem Informasi (SIKP UMi) untuk mendukung penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi).
5. Arah Kebijakan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing dilaksanakan dengan:
   a. Strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
   b. Strategi peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.

AGENDA PEMBANGUNAN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 4 (empat) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan strategi penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan melalui pengalokasian DID dan DAK Fisik.
2. Arah Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
   a. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, melalui perluasan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan.
   b. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah, melalui penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.
   c. Penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan, melalui pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*).
   d. Peningkatan kinerja logistik, melalui pengembangan sistem informasi logistik yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara pelaku logistik. Implementasi strategi dilakukan antara lain dengan penerapan integrasi layanan

perizinan ekspor-impor, integrasi layanan karantina-kepabeanan, integrasi layanan kapal pengangkut, dan integrasi layanan pembayaran dengan *single billing* PNBP untuk layanan kapal melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW), serta penerapan layanan NLE di 53 (lima puluh tiga) pelabuhan laut dan 7 (tujuh) bandar udara.

3. Arah Kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan dilakukan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan. Implementasi strategi dilaksanakan melalui:
   a. Kajian yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan akses energi serta upaya peningkatan akses, pasokan, efisiensi dan keberlanjutan energi.
   b. Pengembangan energi terbarukan dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan serta dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
   c. Insentif bagi individu/badan usaha/masjid/pesantren yang memasang PLTS atap.
   d. Penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
   e. Kajian *Phasing Down* PLTU Batubara dalam penyusunan mekanisme *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang menjadi *platform energy* transisi dari energi batubara menjadi energi hijau di sektor ketenagalistrikan.
   f. Memberikan masukan terkait pendanaan dan harga energi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
4. Arah Kebijakan Transformasi Digital melalui perluasan layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan dan informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, dan pemberian insentif bagi *start up* yang berfokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

AGENDA PEMBANGUNAN 6: Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pada Agenda Pembangunan 6, dukungan Kemenkeu difokuskan pada arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut Kemenkeu melaksanakan strategi penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana dengan menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya Perpres Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum pembentukan *Pooling Fund* Bencana, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, serta kebijakan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilaksanakan secara bertahap pada seluruh K/L. Hingga saat ini, BMN yang menjadi obyek pertanggungan meliputi gedung/bangunan kantor, pendidikan, dan kesehatan.

AGENDA PEMBANGUNAN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Agenda Pembangunan ini terdapat 3 (tiga) arah kebijakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dilaksanakan dalam berbagai sektor. Dalam hal peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional telah dilaksanakan *Capacity Building/Workshop/* Pelatihan bidang pengawasan *Transnational Organized Crime* (TNOC) di Austria dan Thailand dan penetapan PMK Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

   Dari sisi penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional, capaian yang telah dihasilkan baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan kerjasama internasional antara lain, penetapan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebagai Operator Investasi Pemerintah melalui KMK Nomor 169/KMK.05/2022, pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia di tengah situasi yang *extraordinary* dengan tiga hasil utama, yaitu (1) Pembentukan Dana Pandemi sebesar USD1,56 miliar; (2) Pengembangan *Energy Transition Mechanism* (ETM) *Country Platform*; (3) Transformasi ekonomi digital, pelaksanaan mandat dalam Keketuaan ASEAN serta penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi.

2. Arah kebijakan penegakan hukum nasional, telah dilaksanakan strategi penguatan sistem anti korupsi dengan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan, yaitu melalui penerbitan PP nomor 105 tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Penetapan PMK Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana diubah dengan PMK nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

3. Dalam rangka mendukung arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, telah dilaksanakan dua strategi, yaitu:

   a. Dari sisi penguatan keamanan laut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan modernisasi persenjataan DJBC, seperti pengadaan *nonlethal weapon*, senapan laras pendek (senjata api); modernisasi sarana pengawasan dengan melakukan pengadaan kapal *interceptor boat*; modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli *speedboat*; pengkajian dan pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk Pengawasan Sarkut di Laut; serta pemanfaatan teknologi *Maritime Surveillance*: MoU BC-Hubla.

   b. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan implementasi strategi antara lain, pengembangan *Customs*

Narcotics Targetting Centre (CNTC) - *National Targeting System*; Operasi Berantas Sindikat Narkotika (Operasi Bersinar); pengembangan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC; serta pelaksanaan kerjasama dengan APH lain: Ops JTF DJBC - RMCD yg didukung oleh APH lain baik di tingkat Pusat maupun wilayah.

1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan

Sebagai penjabaran visi dan misi Kemenkeu, pada Renstra 2020-2024 ditetapkan bahwa Kemenkeu memiliki 5 (lima) Tujuan, yakni Tujuan (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Tujuan (2) Penerimaan negara yang optimal; Tujuan (3) Pengelolaan Belanja Negara yang berkualitas; Tujuan (4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan Tujuan (5) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan Kemenkeu tahun 2020-2024 pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 1 "Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan" adalah Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Dari sisi penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, telah dihasilkan *Omnibus law* perpajakan (mencakup perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah) dan sektor keuangan yakni melalui: (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 – 2024, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam rangka penyusunan RAPBN hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang APBN.
3. Untuk mendukung *sustainable environment,* dilakukan pengembangan instrumen-instrumen fiskal diantaranya penerbitan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan, untuk percepatan transisi energi dengan mekanisme ETM dan pengembangan berbagai instrumen fiskal untuk pendanaan perubahan iklim, antara lain: (1) Pengelolaan akses pendanaan dari *Green Climate Fund* (GCF); (2) Dukungan untuk mobilisasi pendanaan non-APBN melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

4. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal antar-K/L diwujudkan antara lain melalui *Tax Holiday* (PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan), *Investment Allowance* untuk industri padat karya (PMK Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya), *Insentif Superdeduction* untuk kegiatan Litbang (PMK Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia), penyusunan peraturan menteri keuangan tentang pembebasan bea masuk (PMK Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dan PMK Nomor 149/PMK.04/ tentang 2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor), dan penyusunan peraturan turunan *Omnibus Law* terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Perdagangan Bebas (PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), serta KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah) melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional untuk memberikan manfaat bagi Indonesia antara lain dengan terlaksananya Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022, penunjukan sebagai WCO *Asia-Pasific Vice Chair* tahun 2020-2022, pelaksanaan Keketuaan ASEAN di Indonesia pada tahun 2023, peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional melalui penerbitan PMK yang terkait di antaranya PMK Nomor 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8, dan PMK Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
6. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang diwujudkan dengan pengelolaan SBN yang *prudent*, akuntabel dan inovatif

melalui penerbitan SBN secara reguler sesuai dengan strategi pembiayaan, melakukan riset literasi SBN Ritel serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang SBN yang berkesinambungan.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.2

Capaian Indikator Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1	Rasio defisit terhadap PDB	T: (5,07%)	T: (3,21%) - (4,17%)	T: (2,79%) - (3,55%)	T: (2,35%) - (2,72%)	T: (2,19%) - (2,51%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: (6,34%)	R: (4,62%)	R: (2,38%)	R: (1,65%)	R: (2,29%)	
	2	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	T: 75	T: 75	T: 75	T: 75	T: 75	Unit Eselon I terkait
			R; 90,52	R: 96,89	R: 94,28	R: 99,74	R: 103,49	

TUJUAN 2: Penerimaan Negara yang Optimal.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 2 "Penerimaan negara yang optimal" adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa *diapers* dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit.

   Dari sisi regulasi, beberapa peraturan yang telah ditetapkan yaitu penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Terkait Bea Keluar, telah ditetapkan PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Selain itu juga diterbitkan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan melalui penetapan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tata kelola PNBP antara lain melalui revisi atas 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai teknis pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari optimalisasi PNBP, Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur jenis dan tarif PNBP.

2. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital berfokus pada *user experience* dan *user friendly*. Dari sisi layanan perpajakan (pajak, kepabeanan dan cukai) telah dilakukan pengembangan Sistem *Click, Call, Counter* melalui revitalisasi peran *Contact Center* dalam layanan perpajakan, pengembangan layanan kepabeanan dan cukai antara lain dengan pengembangan Portal Pengguna Jasa; CEISA *Mobile Application*; aplikasi *Vessel Declaration*; *Vehicle Declaration* di perbatasan; Pelintas Batas layanan *Rush Handling*; Sistem Aplikasi *Customs Declaration* (CD) elektronik. Dari sisi PNBP dilaksanakan pengembangan aplikasi pendukung layanan PNBP berbasis *digital* dengan PNBP *Mobile*.

3. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, yang telah dilaksanakan melalui pengembangan sistem administrasi utama terkait PNBP, pemanfaatan *modern payment system* melalui kerjasama dengan Perbankan untuk melakukan integrasi sistem pembayaran *billing* kepabeanan dan cukai serta pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (*Core Tax System*).

4. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan analisis penerimaan kepabeanan dan cukai dilaksanakan melalui penyempurnaan beberapa peraturan antara lain: (1) peraturan terkait *voluntary declaration/voluntary payment* dalam PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*); (2) regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor dalam PMK Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, serta pengembangan *risk assessment tools* nilai pabean; (3) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, termasuk kepada Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar.

5. Penguatan kerja sama dengan Instansi dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pengamanan penerimaan negara dalam bentuk MoU antara Kemenkeu dengan PPATK untuk pemanfaatan data transaksi keuangan, dan sinergi bersama dengan TNI dan/atau Polri (Operasi Gabungan).

6. Penguatan *Joint* Program penerimaan di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan secara kolaborasi antara DJP, DJBC, DJA, dan LNSW guna mendukung optimalisasi penerimaan negara, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah *Joint* Proses Bisnis dan IT melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian Lembaga (SIMBARA) dan integrasi dokumen Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan faktur pajak.

7. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ tahun 2020.

8. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Terkait perpajakan, beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan DJP *Digital Map*, penguatan sarana dan infrastruktur forensik *digital,* penempatan petugas DJP di luar negeri, peningkatan kepatuhan pajak *high wealth individuals* dan grup usahanya.
   b. Terkait kepabeanan dan cukai, pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP); peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional; penguatan kapasitas operasi keamanan laut; pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Inteligence* (AI).
   c. Terkait PNBP, telah dikembangkan modul e-mawas PNBP sebagai media bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan. Penyempurnaan SIMBARA dan replikasi SIMBARA untuk komoditas lain, juga menjadi upaya dalam mengoptimalkan pengawasan PNBP.
9. Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan ekspor maupun impor serta pemberian dukungan terhadap industri terkait penanganan Covid-19, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Optimalisasi pemanfaatan relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE, melalui penerbitan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 143 Tahun 2020 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020;
   b. Pemberian fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan Covid-19 antara lain dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
10. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang telah dilaksanakan melalui penyempurnaan modul penggalian potensi ekonomi digital dan penyusunan daftar ILAP yang akan diusulkan dalam revisi PMK terkait ILAP melalui mekanisme *one-on-one meeting* dengan pihak ketiga.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.3

Capaian Indikator Penerimaan Negara yang Optimal
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal	1	Rasio perpajakan terhadap PDB	T: 8,51% - 8,69%	T: 8,25% - 8,63%	T: 8,27% - 8,70%	T: 8,38% - 9,09%	T: 8,59% - 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: 8,17%	R: 9,11%	R: 10,41%	R: 10,31%	R: 10,08%	
	2	Persentase realisasi penerimaan negara	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	DJP, DJBC, DJA
			R: 95,45%	R: 114,67%	R: 116,07%	R: 105,20%	R: 103,50%	
	3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	T: 53,50%	T: 63%	T: 64%	T: 65%	T: 66%	DJP, DJBC
			R: 101,32%	R: 105,3%	R: 105,3%	R: 108,43%	R: 102,09%	

TUJUAN 3: Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 3 "Pengelolaan belanja negara yang berkualitas" adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang tepat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta implementasi redesain sistem penganggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Penyusunan anggaran yang memerhatikan kinerja unit pengelola kegiatan, keberlangsungan kegiatan terkait setiap tahun serta Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
   b. Penguatan implementasi RSPP melalui surat bersama Kemenkeu dengan Bappenas mengenai pedoman penyusunan dan pemanfaatan KRO, serta pencantuman RSPP dan standardisasi KRO/RO Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
   c. Penyelarasan alokasi belanja K/L dan belanja TKD DAK Fisik/TKD Lainnya melalui implementasi SOP Link 67 Tahun 2022 dan perluasan sinkronisasi belanja K/L dengan TKD Lainnya melalui pencantuman dalam IS RBTK.
   d. Mengupayakan keselarasan dokumen melalui pengembangan modul sinkronisasi Renja dan RKA.
   e. Peningkatan kualitas reviu angka dasar melalui pengembangan fitur *Prepopulated* pada sistem informasi (menyediakan data detil perkiraan maju).
2. Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional, dilaksanakan melalui:
   a. Memastikan *tagging* RO Prioritas Nasional telah dilakukan.
   b. Mengalokasikan anggaran Prioritas Nasional dalam RKA-K/L

c. Pengaturan tentang pengalokasian anggaran prioritas, penandaan tema penganggaran termasuk prioritas termasuk dalam perumusan KRO/RO dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.
d. Pengembangan proses bisnis perencanaan penganggaran terintegrasi sehingga informasi kinerja dan target pada dokumen penganggaran selaras dengan dokumen perencanaan.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian prioritas nasional dalam aplikasi Monev Kemenkeu.

3. Peningkatan sinergi dan kapasitas *stakeholders* penganggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penganggaran kepada K/L.
   b. Pelaksanaan sosialisasi KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan sosialisasi kebijakan dan aplikasi pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran tahun 2024.
4. Penguatan sinergi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Membuat forum bersama intra Kemenkeu (DJA, DJPK, DJPb), serta antarkementerian (Kemen PPN, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemkomdigi, dlsb).
   b. Penyelarasan peraturan dan pengembangan sistem bersama untuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
   c. Penguatan *platform* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam membantu proses *end-to-end* penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyediaan data guna pemantauan dan pengendalian.
   d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengumpulan data untuk memperoleh bahan kajian dan rekomendasi kebijakan penganggaran khususnya terkait Standar Biaya.
   e. Pelaksanaan sosialisasi/bimtek kepada internal maupun K/L.
5. Penerapan *evidence based budgeting* kajian tematik APBN, tematik penganggaran serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, yang telah dilaksanakan melalui:
   a. Monitoring dan evaluasi reguler dan pengukuran nilai kinerja anggaran melalui aplikasi SMART dan penyusunan kajian monitoring dan evaluasi nonreguler atas kinerja anggaran K/L yang disampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang dan Direktorat Penyusunan APBN, sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; penyusunan reviu angka dasar; dan penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
   b. Monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengukuran nilai kinerja anggaran BUN melalui aplikasi SMART BUN dan analisis kinerja anggaran BUN yang disampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang dan Direktorat Penyusunan APBN, sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN sesuai dengan PMK Nomor

204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara (BUN).

6. Perumusan kebijakan penganggaran untuk pengelolaan program pensiun dan jaminan sosial yang efisien dan tepat sasaran dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian PAN-RB serta Kementerian Dalam Negeri untuk penajaman kajian mengenai peninjauan ulang program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) bagi ASN, TNI dan POLRI, yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang lebih baik dengan biaya yang lebih terkendali.
7. Mengembangkan Desentralisasi Fiskal Asimetris.
   a. Pengalokasian dana dengan skema Transfer Khusus dan Keistimewaan berdasarkan status daerah otonomi.
   b. Insentif fiskal yakni alokasi dana dari APBN sebagai penghargaan kepada daerah atas keberhasilan pencapaian kinerja daerah dengan tujuan untuk membantu percepatan penyediaan layanan publik daerah.
   c. Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari K/L.
8. Mengembangkan sistem pengusulan DAK Fisik untuk mengatasi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, mendukung pencapaian prioritas nasional, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus.
9. Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD *Next Generation)* sebagai *superapps* layanan DJPK.
10. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat akuntabilitas dari belanja pemerintah daerah antara lain melalui Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan turunannya antara lain:
    a. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
    b. PMK Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KUA PPAS dengan KEM PPKF).
    c. PMK Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
    d. PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Selain itu, telah juga dirumuskan beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah yaitu:
    a. Perpres Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
    b. BAB Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dalam KEM PPKF 2024 dan 2025.
11. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan *reward and punishment*, yang telah dilaksanakan melalui:

a. Revisi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
b. *Trilateral Meeting* untuk proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri; dan
c. Implementasi kerangka evaluasi proyek PHLN yang berbasis SDGs berdasarkan *framework* yang telah disusun pada tahun 2023.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.4
Capaian Indikator Belanja Negara yang Berkualitas
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	1	Indeks kualitas belanja pemerintah	T: 80	T: 81	T: 82	T: 83	T: 84	DJA, DJPK
			R: 96,55	R: 90,27	R: 90,27	R: 90,28	R: 92,21	
	2	Indeks ketimpangan antarwilayah	T: 0,245 (skala 1)	T: 0,242 (skala 1)	T: 0,240 (skala 1)	T: 0,235 (skala 1)	T: 0,232 (skala 1)	DJPK
			R: 0,232 (skala 1)	R: 0,213 (skala 1)	R: 0,195 (skala 1)	R: 0,148 (skala 1)	R: 0,14 (skala 1)	
	3	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	T: 22,94%	T: 25,94%	T: 28,94%	T: 31,94%	T: 34,94%	DJPK
			R: 26,05%	R: 26,18%	R: 29,05%	R: 33,72%	R: 48,29%	

TUJUAN 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 4 "Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali" adalah: 1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 2) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan 3) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Strategi terkait dengan Perbendaharaan.
   a. Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui penyusunan peraturan dan proses bisnis dalam *platform* pembayaran pemerintah.
   b. Harmonisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja pelaksanaan APBN yang terintegrasi.
   c. Optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui interkoneksi data KKP perbankan dengan DIGIT dan Implementasi fitur pengelolaan UP KKP pada SAKTI pada Modul Bendahara dan Modul Komitmen.

d. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* dan melanjutkan pengembangan *Platform* Pembayaran Pemerintah (PPP).
e. Simplifikasi penyusunan LK melalui pengembangan automasi sistem penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
f. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN melalui penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BA BUN dari jenjang terbawah (UAKPA BUN) hingga jenjang tertinggi (UAP BUN).
g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L dan kualitas pengelolaan perbendaharaan dengan pengembangan *database* solusi/*troubleshooting* dan rekomendasi atas permasalahan penyusunan LK KL; serta pengembangan layanan pembinaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
h. Pengembangan *Bussiness Intelligence* likuiditas untuk implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien, serta penetapan formulasi perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) BUN yang merupakan *buffer* kas Pemerintah.
i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR) melalui konsolidasi dan simplifikasi pengelolaan seluruh rekening pemerintah berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara; penyusunan dan penetapan regulasi terkait *Investment Policy Statement* TDR; penyusunan kerangka kerja sama dengan Bank Indonesia dalam rangka remunerasi yang optimal; penyusunan kajian penggunaan limit transaksi kepada Jafung Dealer TDR; dan pengembangan *Inclusive Treasury Dealing Room* guna memastikan proses *bidding pooling system* sudah disetujui secara berjenjang dan tervalidasi otomatis oleh sistem.
j. Optimalisasi pemanfaatan SIKRI dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
k. Peningkatan ketepatan sasaran investasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penerapan *Early Warning System* melalui metode-metode pengukuran untuk mengestimasi probabilitas kemampuan bayar debitur Pemda pada penerusan pinjaman kepada Pemda/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui model *forecasting* dengan variabel keuangan maupun nonkeuangan untuk mengukur *Financial Distress* Pemda dengan *algoritma logistic regre*ssion dan hasilnya dapat diakses pada DIGIT. Sosialisasi dan UAT aplikasi EWS Pinjaman Pemda telah dilaksanakan kepada 8 Perwakilan Kanwil DJPb.
l. Pemetaan dan sinergi antara berbagai program K/L yang terkait investasi pemerintah (penyaluran pinjaman/kredit program/investasi lainnya) pada program-program yang menyasar UMKM pada Kementerian teknis terkait. Sebagai tindak lanjut atas pemetaan tersebut, telah dilakukan pemadanan/tol data antara SIKP UMi pada BLU PIP dengan data MBR Penerima Program FLPP pada BLU PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil koneksi antara kedua *database* telah mampu ditampilkan dalam bentuk *dashboard* penyaluran. Sebagai contoh, BLU PIP telah

melakukan pemadanan data debitur Pembiayaan UMi dengan data penerima Program Bansos (Prakerja, Sembako, BPNT, BPUM, PKH dan BST) periode 2020 - 2023. Diperoleh data 4,1 juta penerima Pembiayaan UMi (74%) juga menerima bansos; BLU PIP juga telah melakukan pemadanan/overlay data penerima Pembiayaan UMi dengan data sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Diperoleh data 3,43 juta (54%) debitur Pembiayaan UMi terdaftar sebagai sasaran P3KE.

m. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/BUMN, serta kepada debitur Ultra Mikro (UMi) yang dinilai melalui pelaksanaan survei efektivitas penyaluran Pembiayaan UMi. Survei efektivitas penyaluran pembiayaan UMi telah dilaksanakan pada semester II 2022 dan semester I 2023, berdasarkan survei tersebut akan disusun Kajian Uji Dampak Pembiayaan UMi untuk periode tahun 2023 yang merupakan pengukuran uji dampak untuk periode survei *baseline* semester II 2021 dengan hasil survei *endline* semester II 2022 serta periode survei *baseline* semester I 2022 dengan hasil survei *endline* semester I 2023.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.5
Capaian Indikator terkait Perbendaharaan
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	T: 3 (skala 4)	DJPb, DJPPR
			R: 3,5	R: 3,5	R: 3,5	R: 4	R: 4	
	2	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	DJPb, ITJEN
			R: 4	R: 4	R: 4	R: 4	R: 4	
	3	Nilai kinerja anggaran K/L	T: 80,2	T: 81,2	T: 81,2	T: 82,2	T: 82,2	DJPb, DJA
			R: 92,63	R: 90,20	R: 90,27	R: 90,28	R: 92,43	
	4	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	T: 91%	T: 92%	T: 93%	T: 94%	T: 95%	DJPb
			R: 96,5%	R: 97,7%	R: 95,4%	R: 98,78%	R: 115,23 %	

2. Strategi terkait dengan Pengelolaan Kekayaan Negara.
   a. Penguatan reviu Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan (*asset performance review*) dilaksankan melalui evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan dan penyampaian rekomendasi kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk

pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikasi lainnya. Selama rentang waktu pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dari tahun 2020 hingga 2024, telah terlaksana pengukuran pada 35.353 NUP berupa tanah dan bangunan dengan hasil 97% BMN memiliki portofolio hijau yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 2,6% hasil evaluasi kinerja BMN dengan portofolio merah yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam pengelolaan BMN dengan portofolio merah tersebut perlu dipertimbangkan investasi tambahan, perubahan bentuk, perubahan peruntukan, sampai dengan penyerahan aset kepada Pengelola Barang. Kemudian terhadap 0,4% objek evaluasi dengan hasil evalusi kinerja yang mengindikasikan adanya indikator yang inklonkusif.

b. Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan. Hal tersebut didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah). Realisasi BMN berupa tanah telah terbit sertipikat selama periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 108.517 bidang.

c. Sesuai PMK Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara bahwa RKBMN Hasil Penelaahan digunakan oleh K/L sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan anggaran, didukung dengan interkoneksi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan SAKTI yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran. Penerapan interkoneksi dimaksud didukung oleh kebijakan dalam PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*).

d. Optimalisasi BMN berupa tanah dan bangunan melalui penggunaan bersama oleh beberapa unit (*asset repurposing & integration*) dengan disusunnya analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (PTT), dan skema pemanfaatan untuk 7 (tujuh) K/L, yaitu: 1) Kementerian ESDM, 2) Kementerian Agama, 3) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), 4) Kementerian ATR/BPN, 5) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan 7) Kementerian PAN-RB.

e. Pemanfaatan BMN pada K/L yang tidak digunakan untuk melaksanakan tusi dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, koperasi, perorangan, maupun badan hukum, dalam bentuk sewa, Kerja Sama

Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah dalam pemanfaatan BMN, telah diterbitkan regulasi PMK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara.

f. Penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder* dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi serta monitoring dan evaluasi intensif terhadap K/L dan instansi vertikal. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan BMN terus dilakukan dalam rangka penyebarluasan dan penyeragaman pemahaman pejabat/pegawai yang menangani BMN sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN pada K/L sebagaimana diamanatkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

g. Dalam rangka peningkatan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan mandat masing-masing entitas, yaitu:

   1) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dengan total *outstanding* pembiayaan mencapai Rp93,6 triliun, dan nilai komitmen pembiayaan tumbuh dari Rp106,145 triliun (pada tahun 2020) menjadi Rp141,908 triliun (pada tahun 2024). Pembiayaan tersebut mayoritas tersebar pada sektor jalan, ketenagalistrikan, energi, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya. PT SMI juga melaksanakan pendampingan pada sejumlah proyek KPBU seperti SPAM Metropolitan Cirebon Raya, Bendungan Merangin, Rusun Karawang Spuur, RSPTN Universitas Padjajaran, TPAS Manggar, dan RSUD Inche Abdoel Moeis.

   2) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sampai dengan tahun 2024 telah melaksanakan penjaminan 53 proyek baik penjaminan infrastruktur dan penjaminan program PEN, dengan total nilai investasi Rp539 triliun dan total eksposur penjaminan Rp100 triliun. Selama 5 tahun terakhir, terealisasi tambahan penandatanganan penjaminan infrastruktur (KPBU dan Non-KPBU) sebanyak 23 proyek, serta pada tahun 2020 terdapat penugasan kepada PT PII berupa perluasan mandat untuk melaksanakan penjaminan dalam rangka program PEN, dengan realisasi penjaminan PEN sampai dengan akhir 2024 sebanyak 9 proyek. PT PII juga melaksanakan penjaminan korporasi padat karya dalam rangka mendukung program PEN.

   3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus membangun ekosistem ekspor nasional melalui sinergi

dengan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Hingga Desember 2024, LPEI telah membina 928 Desa Devisa dan melahirkan 484 eksportir baru melalui program CPNE. Dalam penugasan khusus NIA, LPEI mengelola dana sebesar Rp7,2 triliun, terdiri dari PKE UKM (Rp161 miliar), *trade finance* (Rp4,453 triliun), kawasan (Rp2,468 triliun), alat transportasi (Rp73 miliar), dan farmasi & alat kesehatan (Rp117 miliar). Fokus utama LPEI adalah menciptakan dan menghemat devisa senilai USD 1,18 miliar.

4) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) me-*leverage* PMN yang diterima dengan dana dari pasar modal untuk kemudian disalurkan kepada bank penyalur KPR FLPP dalam rangka mengurangi beban fiskal pemerintah. Pada periode 2020-2024 telah disalurkan Rp23,91 triliun untuk membiayai 635.625 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5) PT Geo Dipa Energi (GDE) telah menghasilkan produksi listrik korporasi sebesar 803,5 GWh pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 859,25 GWh, dengan ketersediaan uap GDE pada tahun 2020 sebesar 6,18 juta ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 6,9 juta ton. Di tahun 2024, GDE juga untuk pertama kali berhasil menjual REC Patuha-1 sebesar 110.610 MWh (113.116 USD).
6) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan penyaluran pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional sebesar Rp92,01 triliun dari alokasi APBN senilai Rp76,18 triliun, dan menghasilkan PNBP dari pengelolaan aset dan jasa *advisory* sebesar Rp4,42 triliun, serta manfaat nonfinasial pengelolaan aset sebesar Rp1,22 triliun.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.6
Capaian Indikator terkait Pengelolaan Kekayaan Negara
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	T: 55%	T: 57%	T: 60%	T: 65%	T: 70%	DJKN
			R: 70,39%	R: 82,27%	R: 84,34%	R: 79.66%	R: 86,88%	
	2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
			R: 5	R: 4,7	R: 4,69	R: 4,77	R: 4,97	

3. Strategi terkait dengan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

a. Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) pemerintah pusat dengan telah dilakukannya koordinasi intensif tim ALCo dan tim CPIN lintas unit eselon I, serta monitoring arahan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam forum ALCo secara berkala.
b. Mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan luar negeri secara selektif dan *prudent* dilakukan melalui penyusunan strategi penerbitan utang dan evaluasi/revisi strategi secara triwulanan, pemantauan kondisi ekonomi dan pasar keuangan, serta pengukuran proyeksi risiko portofolio.
c. Diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur & penguatan *legal framework* untuk pengembangan dan pendalaman pasar SBN dengan ditetapkannya PMK 137 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan PMK 112 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
d. Memperluas cakupan kegiatan yang dapat dibiayai dari pinjaman dalam negeri, antara lain untuk sektor infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mendorong industri dalam negeri. Pembiayaan proyek tersebut diantaranya kegiatan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III Tahap II serta pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan di sektor pertahanan dan keamanan.
e. Pengembangan *Data Champion* Pembiayaan dan Risiko melalui pengembangan lebih lanjut aplikasi pertukaran data elektronik dengan *lender* (aplikasi DEVA), pelaksanaan *E-learning* pengenalan pengelolaan hibah sejak 2023, serta penambahan materi *E-learning* di 2024.
f. Mengembangkan *creative financing* dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui ditetapkannya PMK Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya.
g. Mengendalikan risiko keterjadian atas realisasi kewajiban kontinjensi APBN dengan telah melaksanakan monitoring atas risiko BUMN pelaksana penugasan baik secara langsung maupun *on paper* serta melaksanakan *joint monitoring committee* secara berkala.
h. Mengembangkan kerangka kerja dan instrumen pengelolaan risiko keuangan negara yang holistik (termasuk isu bencana, lingkungan, dan perubahan iklim) melalui penetapan PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022, serta penyusunan kajian instrumen mitigasi risiko bencana (*pooling fund bencana*).
i. Menerbitkan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel (*pandemic bond*). Selain itu sinergitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi kondisi *extraordinary* pandemi

Covid-19 melalui keputusan bersama antara Kemenkeu dan Bank Indonesia.

j. Peningkatan implementasi skema KPBU melalui Optimalisasi pemanfaatan *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF), dan penjaminan pada sektor prioritas. Jumlah portofolio proyek KPBU yang mendapat dukungan Kemenkeu (PDF, VGF, AP, dan penjaminan) s.d. 31 Desember 2024 adalah 23 pada tahap operasi, 9 pada tahap konstruksi dan prakonstruksi, 4 pada tahap transaksi, serta 24 pada tahap penyiapan.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait antara lain:

Tabel 1.7

Capaian Indikator terkait Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	1	Imbal hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara	T: Naik	T: Menurun	T: Menurun	T: Menurun	T: Menurun	DJPPR
			R: Menurun (5,89)	R: Menurun (6,38)	R: Menurun (6,96)	R: Menurun (6,74)	R: Menurun (6,78)	
	2	Rasio Utang terhadap PDB	T: 36,38%	T: 36,67%-37,97%	T: 36,65%-37,39%	T: 36,45%-37,36%	T: 36,08%-37,18%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
			R: 39,36%	R: 40,72%	R: 39,42%	R: 38,59%	R: 39,36%	
	3	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	DJPPR
			R: 108,50%	R: 100%	R: 117,53%	R: 115,38%	R: 117,45%	

TUJUAN 5: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 5 "Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien" adalah: 1) Organisasi dan SDM yang optimal; 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan 4) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Capaian utama pada Tujuan ke-5 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Organisasi dan SDM
   a. Kemenkeu telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat budaya organisasi secara sistematis, kolaboratif, dan terintegrasi, antara lain melalui penguatan budaya inovasi dan sistem kerja fleksibel. Pertama, telah dilakukan penyusunan payung hukum terkait pengelolaan ekosistem inovasi yang ditetapkan dalam KMK Nomor 1032/KM.1/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang kemudian disempurnakan menjadi KMK Nomor 1005/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem budaya inovasi, seperti sosialisasi dan *e-learning*, peluncuran aplikasi Satu Kemenkeu, dan Kemenkeu

Sandbox. Pengelolaan ekosistem inovasi juga diintegrasikan dalam kinerja pegawai dan sistem penghargaan.

Kemenkeu juga aktif berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sejak 2014. Beberapa inovasi meraih predikat tertinggi secara nasional antara lain Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN *Trade in Goods Agreement* (SiPakDE-ATIGA) sebagai Top 45 tahun 2020, Penerapan *Artificial Intelligence* sebagai *Financial Advisor* (AIFA) sebagai Top 45 tahun 2021, *Platform* Integrasi Belanja Pemerintah melalui *Digipay* sebagai Top 45 tahun 2022, SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar-K/L) dan CEISA Barang Kiriman sebagai Top 45 tahun 2023, dan *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) sebagai Top 99 tahun 2023.

Pada tahun 2024, KIPP digantikan dengan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) untuk memastikan inovasi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai unit kerja, dimana Kemenkeu menjadi salah satu Pembina Inovasi Terbaik tingkat K/L serta terdapat 3 (tiga) inovasi yang berhasil meraih predikat Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan, yaitu CWKS, CEISA Barang Kiriman, dan *e-Auction*.

Selain itu, Kemenkeu telah mengimplementasikan sistem kerja fleksibel untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga produktivitas serta kualitas hidup pegawai. Payung hukum terkait fleksibilitas tempat dan waktu bekerja telah ditetapkan melalui beberapa regulasi yang diintegrasikan dalam KMK Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi pelaksanaan dan pendalaman *roadmap* kebijakan Sistem Kerja Fleksibel sebagai bagian dari riset "*Revisiting ways of work*: Merumuskan Cara Kerja Masa Depan di Organisasi Sektor Publik".

Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, Kemenkeu berhasil meraih penghargaan "Nilai Indeks BerAKHLAK 2024 Terbaik Kategori Kementerian" dengan skor 85,66 dari KemenPANRB.

b. Implementasi *office automation* dalam rangka membangun *digital workplace* di Kemenkeu telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020. Proses ini didukung oleh penetapan KMK Nomor 487/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Automasi Perkantoran (*Office Automation*) Kementerian Keuangan. Hingga tahun 2024, beberapa capaian utama telah dicapai, termasuk integrasi *office automation* dengan berbagai aplikasi pendukung administrasi perkantoran seperti sistem persuratan elektronik, manajemen arsip digital, dan *dashboard monitoring* kegiatan pegawai. Selain itu, fitur berbasis *Artificial Intelligence* (AI) sederhana telah diimplementasikan untuk membantu klasifikasi dokumen dan penjadwalan otomatis. Kapabilitas akses *mobile* juga ditingkatkan, memungkinkan pegawai mengakses *office automation* melalui perangkat seluler dengan aman. Penguatan keamanan data dilakukan melalui penerapan standar enkripsi yang lebih tinggi dan audit keamanan sistem secara berkala.

c. Kemenkeu telah mengembangkan *Enterprise Architecture* (EA) sejak 2020 untuk mendukung transformasi digital dan tata

kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selama 2020–2024, tim EA Kemenkeu telah memetakan kondisi eksisting, merancang arsitektur *to-be*, serta memperkuat tata kelola yang *agile*. Pengembangan SDM juga dilakukan melalui berbagai pelatihan dan kolaborasi. Kemenkeu juga berkontribusi dalam evaluasi SPBE nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui asesmen kapabilitas EA dan *architecture compliance review*.

Secara aktif, Kemenkeu berpartisipasi dalam Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB, dengan capaian hasil evaluasi yang terus meningkat dan lebih tinggi dari peringkat rata-rata nasional selama kurun waktu 2021 hingga 2024 (Tahun 2021 : Kemenkeu 3,72/sangat baik, Nasional 2,24; Tahun 2023 : Kemenkeu 4,66/memuaskan, Nasional 2,79; Tahun 2024 : Kemenkeu 4,74/memuaskan, Nasional 3,12).

d. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) secara bertahap dan hati-hati untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Hingga tahun 2024, terdapat 72,32% jabatan yang telah disederhanakan dan dialihkan ke Jabatan Fungsional (JF), mencakup 3.780 jabatan dari total 5.227 jabatan yang berpotensi disederhanakan. Secara rinci, penjelasan implementasi *delayering* adalah sebagai berikut:
   1) *Delayering* terhadap 2.957 Eselon V di KPPBC, DJBC menjadi JF Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang Pertama.
   2) *Delayering* terhadap 142 Eselon IV di KPKNL, DJKN menjadi JF Pelelang dan JF Penilai Pemerintah jenjang Muda.
   3) *Delayering* terhadap 6 Eselon III dan 23 Eselon IV di Pusintek, Setjen menjadi JF Prakom Jenjang Madya dan Muda.
   4) *Delayering* terhadap 14 Eselon III dan 66 Eselon IV di DJPK menjadi JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

   Selain itu, Kemenkeu juga melakukan perbaikan ekosistem *delayering*, termasuk mekanisme kerja, perubahan budaya, konsolidasi jabatan fungsional, penguatan manajemen perubahan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak positif terhadap kinerja organisasi.

e. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan pengendalian pertumbuhan pegawai melalui strategi *negative growth* SDM, selaras dengan pembangunan *digital workplace* dan EA, penerapan sistem kerja baru, dan penyederhanaan birokrasi. Penerapan *negative growth* SDM dilaksanakan melalui strategi pemenuhan pegawai baru secara selektif dan terbatas dan penataan komposisi SDM. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah ASN Kemenkeu tercatat sebanyak 77.055 orang berdasarkan data HRIS. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019 yang sebanyak 82.468 orang, terdapat pengurangan sebesar 5.413 orang atau sekitar -6,56%. Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen umum CASN maupun PNS pindah instansi pada akhir tahun 2024, yang akan masuk sebagai pegawai Kemenkeu pada awal tahun 2025. Dengan mempertimbangkan hasil rekrutmen tersebut, jumlah SDM

Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024 sebanyak 78.085 orang, dengan realisasi *negative growth* SDM selama lima tahun sebesar -5,25%. Dalam penerapan *negative growth* SDM tersebut, Kemenkeu tetap memerhatikan dan menjaga capaian kinerja organisasi dan pegawai. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, kinerja organisasi tetap terjaga di atas 100%, dan rata-rata kinerja pegawai meningkat dari sebelumnya 110,24 pada tahun 2020 menjadi 112,46 pada tahun 2024.

f. Kemenkeu telah melakukan penataan komposisi SDM melalui pengembangan kapabilitas SDM internal dan Implementasi *Internal Job Vacancy* (IJV). Pengembangan kapabilitas SDM dilakukan melalui program *reskilling* dan *upskilling* pada pegawai yang terdampak ekosistem kerja baru. Selain itu, telah dilaksanakan penguatan kompetensi lintas fungsi dalam pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan *e-learning mandatory* yang diikuti oleh seluruh pegawai, serta program *secondment* lintas unit eselon I. IJV memberikan kesempatan untuk mutasi antarunit eselon I guna redistribusi pegawai dan pemenuhan kebutuhan pada unit eselon I yang tidak dapat dipenuhi dari internal unit bersangkutan. IJV telah mendukung rekomposisi SDM *core*:*supporting*, dimana pada akhir tahun 2024, komposisi SDM *core:support* sebesar 73,1 : 26,9.

g. Kemenkeu telah mengoptimalkan program magang mahasiswa untuk mendukung implementasi program nasional kampus merdeka, merdeka belajar, sekaligus sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan SDM jangka pendek. Dalam kurun tahun 2020-2024, Kemenkeu telah menerima mahasiswa magang sebanyak 13.076 orang, yang terdiri atas program magang reguler sebanyak 12.758 orang, program magang dan studi independen bersertifikat sebanyak 125 orang, dan program magang bekerja sama dengan 3 Perguruan Tinggi sebanyak 193 orang. Berdasarkan evaluasi, tingkat kepuasan layanan magang pada tahun 2024 sebesar 4,53/5 atau meningkat dari tahun 2023 sebesar 4,46/5.

h. Kemenkeu mengukur dan mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai metode. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan menggunakan *Assessment Center* sesuai Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, mencakup 20.636 pejabat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, dan pelaksana. Selain itu, penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural juga dilakukan terhadap 105.750 pegawai melalui *Situational Judgement Test* (SJT) setelah mengikuti *e-learning* melalui Kemenkeu *Learning Center*. Untuk meningkatkan kompetensi, Kemenkeu mengadakan *Online Group Coaching* guna memetakan *gap* dan merancang pengembangan pegawai. Teknologi juga dimanfaatkan melalui *online assessment*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan proses bisnis dalam penilaian pegawai.

i. Kemenkeu turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang keuangan negara pada K/L dan Pemda, dengan:
   1) mengalokasikan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada K/L dan Pemda sebanyak 7.436 orang atau

27% dari total lulusan sebanyak 27.287 orang kepada 70 K/L dan 97 Pemda, untuk memenuhi kebutuhan auditor, pengelola keuangan negara, serta aset.

2) memperluas diaspora melalui penugasan pejabat/pegawai sebanyak 145 orang pada 145 instansi pemerintah.
3) menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang keuangan negara.
4) menginisiasi program afirmasi dan pembibitan mahasiswa PKN STAN bekerja sama dengan Pemda. Sampai dengan tahun 2024, PKN STAN telah menerima 249 orang mahasiswa program afirmasi dari 16 Provinsi, dan 220 orang mahasiswa program pembibitan dari 28 Pemda.

j. Kemenkeu mengelola data dan pengetahuan secara sistematis agar tidak hilang, melalui manajemen pengetahuan berbasis audio, video, dan audiovisual yang disebarluaskan lewat Kemenkeu *Learning Center* (KLC). Seluruh infrastruktur pendukung proses manajemen pengetahuan telah selesai disusun, yang meliputi cetak biru manajemen pengetahuan, *software* KMS, penghimpunan aset intelektual, panitia penjaminan mutu, penyediaan meja bantuan (*helpdesk*), evaluasi aset intelektual, dan penghargaan manajemen pengetahuan.

   Berdasarkan *framework Asian Productivity Organization* (APO), tingkat maturitas manajemen pengetahuan Kemenkeu meningkat dari 74,52% pada 2022 menjadi 95,24% pada 2024, mencapai level 5 (*Maturity*), menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan telah menjadi bagian utama dalam organisasi.

k. Kemenkeu *Corporate University* (CorpU) mendukung visi Kemenkeu dengan mengembangkan kompetensi SDM melalui pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai berbasis target kinerja didukung manajemen pengetahuan. Implementasi diperkuat dengan antara lain KMK Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengatur tentang implementasi dan model pembelajaran terintegrasi, serta penilaian tingkat implementasi. Kemenkeu CorpU juga turut mendukung dalam pengembangan ekosistem *Corporate University* di Indonesia dengan secara rutin menjadi tujuan *benchmarking* dari berbagai KLDI. Pada kurun waktu 2021-2024, terdapat 130 frekuensi *benchmarking* KLDI yang difasilitasi oleh Kemenkeu CorpU.

l. Peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui pembelajaran, akreditasi, dan sertifikasi kompetensi. Peningkatan kompetensi pembelajaran telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan capaian peningkatan kinerja alumni sebesar 104,72% (Evaluasi *kirkpatrick* level 4) dan peningkatan kualitas perilaku kerja alumni sebesar 95,36% (Evaluasi *kirkpatrick* level 3). Terkait dengan program akreditasi, telah dilakukan kegiatan akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara, yang ditandai dengan penetapan Peraturan Kepala BPPK Nomor 2 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan

Teknis di Bidang Keuangan Negara yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan akreditasi SDM pengelola keuangan negara bekerjasama dengan berbagai BPSDM provinsi, antara lain BPSDM provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Adapun untuk program sertifikasi, telah diterbitkan dasar hukum terkait dan melaksanakan berbagai sertifikasi, termasuk Sertifikasi JF AA, Ahli Kepabeanan, dan JF Penilai, JF Penata Laksana Barang, dan JF AKPD.

m. Kemenkeu melalui PKN STAN berkomitmen mempercepat akselerasi transformasi akademik dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di bidang keuangan negara melalui transformasi kelembagaan, pemutakhiran kurikulum, dan pemutakhiran pengetahuan dosen, publikasi dan penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat.

   Transformasi kelembagaan dilakukan secara berkesinambungan agar sejalan dengan dinamika pengelolaan keuangan negara, kebutuhan industri, dan semangat merdeka belajar. Program afirmasi diperluas mencakup daerah 3T dan program pembibitan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, PKN STAN juga menerima mahasiswa internasional dan menerapkan metode pembelajaran *blended learning*, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam Program Sarjana Terapan, dan bekerja sama dengan unit eselon I lingkup Kemenkeu, terkait penyediaan pengajar/narasumber yang kompeten.

   Pemutakhiran kurikulum secara berkelanjutan dilakukan melalui koordinasi dengan para *stakeholder* dan unit eselon I terkait, mencakup penyempurnaan kurikulum Program Diploma dan Sarjana Terapan, serta implementasi laboratorium nyata dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum juga memfasilitasi penyelenggaraan *Student Mobility Awards* (SMA) dan *Academic Mobility Awards* (AMA), penyelenggaraan mata kuliah dengan satuan kredit semester (SKS) praktikum, *case-based learning* dan *project-based learning*, integrasi kurikulum akademik dan karakter, program *fast track*, serta penetapan mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah kekhususan.

   Pemutakhiran pengetahuan dosen, publikasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat juga menjadi fokus, antara lain melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti *The Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA), Institut Penilaian Negara (INSPEN) Malaysia, Kementerian Luar Negeri, PT Pegadaian, dan berbaga kampus antara lain dalam rangka sertifikasi, pertukaran dosen/mahasiswa, penulisan buku dan riset serta pemberdayaan UMKM, BUMDes, serta penyaluran Dana Desa. Selain berpartisipasi dalam konferensi ilmiah global, forum diskusi dan *knowledge sharing*, Kemenkeu melalui PKN STAN juga turut aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.8

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal

Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	T: 4 (skala 5)	Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)
			R: 4,36 (skala 5)	R: 4,35 (skala 5)	R: 4,37 (skala 5)	R: 4,41 (skala 5)	R: 4,46 (skala 5)	
	2	Persentase penyelesaian *delayering*	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: -	T: -	Setjen dan UE I Terkait
			R: 113,33%	R: 117,50%	R: 117,50%	R: -	R: -	
	3	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	T: -	T: 88,20%	T: 89,00%	T: 89,80%	T: 90,50%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
			R: -	R: 98,67	R: 117,70	R: 119,09	R: 118,32	
	4	Tingkat implementasi *learning organization*	T: 75%	T: 77%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
			R: 95,59%	R: 89,11%	R: 89,11%	R: 92,22%	R: 94,22%	
	5	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	T: 90%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	T: 87%	BPPK
			R: 99,68%	R: 89,90%	R: 88,78%	R: 91,49%	R: 104,72%	
	6	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	T: 90%	T: 93%	T: -	T: -	T: 91,49%	BPPK
			R: 96,12%	R: 98,21%	R: -	R: -	R: -	
	7	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	T: -	T: -	T: 90%	T: 92%	T: 94%	BPPK
			R: -	R: -	R: n/a	R: n/a	R: n/a	

2. Terkait dengan Sistem Informasi:
   a. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemenkeu periode 2020-2025 mengikuti *best practice* yang diatur dalam PMK Nomor 97/PMK.01/2017 dan PMK Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tata kelola TIK yang andal mencakup beberapa aspek penting, seperti penerapan tata kelola keamanan informasi, standardisasi sistem TIK, penataan ulang struktur organisasi dan proses kerja TIK, dan Peningkatan kualitas SDM TIK. Pengakuan atas pengelolaan tata kelola TIK dibuktikan dengan capaian sertifikasi-sertifikasi berikut:
      1) ISO 20000:2018 tentang IT *Service Management* (ITSM).
      2) ISO 27001:2013 tentang *Information Security Management System* (ISMS).
      3) ISO 9001:2015 tentang *Quality Management Systems* (QMS).
      4) ISO PAS 99:2012 tentang *Integrated Management System* (IMS).
      5) ANSI/TIA-942 Rated 4 tentang *Data Center Design and Facility Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
      6) ANSI/TIA-942 Rated 4 tentang *Data Center Design and Facility Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
      7) ANSI/TIA-942 Rated 3 tentang *Data Center Operations Standard* untuk *Smart Data Center* Kemenkeu.
      8) ANSI/TIA-942 Rated 3 tentang *Data Center Design Standard* untuk *Disaster Recovery Center* Kemenkeu.

Hingga 31 Desember 2024, Kemenkeu berhasil mempertahankan pengakuan atas pengelolaan tata kelola TIK sesuai *best practice* melalui capaian sertifikasi tersebut.

b. Kemenkeu telah melaksanakan penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK melalui pengembangan *Data Center* (DC) secara bertahap. Pada tahun 2021 dan 2022, pekerjaan Pengembangan *Data Center* tahap 1 dan 2 meliputi peningkatan kapasitas struktur gedung dan pelaksanaan mekanikal elektrikal, serta pengembangan gedung Pengelola *Data Center*. Pada tahun 2024, pengembangan *Smart Data Center* (*Smart DC*) difokuskan pada tahap 3, yang meliputi pengembangan mekanikal elektrikal dan ruang DC lantai 5 dan 6. Pengembangan ini telah diselesaikan secara penuh, dibuktikan dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai Berita Acara Serah Terima pada 2 Januari 2025.

c. Kemenkeu telah melaksanakan berbagai proyek TIK strategis untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi. Pada tahun 2022, proyek-proyek ini meliputi modernisasi infrastruktur dan manajemen jaringan, implementasi Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) melalui portal layanan *self-service* dan pengembangan *roadmap* hingga 2025, pengembangan Kemenkeu *Service Bus* (KSB) untuk integrasi layanan dan data, dan penguatan aplikasi umum, khususnya kategori kehumasan dan digitalisasi hukum.

d. Pada tahun 2024, fokus utama adalah pada pengembangan Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) dan Portal Satu Data Kemenkeu. KCP menyediakan layanan komputasi awan dengan pengembangan *multiplatform* untuk meningkatkan keamanan dan tata kelola. Portal Satu Data Kemenkeu dikembangkan secara bertahap sampai dengan tahun 2024 sebagai layanan *one-stop data services* yang mencakup pencarian, permohonan, dan pemanfaatan data, serta dilengkapi dengan *tools* visualisasi dan analitik data.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.9

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	1	Tingkat *downtime* sistem TIK	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	T: 0,10%	Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)
			R: 0,0251%	R: 0,0106%	R: 0,0145%	R: 0,0242%	R: 0,0244%	
	2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%	Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
			R: 98,41%	R: 99,59%	R: 99,86%	R: 108,00%	R: 112,60%	

3. Terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Internal:

a. Kemenkeu telah melakukan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu dengan diterbitkannya PMK Nomor 83 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Poin-poin

penting dalam penguatan sistem pengendalian intern, antara lain:

1) Penajaman fokus pengendalian intern pada penguatan perilaku etis dan berintegritas, kepemimpinan yang efektif, SDM yang kompeten, dan budaya sadar risiko.
2) Restrukturisasi model tiga lini dan penguatan standar kualifikasi, serta kompetensi tiap lini.
3) Integrasi peran tiap lini secara *end to end* dalam pengawasan risiko probis, SDM, dan TIK (*one view of risk*).

b. Kemenkeu mengimplementasikan audit berbasis teknologi informasi dengan capaian utama berupa kajian revisit *roadmap data analytics* di Inspektorat Jenderal. Kajian ini menjadi fondasi strategis untuk penguatan kompetensi auditor dan integrasi teknologi pengawasan hingga 2029, dengan target tersedianya pengawas yang ahli di bidang *data analytics*.

c. Selain itu, Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) juga mengembangkan *Continuous Audit-Continuous Monitoring* (CA–CM) untuk mendukung pengawasan terotomasi agar dapat dilakukan pengawasan secara *real-time* dan berkelanjutan melalui akses data secara langsung.

d. Aplikasi *e-Reviu* LK dikembangkan berbasis *continuous audit* dengan memanfaatkan aliran data dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK). Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini anomali pada laporan keuangan sebelum audit eksternal dilakukan.

e. Inisiatif pencegahan meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern, sosialisasi anti korupsi, pengelolaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, implementasi *helpdesk* pencegahan, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), pengelolaan saluran pengaduan *Whistleblowing System* (WISE), pelaporan harta kekayaan pegawai, *profiling* pegawai, pemantauan media elektronik, media sosial, dan *digital footprint*.

f. Kegiatan penindakan yang dilakukan meliputi audit investigasi, pengumpulan bahan keterangan/pengumpulan data dan informasi, saber pungli, *spotcheck*, klarifikasi/eksaminasi laporan harta kekayaan, pemeriksaan pelanggaran hukuman disiplin, dan digital forensik.

g. Sebagai bagian dari transformasi digital Kemenkeu, pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi salah satu fokus strategis Kemenkeu. Terkait hal ini, Kemenkeu melalui Itjen menginisiasi pengembangan *continuous monitoring* yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pengawasan pada lini pertama dan kedua. Selain itu, pengembangan *Continuous Audit* (CA) yang telah dilakukan diarahkan untuk terintegrasi dan melengkapi sistem *Continuous Monitoring* (CM), guna menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif dan *real-time*.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.10

Capaian Indikator atas Sasaran Strategis Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah

Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	1	Indeks integritas	T: 90 (skala 100)	T: 90,5 (skala 100)	T: 91 (skala 100)	T: 91,5 (skala 100)	T: 91,5 (skala 100)	Seluruh UE I Terkait (Itjen)
			R: 104,06 (skala 100)	R: 89,45 (skala 100)	R: 89,45 (skala 100)	R: 92,48 (skala 100)	R: 109,67 (skala 100)	
	2	Indeks opini BPK atas LK BA 015	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	T: 4 (skala 4)	Setjen, Itjen
			R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	R: 4 (skala 4)	

4. Terkait dengan Pengelolaan *Special Mission*
   a. LNSW
      1) Pengelolaan *Indonesia National Single Window* (INSW) dan penyelenggaraan Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) dilaksanakan untuk mendorong peningkatan layanan publik di bidang ekspor-impor dan logistik. Pengelolaan ini mencakup integrasi sistem layanan pada 27 kementerian/Lembaga terkait penyediaan *Indonesia National Trade Repository* (INTR), integrasi dan penyederhanaan proses bisnis perizinan, pengangkutan kapal, layanan pembayaran/*single billing* PNBP kapal, layanan fasilitasi, serta layanan lain yang mendukung tata kelola ekspor-impor dan logistik. Selain itu juga berperan aktif dalam organisasi multilateral, antara lain WTO, WCO, dan IMO, terkait dengan implementasi *National Single Window*, serta menjadi *electronic data exchange authority* untuk mendukung *cross-border paperless trade* melalui pertukaran data dengan negara mitra, baik secara bilateral maupun regional.
      2) Pengembangan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dilakukan untuk mendukung penguatan pengambilan keputusan berbasis komoditas. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 6 (enam) komoditas pangan dan 11 (sebelas) komoditas non-pangan yang terintegrasi ke dalam Neraca Komoditas. Pengembangan SINAS NK dilaksanakan melalui integrasi proses bisnis dan sistem layanan pada kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
      3) Pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dilakukan untuk mendorong optimalisasi pengawasan penerimaan negara, khususnya pada PNBP. Sampai dengan tahun 2024, komoditas yang telah terintegrasi dalam SIMBARA meliputi batubara, timah, nikel, dan bauksit. SIMBARA dilaksanakan melalui integrasi proses bisnis dan sistem pada kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

4) Mendorong perbaikan kualitas layanan publik dilakukan melalui transformasi digital, diantaranya yaitu pengembangan Usaha Kecil Menengah Ekspor (UKME) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendorong UMKM dalam kegiatan perdagangan internasional.

b. Lembaga Pengelola Dana

1) Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
   a) LDKPI telah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), LDKPI menempatkan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi negara serta menjalankan Investasi sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Telah ditetapkan perubahan atas KMK Nomor 169/KMK.05/2022 dengan ditetapkannya KMK Nomor 4/KMK.05/2024 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 169/KMK.05/2022 yang memperluas fleksibilitas LDKPI dalam mengelola investasi.
2) Kerjasama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya, antara lain:
   a) PIP telah menjalin kerja sama pendanaan dengan Pemkab Bone Bolango, Pemkab Luwu Utara dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
   b) BPDLH telah menjalin kerjasama dengan lembaga donor untuk mengelola dana lingkungan hidup yang terdiri dari lembaga donor *World Bank*, lembaga donor *United Nations Development Programme* (UNDP), Kerjasama pendanaan pengelolaan dari *Ford Foundation*, dan Kerjasama dengan Pemerintah Norwegia - *FoLU Net Sink* 2030.
   c) BPDPKS menjalin kerjasama dengan kerjasama dan dukungan pendanaan kegiatan *Workshop FACT Dialogue* dalam rangka peningkatan akses pasar dan keberterimaan standar sertifikasi keberlanjutan sawit (ISPO) di negara-negara konsumen komoditas sawit dalam kerangka penurunan emisi karbon tanggal 7-8 Februari 2023, kerjasama dan dukungan pendanaan program kampanye positif sawit di Uni Eropa kerja sama GAPKI dan DCI Group Tahun 2023, kerja sama dan dukungan pendanaan dan partisipasi delegasi pada *Joint Mission Indonesia – Malaysia to the* EU dalam rangka diplomasi EUDR di Brussell, Kerjasama dan Dukungan pendanaan *Working Meeting & Dialogue with EU Key Industry of Palm Oil* kerja sama CPOPC di Brussel, kerja sama dan dukungan pendanaan dan partisipasi delegasi RI pada SOM CPOPC di Malaysia.
   d) LDKPI telah melakukan penyaluran hibah pada sektor kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, pertanian, tata kelola, dan energi yang tersebar ke beberapa negara di kawasan Afrika, Eropa, Amerika dan Karibia, Asia dan Pasifik dengan jumlah negara penerima hibah, dengan

rincian sebagai berikut, Tahun 2020: 3 negara; Tahun 2021: 11 negara; Tahun 2022: 15 negara; Tahun 2023: 38 negara; Tahun 2024: 89 negara; memperkuat sinergi dengan unit lain di Kemenkeu, termasuk BLU dan SMV, berkolaborasi dengan BUMN, perusahaan dalam negeri, dan UMKM sebagai bentuk dukungan LDKPI terhadap perekonomian dengan mendorong perluasan ekspor produk dalam negeri, serta melakukan *joint partnership* dan *joint operation* dengan beberapa *development partner*, baik bilateral maupun multilateral, antara lain : World Bank, IsDB, JICA, AfD, GIZ, di sektor kesehatan, *climate change*, energi terbarukan, pertanian, dan perikanan.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.11
Capaian Indikator atas Sasaran Strategis
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	1	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	T: 96,87	T: 100	T: 100	T: 100	T: 100	BLU Pengelola Dana dan SMV terkait
			R: 105,47	R: 115,35	R: 109,35	R: 114,36	R: 111,48	
	2	*Dwelling time*	T: 3,6 hari - 2,9 hari	T: 3,5 hari-2,9 hari	T: 3,4 hari-2,9 hari	T: 3,3 hari-2,9 hari	T: 2,9 hari	LNSW
			R: 2,83 hari	R: 2,80 hari	R: 2,84 hari	R: 2,62 hari	R: 2,88 hari	

1.1.3 ASPIRASI MASYARAKAT

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin, dari semula 4,34 (empat koma tiga empat) tahun 2020 menjadi 4,48 tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap 10 (sepuluh) aspek layanan pada tahun 2024 juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Meskipun kepuasan agregat sudah tinggi, masih terdapat potensi penguatan kualitas layanan yang berkelanjutan, khususnya pada aspek kualitas, kecepatan, dan infrastruktur digital. Untuk meningkatkan skor ini, Kemenkeu perlu berinvestasi lebih dalam infrastruktur digital dan meningkatkan layanan daring yang lebih responsif.

Upaya perbaikan dirancang untuk menjaga standar pelayanan publik yang tinggi, memperkuat efisiensi operasional, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna di tengah tren digitalisasi. Beberapa rekomendasi terkait antara lain: 1) optimalisasi layanan berbasis digital, 2) optimalisasi layanan telepon dan peningkatan kualitas komunikasi, 3) penyediaan sarana dan prasarana komunikasi visual yang informatif, 4) pembuatan himpunan peraturan yang mudah diakses bagi *stakeholder* 5) penyederhanaan alur dan proses penyelesaian layanan, 6) sosialisasi antikorupsi dan keterbukaan informasi, 7) pengembangan sistem umpan balik dan penanganan pengaduan, serta 8) pengembangan saluran pengaduan untuk pelanggaran integritas.

Dalam rangka menyerap masukan dari *stakeholders*, Kemenkeu juga melaksanakan penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan

sebagai upaya memperoleh informasi, kritik, serta saran yang konstruktif guna mendukung proses penyempurnaan kebijakan dan kinerja institusi. Kegiatan ini dilakukan melalui forum diskusi (forum komunikasi/konsultasi publik) bersama masyarakat, asosiasi dan lembaga masyarakat serta edukasi publik kepada mahasiswa yang sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan, menjalin komunikasi yang transparan, serta membangun kemitraan yang sinergis antara Kemenkeu dengan para pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut diperoleh berbagai masukan strategis antara lain terkait dengan penguatan integritas di lingkungan Kemenkeu, penyederhanaan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, dan perbaikan kualitas layanan dan penyempurnaan regulasi di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran, penguatan daya beli masyarakat, serta peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) agar lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun dari kegiatan edukasi publik teridentifikasi adanya kebutuhan edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara, khususnya kepada kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, guna mendorong pemahaman yang lebih komprehensif serta partisipasi aktif dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kemenkeu telah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Kemenkeu mengidentifikasi kekuatan atau potensi utamanya yaitu komitmen pimpinan, tata kelola dan budaya organisasi Kemenkeu yang proaktif dan adaptif. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengelolaan organisasi, SDM, pengendalian dan pengawasan internal, dan pengembangan TIK dalam mewujudkan kinerja organisasi secara optimal. Adapun kelemahan yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait dengan kualitas layanan, birokrasi, serta otomasi layanan.

Pada aspek organisasi, pengelolaan organisasi Kemenkeu telah didesain secara modern antara lain ditandai dengan adaya ekosistem kerja yang *reliable* seperti pengimplementasian *office automation, reenginering* proses bisnis, serta pengembangan pola kerja kolaboratif dan pelaksanaan reformasi birokrasi berkelanjutan yang ditandai dengan nilai reformasi birokrasi yang secara konsisten meningkat selama lima tahun terakhir (2019:87,7; 2023: 93,34).

Pengelolaan SDM Kemenkeu juga telah diselaraskan dengan implementasi pola kerja baru yaitu dengan diperkenalkannya fleksibilitas dalam bekerja (*Flexible Working Arrangement*) yang didukung optimalisasi penggunaan teknologi seperti *platform* kolaborasi dan *video conference*. Implementasi pola kerja baru ini juga dilengkapi dengan penyempurnaan kebijakan manajemen kinerja, penguatan budaya Kemenkeu, dan pemberdayaan *talent*. Sebagai dampak dari pola kerja baru tersebut, Kemenkeu juga menerapkan kebijakan *negative growth*, sehingga secara konsisten menurunkan jumlah pegawai Kemenkeu selama periode 2019-2023 (tahun 2019: 82.468; tahun 2024: 77.055)

Selain itu, kekuatan Kemenkeu juga dapat dilihat dari pengawasan internal yang efektif yang antara lain melalui implementasi 3 *lines of defences* dan ditunjukan dengan indeks integritas yang semakin baik sejak tahun 2020-2024 (2020: 104,06; 2024: 91,38). Perkembangan teknologi yang makin marak juga mendorong Kemenkeu untuk menjalankan

transformasi digital secara inklusif dan berdampak, ditandai dengan pembangunan dan pengembangan berbagai proyek strategis TIK di antaranya melalui implementasi inisiatif strategis pembangunan *Smart Data Center*, pembangunan *Super Apps* Satu Kemenkeu untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, serta penyelesaian *core system* TIK Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis IT pada periode 2020-2024.

Namun demikian, Kemenkeu juga memiliki beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan dari organisasi. Salah satunya terkait dengan beberapa aspek layanan yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik atas pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. Berdasarkan hasil rekomendasi dari pelaksanaan SKPL dan Evaluasi SBPE, beberapa aspek yang memerlukan perhatian di antaranya terkait utilitas teknologi informasi dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Selain itu, kompleksitas birokrasi di Kemenkeu dengan beban administrasi yang tinggi dan kurangnya optimalisasi aset perlu mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan. Dalam aspek digital, otomasi layanan dan *shared service* masih perlu dioptimalkan, antara lain meliputi perluasan digitalisasi layanan, interkoneksi antarlayanan yang masih perlu diperkuat, situs antarlayanan belum menjadi *one-stop service*, serta *reskilling* dan *upskilling* kompetensi SDM. Di sisi lain, belum dapat dihindari bahwa di Kemenkeu masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan nilai integritas yang ditunjukan antara lain jumlah pengaduan melalui WISE yang cenderung meningkat serta perlunya upaya menjaga keberlanjutan bagi unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM, di samping akselerasi bagi unit yang saat ini belum mendapatkan predikat ZI WBK.

Selain kekuatan dan kelemahan, Kemenkeu juga telah mengidentifikasi peluang dan tantangan. Peluang besar Kemenkeu adalah dipercaya sebagai salah satu penggerak pembangunan (*strategic diamond*), khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan ekspektasi Presiden atas penguatan posisi Kemenkeu dalam hal: (1) ketersediaan dan pengalokasian secara tepat dan cermat, (2) fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional, dan (3) sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan nasional. Dengan posisi yang semakin strategis, Kemenkeu harus bekerja *beyond* "*business as usual*".

Indonesia memiliki sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia tumbuh resilien dengan daya beli masyarakat tetap terjaga dan tingkat kesejahteraan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di kisaran 5,0-6,0 persen selama periode 2015-2019, dan kembali berkinerja positif pasca Covid-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada tahun 2023. Inflasi yang stabil dan terkendali menciptakan ruang kebijakan guna mendorong pertumbuhan sektor rill.

Selain itu, Indonesia dengan predikat sebagai negara dengan GDP terbesar ke-16 serta ekonomi terbesar ke-4 di dunia dan yang terbesar di kawasan ASEAN (data tahun 2024), memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta ekonomi global. Posisi ini memberikan peluang untuk memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang lebih besar, baik di tingkat regional maupun internasional diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional termasuk di dalamnya sinergi kolaborasi internasional dan antarlembaga.

Salah satu megatren yang membawa peluang signifikan adalah bonus demografi. Dengan lebih dari 281 juta penduduk, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Saat ini populasi penduduk usia produktif Indonesia mendominasi populasi secara keseluruhan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan inovasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Revolusi digital yang semakin pesat dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi di berbagai sektor serta mengidentifikasi dan mengelola risiko teknologi.

Untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah dibutuhkan sektor-sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif, antara lain peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan ekonomi digital.

Pada bidang keuangan negara, terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan stabilitas politik yang relatif terjaga, reformasi ekonomi yang terus dilakukan, serta potensi pasar domestik yang besar, Indonesia menjadi negara yang menarik sebagai tujuan investasi. Indonesia berpotensi untuk memperluas basis pajak dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital. Perluasan objek penerimaan negara juga dapat dilakukan dengan memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC). Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, berbagai skema kreatif/*alternative financing* dapat membuka jalan untuk pembiayaan proyek-proyek besar yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Kemenkeu dihadapkan pada berbagai tantangan dan kondisi lingkungan strategis yang dinamis. Kemenkeu dituntut berperan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas ditengah volatilitas pasar dan kondisi global serta domestik yang semakin kompleks.

Dalam ranah domestik, tantangan juga datang dari berbagai dinamika yang semakin beragam. Salah satu masalah yang mengemuka adalah perlunya peningkatan produktivitas ekonomi Indonesia yang didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur baik yang bersifat fisik maupun kebijakan. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial, sehingga ekonomi Indonesia sulit tumbuh cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen. Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, penduduk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah sebesar 52,32 persen, lulusan pendidikan menengah 34,82 persen dan lulusan pendidikan atas sebesar 12,86 persen.

Selain itu terdapat pergeseran struktur kelas masyarakat yakni penurunan penduduk kelas menengah, sedangkan masyarakat calon menengah dan yang rentan miskin terus bertambah. Risiko pergeseran ini disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Tingginya angka PHK mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat.

Bonus demografi yang dialami Indonesia dapat menjadi pisau bermata dua. Dengan tingginya persentase penduduk usia produktif, maka semakin tinggi pula kebutuhan hidup masyarakat yang dihadapkan dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air). Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Megatren yang ada saat ini dapat menjadi tantangan yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan iklim yang semakin nyata menjadi ancaman yang mendalam, tidak hanya bagi kelestarian alam, tetapi juga untuk stabilitas ekonomi dan sosial dan kesiapan APBN dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, eskalasi geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di kawasan Asia maupun global, berpotensi memperburuk ketidakpastian politik dan memperparah ketegangan antarnegara. Dari aspek geoekonomi, dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (kebijakan Trump) berdampak kepada sikap diskriminatif ekonomi yang mengarah ke tren unilateralisme dan melemahnya semangat multilateralisme.

Tantangan besar lain yang dihadapi Indonesia adalah pengelolaan keuangan negara yang belum optimal. Salah satunya adalah rendahnya *tax ratio*, yang menunjukkan bahwa potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal. Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang. Selain itu, efektivitas dan efisiensi belanja negara yang masih rendah juga menjadi masalah besar dalam menjaga kualitas pembangunan.

Berdasarkan pemetaan kondisi lingkungan strategis secara umum di atas, Kemenkeu telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kemenkeu pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi Kemenkeu, yakni 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Pendapatan Negara, 3) Pengeluaran Negara, 4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan, 5) Birokrasi dan Layanan Publik, serta 6) Pengelolaan Tugas Khusus.

1. Pengelolaan Fiskal

a. Potensi

1) Peluang investasi di Indonesia sangat potensial, sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang diperkuat dengan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah baru.
2) Komitmen pemerintah Indonesia dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim, sebagai upaya pemerintah untuk menurunkan laju emisi dalam jangka panjang serta didukung potensi sumber pendanaan dan dukungan internasional dalam menghadapi perubahan iklim.
3) Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, yang dapat mewakili posisi negara berkembang dan juga berkomitmen untuk mempererat dialog dalam rangka mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan global serta meningkatkan kerjasama internasional.
4) Potensi dari pengembangan wilayah baru, antara lain potensi berkembangnya sentra ekonomi baru di wilayah IKN dan sekitarnya serta peningkatan investasi di wilayah baru sebagai wujud pemerataan ekonomi.
5) Peluang akselerasi transformasi ekonomi yang didukung dengan kesinambungan fiskal yang terjaga, sumber daya alam yang

melimpah, peningkatan nilai tambah industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan eksportir, pengurangan impor, penajaman fungsi sektoral dan ekosistem BUMN, pengembangan inovasi serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

6) Bonus demografi, yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.
7) Terdapat rekomendasi International *Budget Partnership* untuk melakukan penyusunan perkiraan anggaran dalam bentuk neraca.
8) Pengelolaan risiko fiskal daerah.
9) KEM-PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*) – Indeks Sinergi Fiskal dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah.

b. Permasalahan

1) Ketidakpastian perekonomian global, akibat konflik dan dinamika perekonomian global serta dinamika perlambatan pertumbuhan.
2) Meningkatnya risiko keuangan negara akibat perubahan iklim, antara lain kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai target NDC 2023 dan NZE 2060
3) Belum berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang disebabkan antara lain kemampuan SDM, serta paradigma bahwa ekonomi hijau belum menghasilkan profit yang lebih baik daripada ekonomi konvensional.
4) Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan banyak sumberdaya, antara lain transformasi fiskal secara holistik.
5) Transparansi fiskal masih perlu ditingkatkan.
6) Perumusan kebijakan fiskal daerah belum efisien dan efektif yang ditandai pengalokasian anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja/*outcome*, masih bersifat jangka pendek dan terfragmentasi, serta struktur anggaran daerah yang belum selaras dengan struktur anggaran pusat.

2. Pendapatan Negara

a. Potensi

1) Perluasan obyek penerimaan negara, antara lain perluasan obyek cukai, optimalisasi penerimaan yang bersumber dari komoditas minerba, penerimaan pajak dari sektor terdampak termasuk sektor energi baru terbarukan, pajak karbon, dan aktivitas *underground economy*, serta intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP.
2) Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi, sehingga perlu dibarengi dengan pemberian berbagai insentif/fasilitas di bidang perpajakan.
3) Perkembangan IT yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara, antara lain optimalisasi penerimaan APBN, maupun pemanfaatan data intelijen dengan dukungan teknologi informasi berbasis *artificial intelligence* (AI).
4) Kemudahan akses dan pertukaran data untuk mendorong penerimaan negara, antara lain kemudahan akses dan pertukaran data PNBP, optimalisasi data kegiatan intelijen perpajakan dan data intelijen lainnya serta peningkatan integritas data pihak ketiga untuk kepentingan perpajakan.

b. Permasalahan

1) Administrasi dan proses bisnis penerimaan negara yang belum optimal, sehingga diperlukan penyempurnaan proses bisnis

kepabeanan dan cukai serta modernisasi sistem administrasi PNBP di seluruh tahapan pengelolaan PNBP.

2) Masih rendahnya kepatuhan stakeholder terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara.
3) Belum optimalnya pengawasan terkait penerimaan negara serta peredaran barang terlarang dan dibatasi, antara lain potensi peningkatan peredaran BKC ilegal dan masih adanya penyalahgunaan NPP, risiko penghindaran/penggelapan oleh wajib pajak, penyalahgunaan pemberian berbagai insentif/fasilitas, kurangnya kapasitas SDM pengawasan, serta isu *fraud* dalam hal penerbitan faktur pajak.

3. Pengeluaran Negara

a. Potensi

1) Realisasi Belanja Negara semakin optimal dalam menyerap pagu yang ditetapkan.
2) Belanja Pemerintah Pusat memberi manfaat langsung untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga.
3) Kinerja Belanja K/L cukup baik dengan disiplin tata kelola yang terus terjaga.
4) TKD menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5) Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sudah mulai berjalan.
6) Dana Keistimewaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

b. Permasalahan

1) Adanya kebutuhan fleksibilitas anggaran belanja pemerintah sebagai *tool* intervensi kebijakan.
2) Sinkronisasi belanja K/L, Transfer ke daerah dan APBD masih belum optimal dilaksanakan.
3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak cukup memberikan persamaan persepsi capaian program-program pemerintah.
4) Kuantitas dan kualitas belanja negara perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
5) Belanja K/L belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam mendukung program dan kegiatan strategis yang bersifat prioritas.

4. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

a. Potensi

1) Pengelolaan aset kekayaan negara serta optimalisasi pengelolaan dana kas negara telah memberikan PNBP dengan tren meningkat.
2) Digitalisasi perbankan dan untuk simplifikasi pengelolaan pelaksanaan anggaran pemerintah melalui pembangunan ekosistem *cashless* pembayaran pemerintah.
3) Pengembangan SIMAN untuk mendorong pengelolaan kekayaan negara semakin produktif dan terciptanya *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
4) Aplikasi Lelang sebagai inovasi berkelanjutan terbaik nasional menjadi *one stop service* layanan lelang dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara, penegakan hukum, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

5) Pengelolaan investasi yang berfokus pada investasi dan pengembangan berkelanjutan.
6) Peluang penggunaan Skema Kreatif/Alternatif *Financing* untuk pembangunan nasional dengan pengelolaan risiko yang memadai masih sangat dibutuhkan.
7) Pengembangan pasar keuangan dan perluasan pengelolaan pembiayaan termasuk pembiayaan syariah yang *prudent* dan efisien.
8) Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan indeks sinergi fiskal.

b. Permasalahan

1) Belum tersedia *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian dalam pengambilan keputusan program pembangunan, serta neraca sumber daya alam yang tersedia belum komprehensif untuk mendukung kebijakan fiskal.
2) Sistem informasi kinerja dan fiskal nasional masih belum terintegrasi dan *holistic* sebagai akibat belum tersedianya referensi yang standar antara BAS Pusat dan Daerah.
3) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi *Financial Advisor* ke daerah.
4) Besarnya nilai piutang negara pada LKPP membutuhkan perbaikan pengelolaan piutang negara pada K/L.
5) Integritas data pengelolaan BMN perlu ditingkatkan.
6) Kondisi perekonomian dan pasar keuangan global masih dipenuhi ketidakpastian memicu keterbatasan pendanaan dan likuiditas pasar.
7) Lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan negara, khususnya kekayaan negara lain-lain.
8) Perlunya perumusan strategi terkait peran Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam lembaga pengelola dana masyarakat.
9) Perlunya peningkatan sinergi UE I di lingkungan Kemenkeu terkait dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
10) Imbal hasil tinggi SBN relatif tinggi dibandingkan negara-negara *peers.*

5. Birokrasi dan Layanan Publik

a. Potensi

1) Pengelolaan organisasi Kemenkeu yang telah didesain secara modern berlandaskan budaya organisasi yang kuat, antara lain ditandai dengan a) pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel, b) tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi, dan c) reorganisasi yang dilakukan secara terencana.
2) Pengelolaan SDM Kemenkeu yang telah diselaraskan dengan ekosistem kerja baru antara lain melalui a) penyelarasan kebijakan pengelolaan ASN dengan regulasi di level nasional, b) pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional, dan c) implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.
3) Tersedianya berbagai program dan fasilitas pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM keuangan negara yang didukung dengan kemitraan strategis, antara lain melalui a) penerapan Kemenkeu *Corpu*, b) implementasi model pembelajaran yang terintegrasi, c) optimalisasi TIK dalam

pembelajaran dan program akreditasi, d) pengelolaan *knowledge management* terintegrasi, e) penguatan kerjasama di bidang pengembangan SDM, dan f) pembinaan jabatan fungsional melalui akreditasi dan peningkatan kompetensi.

4) Transformasi digital yang inklusif dan berdampak sehingga TIK mampu berperan tidak saja sebagai pendukung namun menjadi *enabler* proses bisnis organisasi, yang ditandai diantaranya dengan a) pengembangan berbagai *project* strategis TIK dan b) peningkatan pelayanan berbasis IT.
5) Implementasi pola pengawasan internal yang secara efektif mampu menjaga integritas organisasi antara lain melalui a) penguatan implementasi 3 *lines of defences*, b) pelaksanaan investigasi secara kuat, c) penjagaan integritas secara berkelanjutan, serta d) penerapan asuransi dan konsultansi yang bernilai tambah dan *combined assurance* yang efektif.

b. Permasalahan

1) Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja keuangan negara yang optimal, antara lain ditandai dengan a) respon atas perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, b) masih maraknya penipuan yang mengatasnamakan instansi, c) perlunya optimalisasi pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kebijakan nasional/kementerian untuk mendukung program strategis pemerintah, d) kebutuhan utilisasi IT untuk pelayanan publik yang masih dapat ditingkatkan, e) kebutuhan optimalisasi cakupan pembelajaran, akreditasi program dan sertifikasi/uji kompetensi di bidang keuangan negara serta f) kebutuhan penguatan implementasi tridharma perguruan tinggi.
2) Alokasi dan distribusi sumber daya yang belum optimal, antara lain ditandai dengan a) keterbatasan aset untuk pemenuhan operasional kantor (termasuk kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan *green economy* dalam pemenuhan sarana prasarana), b) pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang belum harmonis dengan pelaksanaan anggaran, c) kebutuhan pengadaan SDM dengan kualifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan dari unit eselon I tertentu, dan d) kebijakan organisasi sebagai respon atas pemindahan ke IKN.
3) Kebutuhan penguatan integritas organisasi, yang antara lain ditandai dengan a) risiko pelaksanaan pekerjaan di Kemenkeu, b) belum seluruh satker memperoleh predikat ZI WBK-WBBM, c) upaya mempertahankan keberlanjutan unit yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM; d) masih adanya beberapa kasus pelanggaran integritas; dan e) adanya ketidakpatuhan serta potensi risiko khususnya pada instansi vertikal.
4) Kebutuhan pengembangan SDM secara cepat dan tepat untuk merespon tuntutan perkembangan lingkungan yang dinamis, antara lain ditandai oleh a) perlunya optimalisasi kegiatan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, b) perlunya penguatan kemitraan strategis, c) kebutuhan pemenuhan jumlah pengajar, d) perlunya *upgrading* kemampuan Widyaiswara secara berkala, e) perlunya peningkatan komitmen pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran dari seluruh unit eselon 1, dan f) kebutuhan perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan minat pegawai pada jabatan yang berisiko tinggi.

6. Pengelolaan Tugas Khusus

a. Potensi

1) Pengelolaan dana telah dilakukan secara optimal dan *prudent* melalui berbagai instrumen investasi yang menguntungkan.
2) Kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholders* telah dilaksanakan dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
3) Perluasan dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat kepada *stakeholders.*
4) Utilisasi teknologi informasi telah dimaksimalkan dalam rangka memudahkan pelayanan kepada penerima manfaat, baik eksternal maupun internal.
5) Permintaan terhadap lulusan PKN STAN dari berbagai KL maupun Pemda semakin tinggi selaras dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

b. Permasalahan

1) Masih adanya hambatan dari sisi regulasi yang mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya peraturan terkait dengan investasi pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung diversifikasi dan percepatan investasi.
2) Distribusi penerima manfaat dari dana kelolaan belum merata, misalnya penyaluran pembiayaan UMi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
3) Persepsi publik dan reputasi pemerintah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan *special mission*, misalnya masih kuatnya pandangan negatif terhadap minyak sawit yang dianggap berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, serta adanya kasus korupsi yang menurunkan tingkat kepercayaan negara donor.
4) Faktor eksternal juga berpengaruh, seperti masih terbatasnya *ownership* dan *engagement stakeholders* kerja sama pembangunan internasional, serta kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

2.1 VISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Visi Kemenkeu Tahun 2025-2029 adalah VISI: "**Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".**

2.2 MISI KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk mencapai Visi Kemenkeu, dicapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.
2. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam rangka mewujudkan Kemenkeu sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, tepercaya, dihormati, telah dirumuskan nilai-nilai Kemenkeu. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

   Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

   a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
   b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

   Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi
   Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

   a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
   b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan
   Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

   a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
   b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan
   Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

   a. Melakukan perbaikan terus menerus;
   b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.3 TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kemenkeu melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio defisit APBN terhadap PDB.
2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB.
3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara.

4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB.
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kemenkeu, telah ditetapkan enam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kemenkeu selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil.
2. Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal.
3. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif.
5. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil	Ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi geopolitik	a. Penguatan tata kelola fiskal dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi;	DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJA, DJPPR, DJPK
			b. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama keuangan internasional.	DJSEF, DJSPSK, DJBC
		Tren perubahan iklim semakin meningkat	a. Implementasi ekonomi hijau; b. Implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.	DJSEF, DJSPSK, DJA

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		Literasi sektor keuangan yang masih rendah	Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan.	DJSPSK, DJPPR
2.	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal	Administrasi dan proses bisnis penerimaan negara yang belum optimal	Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
		Masih rendahnya kepatuhan *stakeholder* terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan negara	Optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
		Dampak perubahan ekonomi makro terhadap penurunan penerimaan negara	a. Transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara; b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara.	DJP, DJBC, DJA, LNSW
3.	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas	Sinkronisasi Belanja K/L dan Transfer ke daerah masih belum optimal dilaksanakan	a. Konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah, dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi; b. Standardisasi dan pemutakhiran sinergi Bagan Akun Standar (BAS) antara pemerintah pusat dan daerah.	DJA, DJPK
		Belanja K/L dan Transfer ke daerah belum sepenuhnya	a. Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based*	DJA, DJPK

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		efektif dan efisien	*budgeting*, dan monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan penganggaran; b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi.	
4.	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif	Kualitas pelaksanaan anggaran K/L belum optimal	a. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi b. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	DJPb
		Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah atau memberikan manfaat ekonomi	a. Identifikasi dan evaluasi BMN *underutilized;* b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	DJKN
		Terjadinya *excess cash* yang meningkatkan *Cost of Fund*	Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*	DJPPR, DJPb
		Terbatasnya sumber pembiayaan APBN untuk mendanai	Pengembangan dan Implementasi skema pembiayaan kreatif (non-APBN)	DJPPR

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		pembangunan nasional		
5.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.	Tuntutan publik yang semakin besar atas pelayanan publik yang handal dan kinerja keuangan negara yang optimal.	a. Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi; b. Penguatan *integrated core system* Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu (kecerdasan buatan, *Single Profile*, dan *Customer Relationship Management* yang berkualitas).	Setjen, BaTii
		Pengelolaan sumber daya organisasi belum optimal	a. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi. b. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penataan Postur SDM, dan kompetensi SDM. c. Optimalisasi pola kerja baru yang didukung *office automation* sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi. d. *Reengineering* proses bisnis Pengelolaan BMN,	Setjen, BPPK

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
			menuju konsolidasi dan optimalisasi aset bersama. e. Penguatan kualitas belanja mencakup pengendalian belanja birokrasi	
		Penguatan integritas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan belum terintegrasi	a. Penguatan integritas dalam memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu; b. Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi.	Itjen
6	Pencapaian tugas khusus yang efektif	BLU di lingkungan Kemenkeu belum optimal dalam pelaksanaan mandat	a. Pemanfaatan peluang investasi secara maksimal dan bauran investasi yang lebih baik. b. Perluasan penyaluran dana kelolaan dan akses manfaat sesuai mandat BLU.	BLU Kemenkeu

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dimaksud, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dimaksud dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Sebagai penjabaran dari Tahap 1 RPJPN 2025-2045, dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional, yaitu (1) Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; (2) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (3) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*. Keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran pembangunan tersebut diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan indikator:
   1) Penumbuhan ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029).
   2) GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029).
   3) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1%(2029).
   4) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029).

b. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan indikator *Global Power Index* yang meningkat, dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029).
c. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan indikator:
   1) Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8,0% (2025) dan 4,5-5,0% (2029), serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026).
   2) Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029).
   3) Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029).
d. Daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029).
e. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan indikator:
   1) Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029).
   2) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Sasaran pembangunan nasional dimaksud akan dicapai melalui pemadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN 2025-2045, strategi pembangunan kewilayahan, serta tata kelola pelaksanaan pembangunan. Pemadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN menghasilkan arah pembangunan dan Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun strategi kewilayahan merupakan upaya dalam menyatukan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu.

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi prioritas pembangunan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Beberapa strategi yang dilaksanakan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja, serta memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Melalui sinergi dari empat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkesinambungan.

Adapun strategi pembangunan manusia bertumpu pada (1) pemenuhan layanan dasar (antara lain pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial), (2) pembangunan modal manusia (antara lain pendidikan serta pembudayaan dan prestasi olahraga), serta (3)

pembangunan modal sosial budaya (antara lain agama dan budaya). Di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Sedangkan intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas.

Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Delapan strategi dimaksud adalah (1) Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, (2) Industrialisasi/hilirisasi, (3) Pariwisata dan ekonomi kreatif, (4) Ekonomi biru dan ekonomi hijau, (5) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, (6) Transformasi digital, (7) Investasi, dan (8) Belanja negara untuk produktivitas.

Sebagai langkah konkret untuk mencapai target sasaran pembangunan dan strategi prioritas pembangunan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan dimaksud merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Sebagai pengelola fiskal, Kemenkeu memiliki peran strategis dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara, yaitu (1) Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan; dan (2) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029

Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden merupakan inti dari RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Visi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi dimaksud akan dicapai melalui Delapan Misi Presiden (Asta Cita), yaitu:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita juga sebagai Prioritas Pembangunan Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis, untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

3. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% sampai dengan 8,0% dengan dilandasi stabilitas ekonomi makro yang kuat. Untuk mencapai sasaran ekonomi makro jangka menengah, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru dan inovatif, memperkuat peran kelas menengah, perkuatan peran sektor eksternal, penerapan kebijakan fiskal yang adaptif, stabilitas moneter sebagai *enabler* transformasi, serta pemerataan ekonomi di setiap wilayah.

Penguatan fondasi ekonomi melalui penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru dan inovatif di sektor produktif, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperluas kelas menengah. Penguatan kelas menengah menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mewujudkan status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah melalui belanja pusat dan transfer ke daerah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, seiring dengan penerapan kebijakan fiskal yang adaptif.

Transformasi ekonomi juga akan dipacu melalui pengembangan sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi, antara lain hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor manufaktur, digitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan. Investasi ditetapkan sebagai motor utama pertumbuhan yang didukung oleh perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan regulasi. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah diprioritaskan untuk mendukung efisiensi logistik dan distribusi barang dan jasa, serta mendorong perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor guna meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural, meningkatkan pendapatan dan belanja negara secara terukur (pro-*growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang sehat (pro-*stability* dan *fiscal sustainability*). Di sisi lain, kebijakan moneter akan difokuskan pada stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai *enabler* transformasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Program pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui dukungan modal usaha dan peningkatan akses ke lapangan pekerjaan. Dalam jangka menengah, Pemerintah menetapkan target optimis terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta penurunan rasio gini.

Untuk mendukung akselerasi ekonomi dan kesejahteraan, Pemerintah menyusun strategi ekonomi dan fiskal jangka menengah, yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Strategi ini difokuskan pada: (i) ketahanan pangan, (ii) ketahanan energi, (iii) efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG), (iv) pendidikan bermutu, (v) kesehatan berkualitas, (vi) pembangunan desa, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan UMKM, (vii) penguatan pertahanan semesta, serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Selanjutnya, kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Dan pada akhirnya, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi lebih maju, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah.

Akhirnya, dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi yang lebih maju, pembangunan koridor kewilayahan akan dilakukan dengan memerhatikan karakteristik masing-masing daerah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah dinamika global.

4. Peran Sentral Kementerian Keuangan dalam *Strategic Diamond*

Untuk mewujudkan visi misi Asta Cita Presiden periode 2025-2029, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut organisasi kementerian negara yang mampu memenuhi penguatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintahan. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan kepada 4 (empat) K/L, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk secara bersama-sama melaksanakan/memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan (*Strategic*

Diamond). Konsep *Strategic diamond* ini merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dengan tujuan utama untuk mencari pola yang ideal dan cara yang paling singkat untuk mencapai visi dan misi Presiden, dimana empat K/L yang menjalankan peran sebagai *strategic diamond* bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu cerminan peran penting Menkeu sebagai bagian dari *strategic diamond* adalah fungsi alokasi dalam konteks penyusunan APBN, yaitu bagaimana anggaran negara diperoleh dan digunakan untuk mengarahkan sumber daya pada berbagai sektor, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. APBN sebagai *tools* mencapai visi misi Presiden selama ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, misalnya belum optimalnya keterkaitan langsung antara Program dan Kegiatan K/L dengan visi dan misi Presiden, masih dominannya pendekatan sektoral dibanding pendekatan tematik lintas sektor, serta masih terdapat inefisiensi dalam alokasi anggaran. Kondisi dan dinamika tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Kemenkeu sebagai bagian dari institusi kunci s*trategic diamond* dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja.

5. Dukungan Kementerian Keuangan dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Kemenkeu mendukung pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Adapun rincian keterlibatan Kemenkeu pada seluruh Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kemenkeu melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 1, melalui arah kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional; Penguatan Komunikasi Publik dan Media; serta Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
2) Arah kebijakan penguatan komunikasi publik dan media dilaksanakan melalui penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
3) Arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM dilaksanakan melalui strategi internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender.

b. Prioritas Nasional 2: "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 2 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional Swasembada Energi; Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi Syariah; Pengelolaan Hutan Lestari; Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi; serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui strategi penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.
2) Arah kebijakan Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi proses aksesi Indonesia ke OECD.
3) Arah kebijakan penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui strategi penguatan dana sosial syariah.
4) Arah kebijakan pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui strategi peningkatan fungsi sosial kawasan hutan.
5) Arah kebijakan keamanan laut dan hidro-oseanografi dilaksanakan melalui strategi kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*.
6) Arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati.
7) Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi penguatan cadangan pangan.
8) Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan melalui strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

c. Prioritas Nasional 3: “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 3 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, serta Pendalaman Sektor Keuangan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif.
2) Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui strategi penguatan peran sektor keuangan nonbank.

d. Prioritas Nasional 4: "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas".

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 4 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, serta Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM).

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dilaksanakan melalui strategi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
2) Arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola dilaksanakan melalui strategi produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan.
3) Arah kebijakan penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) dilaksanakan melalui strategi peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi.
4) Arah kebijakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi pencegahan dan penurunan *stunting*.

e. Prioritas Nasional 5: "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri".

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 5 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi *Backbone* Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional; Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global; serta Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dilaksanakan melalui strategi peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle* (EV); dan peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.
2) Arah kebijakan peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dilakukan melalui strategi peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global.
3) Arah kebijakan optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan Sistem Logistik Nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

   Pada prioritas nasional ini, Kemenkeu berkontribusi dalam pencapaian indikator RPJMN 2025-2029 yaitu:

Tabel 3.1

Target Indokator Waktu Penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Waktu Penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor	2,90-2,85 hari	2,66-2,60 hari

f. Prioritas Nasional 6: "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan".

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 6 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan perlindungan sosial adaptif dan inklusif dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan.
2) Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.

g. Prioritas Nasional 7: "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan".

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-2029. Salah satu sasaran dalam Prioritas Nasional 7 adalah tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Sasaran dimaksud diukur dengan indikator kinerja tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Target Indikator Sasaran Strategis Pendapatan Negara Yang Optimal

No.	Indikator	Target 2025	Target 2029
1	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	12,86% – 18,00%
2	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,24%	11,52% - 15,00%
3	Rasio PNBP (Persen PDB)	2,11%	1,33% - 2,99%
4	lndeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	86	88
5	Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	(2,53)%	(2,24)% - (2,50)%
6	Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal	39,43%	38,55% - 38,64%

Kemenkeu dalam Prioritas Nasional (PN) 7 diamanatkan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Optimalisasi Pendapatan Negara, Optimalisasi Belanja Negara, Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan, serta Pengendalian Inflasi.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (1) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (2) intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2) Arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD.

3) Arah kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui strategi optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal dan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pembiayaan nonutang yang inovatif.
4) Arah kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

h. Prioritas Nasional 8: "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur".

Kemenkeu melaksanakan beberapa kegiatan yang mencerminkan implementasi dari Prioritas Nasional (PN) 8, melalui arah kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa; dan Pembangunan Berketahanan Iklim.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
2) Arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.

6. Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi: (i) gender dan inklusi sosial, (ii) tujuan pembangunan berkelanjutan, (iii) transformasi digital, (iv) pembangunan rendah karbon, dan (v) pembangunan berketahanan iklim.

Kementerian Keuangan berkomitmen mengintegrasikan lima pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

a. Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki,

pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada Kemenkeu ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan melalui pengelolaan APBN yang responsif gender dan inklusif, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1) Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial Kemenkeu antara lain melalui (1) penguatan regulasi, (2) penguatan komitmen, (3) peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial dan (4) peningkatan kualitas data dan analisis gender.
2) Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (2) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (3) Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.
3) Meningkatkan kualitas penganggaran pemerintah pusat, serta Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan HKPD, (2) peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran pemerintah pusat dan daerah.
4) Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui (1) pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan Keuangan dan Kekayaan Negara yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis Kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, (2) pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (2) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan rencana aksi nasional dan daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian tarqet SDGs; dan (5) lnklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1) Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat antara lain melalui (1) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, (2) mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan fasilitasi kredit ultra mikro, (3) meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat, (4) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat, dan (5) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup antara lain melalui (1) mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, (2) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (3) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi, (4) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana, (5) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon, (6) menerapkan prinsip 5R (r*euse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya, (7) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar dengan kebijakan transfer TKD berbasis pemenuhan pelayanan dasar, dan (8) menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi.
3) Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya antara lain melalui (1) melarang penggunaan botol plastik dan kantong plastik pada kegiatan, event, maupun rapat-rapat di lingkungan Kemenkeu, dan (2) efisiensi penggunaan listrik dan air pada kantor-kantor di lingkungan Kemenkeu.

c. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian melalui Penyempurnaan Tata Kelola yang Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika Perkembangan Teknologi, Peningkatan kualitas layanan digital yang andal, berkualitas, dan inklusif, Penguatan pusat data dan infrastruktur TIK, Peningkatan kualitas SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif, Penguatan keamanan informasi dan Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data.

d. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan; (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan; (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Implementasi Pembangunan Rendah Karbon pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan dan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)/*carbon pricing*. NEK adalah pemberian harga terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. NEK menjadi intervensi kebijakan yang mencerminkan terjadinya *market failure* atas eksternalitas yang ditimbulkan dengan memanfaatkan kekuatan pasar. NEK juga dimaksudkan sebagai praktik dari *polluters pay principle*, serta menjadi sumber alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah.

2) Peningkatan akses pembiayaan perubahan iklim dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) *Mitigation Roadmap*, sektor energi membutuhkan porsi pendanaan terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) di 2060 atau dipercepat, Indonesia menyusun peta jalan menuju transisi energi bersih dan mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.

e. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; serta (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim pada Kemenkeu dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan Anggaran Perubahan Iklim *Climate Budget Tagging* (CBT).
   Dalam rangka mengukur dan mengoptimalkan dukungan APBN terhadap penanganan perubahan iklim, Kemenkeu melakukan kegiatan penandaan CBT. Setiap tahun kegiatan ini menghasilkan laporan sebagai bentuk transparansi publik dan akuntabilitas pengelolaan APBN dalam mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan Kementerian/Lembaga. CBT juga dilaksanakan dalam lingkup pemerintah daerah melalui RCBT yang mencakup seluruh pemerintah provinsi, seiring dengan proses pengembangan sistem *auto-tagging*.
2) Pengembangan instrumen pembiayaan kreatif berbasis lingkungan. Besarnya kebutuhan pembiayaan perubahan iklim mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi APBN dan memobilisasi dana dari berbagai sumber selain APBN, meliputi pendanaan domestik lainnya yang bersumber selain dari APBN, maupun sumber pendanaan internasional lainnya baik yang berasal dari negara lain, swasta, filantropi, organisasi internasional serta mitra potensial lainnya.
3) Tata kelola implementasi *Pooling Fund* Bencana.

Pooling Fund Bencana (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Terdapat 5 (lima) tujuan Kemenkeu periode tahun 2025-2029, yaitu (1) Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi; (2) Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; (3) Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat; (4) Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; dan (5) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Adapun rincian strategi Kemenkeu dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2025-2029 serta tujuan Kemenkeu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi**

   Dalam RPJMN 2025-2029, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,0 persen pada tahun 2029 yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu hal yang menjadi isu adalah kompleksitas tantangan kebijakan fiskal dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai instrumen utama dalam melaksanakan transformasi ekonomi. Pendalaman sektor keuangan dan peningkatan literasi masyarakat di bidang keuangan dibutuhkan dalam rangka merangsang kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dibutuhkan untuk memelihara hubungan internasional agar tetap kondusif dan menjaga kepentingan nasional. Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk

turut menurunkan emisi gas rumah kaca juga terus diwujudkan dengan langkah nyata.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil. Pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi *(pro-growth*), menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas *(pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal *(fiscal sustainability*). Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Arah kebijakan tata kelola fiskal dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi:
   1) Penyusunan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang (*long term fiscal sustainability*) dalam periode 30 tahun ke depan.
   2) Penyusunan kajian perkiraan anggaran dalam bentuk neraca pada Nota Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi *International Budget Partnership*.
   3) Optimalisasi proses bisnis pengelolaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah melalui revisi kebijakan tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
   4) Penguatan kebijakan fiskal yang mendorong hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA).

b. Arah kebijakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah dilaksanakan melalui strategi:
   1) Penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
   2) Penyelarasan kebijakan fiskal dan target nasional dengan kebijakan anggaran daerah.
   3) Peningkatan sinergi Bagan Akun Standar (BAS) Pusat dan Daerah.

c. Arah kebijakan pengembangan dan pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui strategi:
   1) Penguatan peran perbankan yang difokuskan pada pengembangan berbagai aspek, mulai dari struktur, efisiensi *(cost of fund*), keberagaman produk, jangkauan penyaluran kredit, cakupan aktivitas usaha hingga pemanfaatan teknologi, termasuk penguatan kerangka regulasi.
   2) Penguatan sektor keuangan nonbank melalui optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun, dan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang, termasuk penguatan kerangka regulasi.
   3) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung oleh edukasi dan sosialisasi produk keuangan, termasuk penguatan kerangka regulasi.
   4) Percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah pada sektor perbankan dan sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal), serta penguatan kerangka regulasi.
   5) Peningkatan peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi.

6) Penguatan stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi antarlembaga, penyelenggaraan simulasi krisis, dan penguatan protokol manajemen krisis.
7) Penguatan peran pembinaan dan pengawasan profesi keuangan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme profesi keuangan, transformasi layanan digital, serta penyusunan kebijakan yang responsif.
8) Penguatan ekosistem profesi keuangan dalam kerangka ekosistem sektor keuangan.

d. Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional dilaksanakan melalui strategi:
   1) Optimalisasi kerja sama internasional melalui rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk penguatan agenda prioritas termasuk diversifikasi kerja sama ekonomi dan investasi, pendanaan inovatif dan penguatan sektor prioritas.
   2) Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerja sama kepabeanan internasional.

e. Arah kebijakan pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan dilaksanakan melalui strategi:
   1) Memberikan insentif perpajakan guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
   2) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kemenkeu atau dengan K/L lainnya.
   3) Pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan
   4) Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pembangunan dan pengembangan industri sebagai langkah percepatan hilirisasi industri nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, dan sebagainya.

f. Arah kebijakan implementasi ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi:
   a. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan kerja sama dengan negara lain/lembaga/forum internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang *robust*, berkelanjutan dan inklusif.
   b. Implementasi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas, efek rumah kaca serta mendorong transisi ke ekonomi berkelanjutan.
   c. Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon melalui upaya diantaranya, mendorong pengembangan industri berbasis baterai (elektronik dan otomotif), meningkatkan EBT dalam bauran energi nasional, mendorong pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk investasi teknologi rendah karbon.

g. Arah kebijakan penguatan sinergi pengelolaan risiko fiskal daerah dilaksanakan melalui strategi:
   1) Sinkronisasi kerangka pemantauan risiko fiskal daerah dengan risiko AKN (APBN, Kontijensi dan Neraca).
   2) Evaluasi sistem manajemen risiko fiskal daerah, terutama yang berdampak kepada keuangan negara.
   3) Penyusunan *grand design* dan *Dashboard* Risiko Fiskal Daerah (DARA) untuk mendukung pengelolaan risiko fiskal daerah.

4) Penguatan *Regional Chief Economist* (RCE) dalam identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah yang berdampak ke APBN.

2. Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional

Pendapatan negara merupakan sumber pendanaan utama dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu besar dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional adalah rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup administrasi *gap* maupun *policy gap* dalam menghimpun pendapatan negara.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang maksimal. Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi perpajakan maupun PNBP. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Arah kebijakan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi:
   1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.
   2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.
   3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
   4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.
   5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
   6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).
   7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

b. Arah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
   1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.
   2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui *single profile* Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
   3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.
   4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

c. Arah kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:
   1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko

antara lain melalui *Big Data/Advanced Analytics* dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (*Intelligence-Led Compliance*).

2) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara
3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.
4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.
5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan dan piutang PNBP, termasuk melalui optimalisasi implementasi *Automatic Blocking*.
6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara.

3. Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat

Dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan belanja negara diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu hal yang menjadi isu adalah tingkat efektivitas dan efisiensi belanja masih rendah. Oleh karena itu, optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Arah kebijakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui strategi:
   1) Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja pemerintah pusat dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
   2) Penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
   3) Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi *new thinking of working*, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar-*stakeholder* terkait dengan tetap menjaga aspek *good governance*.
   4) Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang berkeadilan, tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah.
   5) Peningkatan kualitas proses penganggaran melalui monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan *reward and punishment*.
   6) Sinergi BAS Kinerja yang meliputi standardisasi referensi antara pemerintah pusat dengan daerah serta penyusunan tata kelola standardisasi dan pemutakhiran sinergi BAS antara pemerintah pusat dan daerah.

7) Pengalokasian anggaran untuk pendanaan prioritas pembangunan antara lain: Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.

b. Arah kebijakan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah dilaksanakan melalui strategi:
   1) Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, transfer ke daerah, dan belanja daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
   2) Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
   3) Peningkatan edukasi terkait kebijakan insentif fiskal kepada pemerintah daerah.
   4) Optimalisasi interkoneksi pelaporan penerimaan perpajakan daerah yang dilakukan secara *real-time* dalam rangka percepatan dan kepatuhan pelaporan.
   5) Penguatan pertukaran dan konsolidasi basis data perpajakan daerah, serta pengawasan wajib pajak bersama untuk mendorong penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah.
   6) Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui *Diagnostic Tools* terintegrasi SIKD secara berkesinambungan.
   7) Sinkronisasi kebijakan sektoral terkait PDRD untuk kepastian hukum pemungutan, mencegah pajak berganda, dan memastikan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
   8) Penguatan pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi atas Kebijakan Opsen Pajak dan *Earmarking* dalam belanja APBD yang bersumber dari pajak daerah.
   9) Diseminasi kebijakan PDRD dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan PDRD di daerah.
   10) *Revisit* UU HKPD terkait dengan kebijakan PDRD.

4. Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik

Penggunaan APBN yang tepat sasaran dan produktif akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu besar dalam pelaksanaan APBN dari sisi belanja dan pembiayaan adalah kualitas dan *size* belanja yang belum optimal serta belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan nonutang untuk mendorong sasaran pembangunan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Arah kebijakan Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan dilakukan melalui strategi:
   1) Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara dan lelang melalui penyelesaian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilai dan RUU Perlelangan
   2) Penyusunan *Roadmap* R&D penilaian yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan berkelanjutan.
   3) Penguatan pengelolaan pinjaman dalam kerangka pembiayaan yang terkendali untuk proyek strategis pemerintah.
   4) Optimalisasi Forum Kerjasama Perbendaharaan di regional Asia Tenggara (*ASEAN Treasury Forum*/ATF) dan kerjasama bilateral/multilateral dengan negara/institusi keuangan internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan.
   5) Perbaikan dan interkoneksi antarsistem sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan belanja pemerintah pusat antara Kemenkeu dan K/L terkait.
   6) Pengembangan sistem informasi guna mendukung penyaluran belanja TKD.
   7) Penguatan peran Kemenkeu melalui penajaman fungsi *treasury*, pelaksanaan analisis ekonomi dan fiskal regional, serta *financial advisor* dalam mendukung peningkatan tata kelola keuangan daerah.
   8) Penyempurnaan dan simplikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang terintegrasi dan digitalisasi sistem perbendaharaan serta pengelolaan pertanggungjawaban bendahara.
   9) Integrasi Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Kinerja Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung capaian visi pemerintah.
   10) Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk mewujudkan *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
   11) Implementasi sistem informasi untuk mewujudkan satu data nilai properti, bisnis, dan sumber daya alam nasional yang transparan, akurat, dan terintegrasi.
   12) Implementasi digitalisasi pelayanan lelang melalui Aplikasi Lelang yang berkelanjutan.

b. Arah kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern, dilakukan melalui strategi:
   1) Optimalisasi pengelolaan likuiditas pemerintah dengan fokus integrasi antara *cash management* dan *debt management*.
   2) Penguatan sinergi dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
   3) Penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk mendukung program strategis Presiden.
   4) Optimalisasi pengelolaan piutang negara pada K/L yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
   5) Penguatan sinergi dalam rangka pengurusan piutang negara melalui tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik terhadap penanggung utang dan pihak terkait.
   6) Penguatan dan simplifikasi kerangka investasi pemerintah permanen dan nonpermanen.
   7) Pengukuran efektivitas investasi pemerintah berdasarkan skema yang kredibel dan akuntabel.

c. Arah kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Kreatif dan Pengelolaan Risiko yang *Prudent*, dilakukan melalui strategi:
   1) Pengembangan dan implementasi skema *blended financing* yang optimal untuk proyek pembangunan infrastruktur.
   2) Sinkronisasi penyediaan sumber pembiayaan (pinjaman dan SBSN Proyek), investasi dan dukungan terhadap BUMN serta SMV, serta penguatan dukungan APBN terhadap proyek KPBU.
   3) Penjaminan pemerintah yang mendukung pembiayaan kreatif untuk mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat strategis termasuk pengelolaan sampah.
   4) Penguatan pemanfaatan BMN melalui dukungan fasilitas dan pengembangan pembiayaan kreatif.
   5) Penyempurnaan strategi komunikasi *Investor Relation Unit* (IRU) dalam rangka perluasan basis investor.
   6) Penguatan sistem keuangan domestik dan pasar lokal dalam memobilisasi sumber pendanaan dalam dan luar negeri.
   7) Penguatan fasilitas penyiapan proyek/*project development facility* dalam proses penyiapan, pengadaan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyediaan proyek infrastruktur.
   8) Penguatan implementasi dan penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko APBN, kewajiban kontinjensi dan neraca konsolidasi sektor publik.

5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Transformasi sektor publik yang bertumpu pada percepatan reformasi birokrasi transformasi digital, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel merupakan pengungkit utama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu terkait transformasi sektor publik yang perlu memperoleh perhatian antara lain keterpaduan layanan publik belum optimal, akses pelayanan publik belum memadai, penerapan sistem merit belum optimal, serta proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi/tidak efektif.

Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi Kemenkeu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor publik pada level nasional melalui upaya mengembangkan birokrasi yang efisien, produktif, dan melayani, memperkuat karakter SDM, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas digitalisasi layanan keuangan negara, dan modernisasi infrastruktur layanan pada kantor layanan. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah: (1) birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas, dan (2) pencapaian tugas khusus yang efektif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Arah kebijakan penguatan budaya dijabarkan melalui strategi:
   1) Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, *leadership*, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai.
   2) Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko.

3) Penguatan integritas dalam upaya memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu.
4) Optimalisasi pola kerja baru yang didukung *office automation* sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi.
5) *Reengineering* proses bisnis pengelolaan BMN, menuju konsolidasi dan optimalisasi aset bersama.
6) Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek *well-being*, kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun.

b. Arah kebijakan transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian *intern* dijabarkan melalui strategi:
1) Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi.
2) Transformasi proses bisnis yang adaptif.
3) Simplifikasi dan redesain EA dalam Sistem Informasi Kemenkeu guna mempercepat *reengineering* proses bisnis utama Kemenkeu.
4) Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
5) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk *talent* digital), redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.
6) Peningkatan kualitas implementasi Kemenkeu *Corporate University* untuk mewujudkan *learning organization* yang matang.
7) Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas *talent*.
8) Penyelenggaraan akreditasi program pelatihan, sertifikasi, dan/atau uji kompetensi di bidang keuangan.
9) Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi.

c. Arah kebijakan modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja dijabarkan melalui strategi:
1) Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*).
2) Penguatan *integrated core system* Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu (kecerdasan buatan, *Single Profile*, dan *Customer Relationship Management* yang berkualitas).
3) Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi, ditandai dengan disusunnya Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu Tahun 2025-2029.
4) Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making*, *alert*, dan *early warning*.
5) Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.

6) Penyiapan dan mitigasi kepindahan ke IKN antara lain pada aspek pengadaan kantor dan hunian pegawai serta mekanisme kerja baru IKN dan Jakarta.
7) Perluasan pola kerja kolaboratif berbasis proyek (termasuk *squad team*); dan percepatan ekosistem JF (standardisasi kompetensi, manajemen karier, kinerja, *probation*, dan sistem kerja).
8) Simplifikasi dan digitalisasi regulasi yang mudah diakses publik, serta penguatan perlindungan hukum bagi institusi dan ASN.

d. Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan publik dijabarkan melalui strategi:
1) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
2) Konsolidasi layanan eksternal dan internal Kemenkeu pada unit vertikal.
3) Pengembangan dan perluasan implementasi *shared service* Kemenkeu.
4) Penguatan strategi komunikasi internal maupun eksternal.
5) Penguatan dukungan pengambilan kebijakan yang optimal di bidang perekonomian dan pengawasan perpajakan.
6) Optimalisasi SINSW dalam fasilitasi implementasi *digital economy* terkait dengan *paperless trade* dan *cross-border paperless trade*.

Kemenkeu juga melaksanakan mandat tugas khusus (*special mission*) dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan RPJMN 2025-2029 antara lain penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang tepat sasaran; perluasan akses dan inovasi pembiayaan; serta perluasan pemanfaatan *biofuel*. Strategi yang dilakukan Kemenkeu dalam pelaksanaan mandat tugas khusus adalah sebagai berikut:
1) Pemanfaatan peluang investasi dengan maksimal dan bauran investasi yang lebih baik.
2) Perluasan akses dan penyaluran dana kelolaan sesuai dengan mandat dalam pembentukan masing-masing Badan Layanan Umum (BLU).
3) Penguatan pengelolaan aset dan dana jangka panjang yang berkesinambungan oleh LMAN.
4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara yang bereputasi unggul dan bertaraf internasional.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2025-2029 Kemenkeu memiliki lima program yang terdiri dari:
1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi;
2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3) Program Pengelolaan Belanja Negara;
4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5) Program Dukungan Manajemen.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas

Kemenkeu yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Rincian Rancangan Undang-Undang bidang tugas Kemenkeu adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi); dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Kerangka Regulasi Kemenkeu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perlelangan.

Urgensi pembentukan:

a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang.
c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum.
d. Digitalisasi proses bisnis dalam era *society* 5.0.
e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum.
f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang.
g. Meminimalisir adanya gugatan.
h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945).

RUU tentang Perlelangan merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Urgensi pembentukan:

a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki undang-undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam.
b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi.
c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah pengembangan energi baru dan terbarukan yang konkret.
d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang Keuangan Negara.
e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi.
f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara.

h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

3. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Urgensi pembentukan:

a. Efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.
b. Menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
c. Menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat.
d. Meningkatkan kredibilitas Rupiah.

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027.

4. RUU tentang Penilai.

Urgensi pembentukan:

a. Mandat Konstitusi.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang misalnya Undang-Undang dibidang sumber daya alam dan atau Undang-Undang (UU) lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU seperti UU Pengadaan tanah, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan lainnya.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistis. Demikian pula dalam Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi.

Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya.

c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksana pelayanan publik (*beesturzorg*) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai *intermediary information provider*, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu *backbone* kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses *Initial Public Offering* (IPO) sampai dengan likuidasi *emiten* (perusahaan).

d. Mewujudkan tata kelola yang baik.

Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *good governance*, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu juga Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Di mana dari profesi tersebut hanya penilailah yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di pasar modal dan perbankan di sektor keuangan yang belum memiliki undang-undang untuk mengatur pengawasan, profesional kerahasiaan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang diisyaratkan.

f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA.

Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya

pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.

RUU tentang Penilai merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Kebijakan Pengelolaan Organisasi

Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan berperan sentral dalam mendukung Presiden menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) selaku Bendahara Umum Negara dan *Chief Operational Officer* (COO) yang memimpin kementerian. Dalam Kabinet Merah Putih, peran Kemenkeu semakin menguat karena berada langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. Dalam hal ini, Kemenkeu bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara merupakan bagian dari "*Strategic Diamond*" yang berperan melakukan koordinasi dengan K/L untuk memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terutama dalam mencapai target penerimaan negara serta dalam menetapkan kebijakan di sektor keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara, strategi dan kebijakan penerimaan negara, serta penguatan dan optimalisasi fungsi sektor keuangan dan kerja sama internasional. Di sisi lain, dinamika geopolitik dan ekosistem keuangan nasional yang memerlukan respon yang cepat, tepat dan akurat, perlu dilakukan penguatan fungsi intelijen keuangan dalam rangka pendeteksian dan peringatan dini, untuk pencegahan, penangkalan, penanggulangan risiko keuangan negara yang didukung dengan integrasi dan interoperabilitas sistem keuangan negara.

Lebih lanjut, pada tahun 2025, Kemenkeu memiliki target organisasi yang cukup ambisius untuk memastikan ketersediaan APBN dalam mendukung program prioritas nasional. Kemenkeu perlu mengoptimalkan pendapatan negara secara berkeadilan. Dari sisi belanja negara, Kemenkeu juga perlu melakukan penajaman *allocative* dan *operational efficiency* agar belanja negara berkualitas.

Dalam memastikan agar Kemenkeu mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, Kemenkeu juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik melalui penguatan kelembagaan dan fungsi di bidang keuangan negara, strategi dan kebijakan penerimaan negara, penguatan dan optimalisasi fungsi sektor keuangan dan kerja sama internasional, serta penguatan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan intelijen keuangan. Di samping itu, Kemenkeu perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu Kemenkeu memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah.

a. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Kemenkeu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenkeu memiliki fungsi:

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan.
2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.
3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian.
5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.
6) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.
7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan.
8) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
9) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

b. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan.

1) Kantor Pusat Kementerian Keuangan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kemenkeu, saat ini telah ditetapkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkeu, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan (saat ini 3 orang), 13 (tiga belas) Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I serta 9 (sembilan) Staf Ahli. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga dapat dibantu oleh Staf Khusus yang berjumlah maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan kebutuhan.

Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I Kemenkeu terdiri atas:

a) Sekretariat Jenderal (Setjen);
b) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF);
c) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
d) Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
e) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
f) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
g) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
h) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

i) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);
j) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK);
k) Inspektorat Jenderal (Itjen);
l) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii); dan
m) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Staf Ahli Kemenkeu terdiri atas:
a) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
b) Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
c) Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
d) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
e) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
f) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
g) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;
h) Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
i) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan.

Selain itu, Kemenkeu juga didukung oleh 1 (satu) Pusat, yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri, serta analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.

Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Setjen sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkeu. Sedangkan masing-masing Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing. Adapun Itjen mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemenkeu. Sedangkan BaTii dan BPPK sebagai unsur pendukung mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan (BaTii) serta melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan (BPPK).

Staf Ahli bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, kepatuhan pajak, pengawasan pajak, kebijakan penerimaan negara, penerimaan negara bukan pajak, pengeluaran negara, ekonomi makro dan keuangan internasional, jasa keuangan dan pasar modal, serta hukum dan hubungan kelembagaan. Selain itu Staf Ahli juga dapat membantu pimpinan unit eselon I/unit noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas Kemenkeu.

Staf Khusus Menteri Keuangan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kemenkeu.

2) Organisasi Yang Diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kemenkeu yang berbentuk Lembaga, Sekretariat, Unit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

a) Lembaga *National Single Window*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ekspor, impor dan logistik berbasis transparan, konsisten, efisien dan simpel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*, telah dibentuk Lembaga *National Single Window* (LNSW) di lingkungan Kemenkeu. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) dan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, LNSW mendapat tugas untuk mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional. Dalam hal ini, Sistem Indonesia *National Single Window* ditetapkan sebagai salah satu sistem elektronik yang digunakan dalam layanan perizinan usaha, khususnya berkaitan dengan neraca komoditas. Untuk mendukung tugas tersebut dan dalam rangka upaya membangun sistem layanan logistik pemerintah yang terintegrasi, struktur organisasi LNSW dilakukan penataan organisasi kembali melalui PMK Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window*.

b) Sekretariat

(1) Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 64 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif.

(2) Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan melalui PMK Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak yang bertugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, Pengadilan Pajak saat ini sedang dalam masa transisi pengalihan ke Mahkamah Agung (MA). Peralihan ini dilakukan untuk memastikan independensi Pengadilan Pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

(3) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 116 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komite Pengawas Perpajakan.

(4) Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditetapkan dalam PMK Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan memberikan dukungan administrasi kepada Pimpinan KNEKS dan anggota KNEKS dalam pelaksanaan tugas KNEKS.

c) Badan Layanan Umum (BLU)

(1) Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan melalui PMK Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah bertugas untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Badan Pengelola Dana Perkebunan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan dana perkebunan.

(3) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui PMK Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bertugas melakukan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

(4) Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditetapkan melalui PMK Nomor 35 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara bertugas melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset.

(5) Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang ditetapkan dalam PMK Nomor 143/PMK.01/019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional bertugas melakukan pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional.

(6) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditetapkan melalui PMK Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan melalui PMK Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Keuangan Negara.

d) BUMN

(1) PT Geo Dipa Energi (Persero) didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi, dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.

(2) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.

(3) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan berdasarkan penugasan pemerintah.

(4) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), didirikan pada tanggal 10 Januari 2010, merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

e) Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kemenkeu merupakan kementerian yang memiliki karakteristik *holding type organization* dengan tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kemenkeu memiliki beberapa instansi vertikal, yang terdiri dari kantor wilayah dan kantor pelayanan, serta unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

(1) DJP, terdiri dari: 34 Kantor Wilayah (Kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (1 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDP), 2 Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), 1 Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP).

(2) DJBC, terdiri dari: 20 Kanwil, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan 9 UPT (6 Pangkalan Sarana Operasi (PSO), 3 Balai Laboratorium).
(3) DJPb, terdiri dari: 34 Kanwil, 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
(4) DJKN, terdiri dari: 17 Kanwil, 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
(5) BPPK, terdiri dari: 11 UPT (11 Balai Diklat Keuangan).
(6) SETJEN, terdiri dari: 5 UPT (5 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN).

Instansi vertikal dan UPT pada prinsipnya merupakan ujung tombak Kemenkeu dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Arah Kebijakan Kelembagaan Kementerian Keuangan 2025-2029

Transformasi kelembagaan melalui pembangunan kelembagaan yang tangguh dan *agile* serta proses bisnis yang adaptif dan kolaboratif, dan penguatan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas merupakan fondasi untuk mendukung peran Kemenkeu dalam mengawal pertumbuhan ekonomi. Transformasi kelembagaan dimaksud akan diimplementasikan melalui arah kebijakan kelembagaan sebagai berikut:

1) Transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis

Seiring dengan penguatan peran Kemenkeu sebagai *Strategic Diamond*, perlu dilakukan pula transformasi proses bisnis Kemenkeu yang akan difokuskan pada digitalisasi layanan internal dan implementasi *shared services* yang terintegrasi didukung Penguatan kapabilitas EA dan AI sebagai pendorong utama untuk mempercepat harmonisasi lintas domain, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkecil silo antarunit. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:

a) Transformasi proses bisnis bidang fiskal dan sektor keuangan, antara lain melalui:
(1) Perubahan proses bisnis dan hubungan koordinasi antarunit pasca-reorganisasi unit baru yang menjalankan fungsi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
(2) Penguatan proses bisnis penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(3) Penguatan proses bisnis dan ekosistem profesi keuangan untuk meningkatkan perlindungan publik maupun konsumen.
(4) Penguatan ekosistem pelaporan keuangan terintegrasi melalui *Financial Report Single Window* (FRSW).

b) Transformasi proses bisnis bidang penerimaan negara, antara lain melalui:
(1) Penguatan proses bisnis intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara (pajak karbon, pajak ekonomi digital, bea masuk/keluar, cukai, dan PNBP)
(2) Perbaikan proses bisnis administrasi dan pengawasan penerimaan negara.
(3) Perbaikan proses bisnis keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa perpajakan.

(4) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
(5) Optimalisasi kegiatan *joint program* penerimaan negara.
(6) Interoperabilitas data untuk meningkatkan penerimaan negara.

c) Transformasi proses bisnis bidang pengeluaran negara, antara lain melalui:
(1) Perbaikan proses bisnis penganggaran melalui penguatan *value for money*, *evidence based budgeting*, serta monitoring dan evaluasi penganggaran.
(2) Penguatan sinergi harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, perencanaan, dan pengukuran kinerja.
(3) Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penyaluran belanja TKD.
(4) Integrasi proses bisnis monitoring dan evaluasi belanja secara *end-to-end* dari level regulator hingga level eksekutor sebagai kerangka penguatan akuntabilitas fiskal.

d) Transformasi proses bisnis bidang perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, antara lain melalui:
(1) Penguatan tata kelola kelembagaan negara yang sejalan dengan prinsip penganggaran yang baik melalui *revisiting* pola pendanaan, proses bisnis, dan kelembagaan dalam UU Keuangan Negara.
(2) Penguatan tata kelola dan layanan di bidang pembiayaan dan risiko.
(3) Simplifikasi proses bisnis perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban anggaran yang terintegrasi melalui interoperabilitas sistem informasi perbendaharaan dengan sistem lainnya.
(4) Simplifikasi, perbaikan tata kelola, dan penyesuaian substansi terkait pembentukan kerangka investasi pemerintah permanen dan nonpermanen.
(5) Penguatan sinergi pengelolaan kas dan utang dalam rangka pengembangan *modern treasury*.

e) Transformasi proses bisnis bidang manajemen birokrasi, antara lain melalui:
(1) Penyusunan *Grand Design Office Automation* dalam mengharmonisasikan layanan dukungan manajemen berbasis digital.
(2) Perluasan implementasi *shared service* (layanan bersama) Kemenkeu.
(3) Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi.
(4) Penguatan strategi komunikasi internal maupun eksternal.
(5) Penguatan proses bisnis legislasi (hukum) dan advokasi melalui simplifikasi regulasi dan digitalisasi layanan, serta perlindungan hukum bagi institusi dan pegawai.
(6) Penguatan implementasi Kemenkeu Corpu melalui pembelajaran terintegrasi yang berdampak tinggi, manajemen pengetahuan yang andal, dan penerapan teknologi digital yang tepat guna.
(7) Penyempurnaan infrastruktur dan tata kelola pengembangan kompetensi di bidang keuangan negara.

(8) Penguatan tata kelola PKN STAN dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(9) Penyesuaian kebijakan organisasi (proses bisnis dan mekanisme kerja) dalam konteks pemindahan IKN.
(10) Transformasi sistem logistik nasional melalu SINSW.
(11) Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem Satu Data Kemenkeu untuk mendukung kebutuhan seluruh UE1, termasuk pembangunan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) mandiri Kementerian Keuangan.

2) Penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi jabatan fungsional untuk membangun ekosistem kerja yang lebih *agile*, responsif, dan fokus pada pelayanan publik

Kemenkeu terus bergerak maju dalam melaksanakan program penyederhanaan birokrasi yang berfokus pada simplifikasi proses bisnis, eselonisasi 2 level/*delayering*, dan optimalisasi jabatan fungsional. *Delayering* dalam konteks organisasi Kemenkeu dilakukan secara *prudent*, bertahap, mempertimbangkan berbagai risiko. *Delayering* tidak dilakukan untuk jabatan-jabatan yang dikecualikan dari *delayering* sesuai PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021, serta kriteria tambahan lainnya (rantai komando, menangani lebih dari 3 sub-sub rumpun, risiko keuangan negara, dll.). Sampai dengan 2024, progres *delayering* Kemenkeu sudah dilaksanakan di 9 unit eselon I yang meliputi Setjen, DJA, DJBC, DJKN, DJPK, DJPPR, Itjen, BKF, BPPK. Terdapat 72,32% jabatan yang telah disederhanakan (dari jabatan yang berpotensi di-*delayering*).

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dilakukan konsolidasi dan penyederhanaan terhadap 23 Jabatan Fungsional binaan Kemenkeu menjadi 4 Jabatan Fungsional, yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Konsolidasi JF tersebut dilakukan dengan pendekatan Kemenkeu selaku *Chief Financial Office* (CFO) dan *Chief Operational Officer* (COO).

Selanjutnya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung implementasi *delayering* dan optimalisasi JF, antara lain:

a) Pelaksanaan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional (*delayering)* melalui evaluasi berkelanjutan serta penyempurnaan terhadap ekosistem dan infrastruktur *delayering* untuk memastikan agar *delayering* dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi.
b) Melanjutkan implementasi *delayering* yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara bertahap, sebagai berikut:
   (1) Tahap I: Unit eselon I yang tidak memiliki instansi vertikal.
   (2) Tahap II: Unit eselon I yang memiliki instansi vertikal.
c) Penguatan fungsi pengelolaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara untuk mendukung pengembangan kompetensi JF.
d) Akselerasi implementasi Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara (JFKN) yang dimulai pada tahun 2024 melalui *piloting*

implementasi JFKN di internal Kemenkeu disertai evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilakukan perluasan implementasi di K/L/Pemda untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas strategis dalam rangka pencapaian target prioritas nasional.

e) Penyempurnaan infrastruktur dan tata kelola JFKN untuk mendukung akselerasi implementasi JF Bidang Keuangan Negara dapat berjalan lebih optimal, melalui:
   (1) Penyelesaian regulasi mengenai tunjangan jabatan bagi JFKN untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai yang ditugaskan sebagai JFKN.
   (2) Pembentukan organisasi profesi JFKN sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga kode etik dan perilaku profesi, memberikan advokasi, serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik.
   (3) Pedoman penyusunan kebutuhan JFKN sebagai acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menghitung dan mengusulkan kebutuhan JFKN yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, serta bagi Kemenkeu dalam menghitung dan mengusulkan kebutuhan JFKN dan JF binaan K/L lain yang digunakan di Kemenkeu.
   (4) Penyusunan *tools* pendukung mekanisme kerja *delayering* dan fungsional, salah satunya modul tim.

3) Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi dengan antarmuka nasional

Arah kelembagaan terkait layanan publik akan menyasar pada otomasi dan integrasi layanan serta memperkuat pemanfaatan aset bersama di daerah sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, responsif, dan andal. Beberapa strategi yang dilakukan adalah:

a) Modernisasi layanan melalui kolaborasi layanan bersama Kemenkeu di wilayah dan harmonisasi dengan kebijakan Mall Pelayanan Publik, *single profile* pengguna layanan, serta Layanan Digital Kemenkeu (LDK) dalam genggaman untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat yang berbasis *user-centric*.
b) Penguatan sinergi antarkantor Kemenkeu maupun instansi lain di daerah melalui Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN), *Regional Chief Economist* (RCE), *joint program*, pembinaan keuangan negara, serta pelaksanaan tugas Kemenkeu lainnya di daerah.
c) Modernisasi penilaian kepuasan pengguna layanan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendengar dan menindaklanjuti keluhan dan masukan dari pengguna layanan.
d) Penguatan kapasitas SDM dan organisasi dalam penyediaan layanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan.

4) Penguatan Budaya Organisasi yang berintegritas dan kolaboratif lintas generasi

Seiring dengan tuntutan masyarakat dan komitmen Kemenkeu untuk menjaga reputasi dan kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenkeu diarahkan untuk mendapat predikat ZI

menuju WBK atau WBBM. Penguatan budaya integritas juga perlu terus diupayakan dengan didukung ekosistem pengawasan yang efektif.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan *gap generation*, menurunkan risiko fragmentasi internal, serta mengakselerasi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi selaras dengan dinamika yang ada, Kemenkeu akan mengembangkan budaya kerja kolaboratif lintas unit serta lintas generasi melalui pengembangan etika digital, budaya belajar, budaya inovasi, dan akselerasi model kepemimpinan berbasis teladan.

Adapun strategi terkait budaya organisasi sebagai berikut:

a) Penguatan tata kelola organisasi berbasis ZI-WBK/WBBM, termasuk di dalamnya melalui penilaian kembali ZI terhadap unit kerja yang mengalami reorganisasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM.
b) Penguatan budaya integritas melalui implementasi pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi, serta pembangunan lingkungan kerja saling jaga, saling peduli, dan sadar risiko.
c) Penguatan budaya belajar Kemenkeu dengan mendorong inisiatif individu dan organisasi untuk terus melakukan pengembangan kompetensi menuju Kemenkeu sebagai *learning organization*.
d) Penguatan budaya kerja untuk mengatasi *gap generation* untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, kolaboratif, dan produktif.
e) Penguatan budaya inovasi melalui implementasi *sandbox.*
f) Penguatan budaya dan etika penggunaan AI untuk memastikan agar pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara bijaksana dengan tetap memerhatikan nilai-nilai etis dan aspek humanis.
g) Transformasi budaya kerja struktural ke fungsional.

5) Penguatan kelembagaan melalui penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika, Kemenkeu perlu melakukan penguatan kelembagaan melalui simplifikasi proses bisnis dan reorganisasi terhadap struktur saat ini, baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun Unit Pelaksana Teknis. Kemenkeu akan memperkuat penataan organisasinya paska PMK Nomor 124 Tahun 2024 melalui penyusunan ulang struktur berbasis peran strategis dalam transformasi ekonomi nasional serta pengelolaan mandat lintas sektor yang lebih efisien, melalui strategi:

a) Penyempurnaan infrastruktur organisasi dan jabatan setelah ditetapkannya PMK Nomor 124 Tahun 2024 untuk memperkuat struktur kelembagaan mulai dari penyesuaian proses bisnis dan mekanisme kerja, infrastruktur jabatan yang meliputi informasi jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, rumpun jabatan, dan peta jabatan, serta pelimpahan wewenang dan korespondensi (penomoran, cap dinas, dan kop surat).

b) Restrukturisasi dan penguatan fungsi pengawasan penerimaan negara untuk mendukung target penerimaan nasional.
   (1) Penataan organisasi pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan melalui klasterisasi struktur dan fungsi menyesuaikan dengan proses bisnis *Coretax*, penguatan fungsi pengawasan yang lebih komprehensif (*tax supervision* dan *tax surveillance*), penguatan *internal control*. Selanjutnya penataan organisasi pada instansi vertikal dilakukan melalui penguatan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar) dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) dalam rangka mendukung pencapaian penerimaan untuk pengawasan Wajib Pajak strategis nasional dan regional.
   (2) Penataan organisasi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan, simplifikasi tipologi kantor wilayah dan kantor pelayanan, serta penambahan kantor pelayanan di beberapa wilayah untuk memenuhi tuntutan dari *stakeholders* DJBC dengan mempertimbangkan profil kerawanan penyelundupan NPP dan barang ilegal, serta perkembangan potensi ekonomi daerah dalam rangka optimalisasi *border protection*.

c) Penguatan kelembagaan untuk mendukung ekosistem penerimaan dan logistik nasional melalui transformasi proses bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan dan penguatan fungsi pengembangan sistem, pengelolaan basis data dan pengelolaan keamanan informasi, serta penguatan fungsi dukungan manajemen.

d) Penguatan peran kantor Kemenkeu di wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kemenkeu di daerah serta memperkuat peran Kemenkeu sebagai pengelola fiskal negara di tingkat regional. Kantor Kemenkeu di wilayah dirancang untuk lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik serta tantangan fiskal daerah. Struktur organisasi disesuaikan dengan mengedepankan sinergi antarunit vertikal Kemenkeu di daerah.

e) Penguatan organisasi dan fungsi *treasury* melalui kajian menyeluruh terhadap fungsi perbendaharaan saat ini seiring dengan penguatan peran perbendaharaan ke depan selaku *regional economic surveillance* dan *regional financial advisor*.

f) Transformasi kelembagaan BLU melalui penyesuaian struktur dan perluasan cakupan layanan dalam mendukung penguatan peran BLU dan SMV sebagai *arm's length* Kemenkeu untuk mendorong transformasi ekonomi nasional.

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan

Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, data kondisi SDM Kemenkeu sebagai berikut:

1) Total pegawai Kemenkeu adalah sejumlah 77.055 orang terdiri dari PNS sejumlah 76.978 orang dan PPPK sejumlah 77 orang.

Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 43.754 orang atau 56,78% (lima puluh enam koma tujuh delapan persen) dan terbanyak kedua adalah pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 15.828 orang atau 20,54% (dua puluh koma lima puluh empat persen).

2) Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 23.920 orang atau 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) generasi Z, sebanyak 32.102 orang atau 41,66% (empat puluh satu koma enam enam persen) generasi Y, sebanyak 21.013 orang atau 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) generasi X, dan sebanyak 20 orang atau 0,03% (nol koma nol tiga persen) generasi *Baby Boomer*. Sehingga, jumlah pegawai generasi milenial (generasi Y dan Z) Kemenkeu mencapai 72,70% (tujuh puluh dua koma tujuh nol persen) dari total pegawai.
3) Saat ini komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan di Kemenkeu adalah 7:3 (tujuh berbanding tiga) atau sejumlah 52.391 orang pegawai laki-laki dan 24.664 pegawai perempuan. Dalam kategori golongan jabatan, komposisi pegawai Kemenkeu saat ini pegawai golongan II sebesar 36% (tiga puluh enam persen), diikuti golongan III sebesar 53% (lima puluh tiga persen), dan golongan IV sebesar 11% (sebelas persen).
4) Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sejumlah 31.635 orang atau 41,06% (empat puluh koma nol enam persen), diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sejumlah 31.041 orang atau 40,28% (empat puluh koma dua delapan persen), pendidikan S2 sejumlah 14.064 orang atau 18,25% (delapan belas koma dua lima persen) dan pendidikan S3 sejumlah 315 orang atau 0,41% (nol koma empat satu persen).

b. Proyeksi Kebutuhan SDM Kementerian Keuangan 2025-2029

Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kemenkeu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memerhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, dan strategi serta kondisi *existing* SDM Kemenkeu. Dengan memerhatikan transformasi proses bisnis, digitalisasi, simplifikasi birokrasi, fungsionalisasi, dan penerapan sistem kerja baru, maka arah kebijakan SDM ke depan menerapkan bauran kebijakan *zero/positive growth* SDM untuk unit fungsi penerimaan negara dan *negative growth* SDM untuk unit fungsi lainnya. Proyeksi kebutuhan SDM ke depan disusun dengan asumsi sebagai berikut:

1) Organisasi tidak berubah secara masif, delayering dan fungsionalisasi tetap berjalan.
2) Terdapat redistribusi pegawai dari unit yang diproyeksikan kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai, khususnya ke unit penerimaan.
3) Penataan komposisi SDM melalui penataan jumlah SDM antarunit eselon I, pengalihan pejabat struktural/pelaksana ke pejabat fungsional dan komposisi kompetensi SDM.
4) Penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS (umum dan sekolah kedinasan) dan PPPK dengan mengkaji kemungkinan penerapan rekrutmen ASN fleksibel.
5) Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar

nonpensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per 31 Desember 2024.

6) Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan perhitungan atas data *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun dalam kurun tahun 2025 – 2029 sejumlah 5.738 orang. Sementara itu, berdasarkan tren *turn over rate* selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dll) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 2.010 orang.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM tersebut di atas, serta proyeksi jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya dan jumlah pegawai yang diperkirakan masuk dari hasil rekrutmen tahun 2024, pada tahun 2025 – 2029 jumlah SDM Kemenkeu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% - 0,50% per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Pengelolaan SDM menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan dinamika global yang semakin cepat dan kebutuhan perubahan internal organisasi Kemenkeu. Menjawab tantangan-tantangan tersebut, Kemenkeu perlu melakukan transformasi pengelolaan SDM secara menyeluruh dengan arah kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu pada tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui:

1) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penataan Postur SDM Kemenkeu

Perencanaan SDM harus memerhatikan aspek produktifitas dan *well-being* pegawai serta mengoptimalkan pemanfaatan data analitik dan sistem teknologi informasi terkini sehingga dapat menghasilkan perencanaan SDM yang berkualitas. Postur dan komposisi SDM yang tepat juga perlu dijaga untuk memenuhi tuntutan perubahan dan tantangan pengelolaan keuangan negara di masa depan serta menunjang pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan strategi perencanaan SDM yang meliputi:

a) Penyempurnaan kebijakan dan peningkatan akurasi perencanaan SDM;
b) Penataan komposisi SDM, dan penguatan SDM bidang penerimaan;
c) Penguatan dukungan pemenuhan kebutuhan SDM Keuangan Negara pada K/L/Pemda dari lulusan PKN STAN; dan
d) Penguatan kualitas lulusan PKN STAN.

2) Redesain Sistem Rekrutmen dan *Onboarding* Pegawai Baru

Tuntutan peningkatan potensi pegawai/ASN terutama dalam rangka persiapan *talent* terbaik, kemampuan merespon kemajuan teknologi digital, serta antisipasi pergeseran preferensi generasi Z dan milenial dalam memilih tempat kerja, perlu dilakukan terobosan untuk meredesain sistem rekrutmen dan

onboarding pegawai baru Kemenkeu yang diharapkan dapat menghasilkan pegawai baru yang berkapasitas tinggi dan berkarakter, serta memiliki *engagement* dengan organisasi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui:

a) Penyempurnaan kebijakan, penguatan *employer branding*, dan simplifikasi/modernisasi sistem rekrutmen ASN; dan
b) Penyempurnaan kebijakan, penguatan *buddy system* dan *mentorship*, serta digitalisasi Program *Onboarding.*

3) Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM Keuangan Negara

Dinamika tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks serta cepatnya perkembangan teknologi menuntut Kemenkeu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM-nya untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten, adaptif, berkarakter, dan berkinerja tinggi. Hal ini akan dicapai melalui strategi, antara lain:

a) Pemetaan keahlian yang lebih sistematis dan proaktif terhadap kebutuhan kompetensi masa depan (*future competencies*).
b) Penguatan serta redesain sistem pengukuran kompetensi.
c) Pengembangan kompetensi SDM melalui pembelajaran yang lebih terintegrasi.

4) Penyempurnaan Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan

Tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang, termasuk tuntutan terhadap akuntabilitas publik dan pencapaian kinerja yang tinggi, mendorong penyempurnaan manajemen kinerja Kemenkeu yang difokuskan pada tiga hal utama agar selaras dengan arah strategis organisasi, antara lain:

a) Penyempurnaan kebijakan manajemen kinerja yang bertujuan meningkatkan adaptabilitas proses bisnis manajemen kinerja terhadap dinamika organisasi dan mampu mengakomodasi karakteristik generasi pegawai yang semakin beragam.
b) Pengembangan infrastruktur manajemen kinerja, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja.
c) Peningkatan kompetensi pengelola kinerja dan komitmen pegawai untuk memberi kinerja terbaik melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penciptaan lingkungan kerja dan budaya yang positif.

5) Penyempurnaan Manajemen Karir dan Peningkatan Kualitas *Talent*

Kemenkeu terus membangun sistem manajemen karier yang lebih responsif dan berorientasi pada pengembangan potensi pegawai secara menyeluruh, mampu mendukung pertumbuhan karier yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi guna menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan berbagai strategi, antara lain:

a) Penyempurnaan sistem manajemen karier dan talenta.
b) Penguatan peran diaspora Kemenkeu yang bertugas di Kementerian/Lembaga lain maupun Pemerintah Daerah.
c) Pelaksanaan mutasi antarunit eselon I sebagai bentuk mobilitas *talent* dan pengayaan pengalaman lintas bidang.
d) Pemberdayaan jabatan fungsional untuk meningkatkan kesempatan karier dan spesialisasi fungsi pada pegawai.

6) Penguatan Program Persiapan Pensiun

Kemenkeu berkomitmen untuk mewujudkan layanan Pemberhentian dan Pensiun Pegawai yang tepat waktu dan tepat sasaran, dengan berbagai inisiatif, antara lain:

a) Optimalisasi tata kelola manajemen pensiun, termasuk pengembangan sistem Klaim Pensiun Otomatis, yang memungkinkan proses pensiun berjalan lebih cepat, efisien, dan terotomasi.
b) Perumusan program persiapan pensiun yang terstruktur, guna membekali pegawai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam menghadapi masa transisi tersebut secara lebih matang dan positif.

7) Penguatan Program Kesejahteraan dan *Well-being* Pegawai

Kemenkeu secara konsisten memperkuat program kesejahteraan dengan pendekatan yang adaptif dan menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik dan finansial, tetapi juga menyentuh dimensi mental, emosional, dan aktualisasi pegawai. Dengan memerhatikan kesejahteraan secara holistik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, *well-being* pegawai dan psikologis pegawai, yang berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan pegawai lebih tinggi, serta menciptakan pegawai yang berkarakter kuat, memiliki resilien yang baik, dan berkinerja lebih baik. Pendekatan ini diwujudkan melalui langkah konkret antara lain:

a) Optimalisasi layanan psikologis internal, untuk memastikan kebutuhan dukungan emosional dan kesehatan mental pegawai dapat terfasilitasi secara proaktif dan tepat sasaran.
b) Penyusunan *grand design* pembinaan mental pegawai, sebagai arah strategis dalam membangun ketahanan pribadi dan karakter pegawai yang selaras dengan nilai-nilai organisasi.
c) Penyempurnaan kebijakan sistem penghargaan, guna memastikan bahwa apresiasi terhadap kontribusi pegawai diberikan secara adil, objektif, dan memotivasi pencapaian kinerja yang berkelanjutan.

8) Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Dalam rangka memperkuat karakter kelembagaan yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Kemenkeu, penguatan pengelolaan budaya organisasi terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kinerja dan produktivitas pegawai Kemenkeu yang unggul dan mengedepankan semangat Kemenkeu Satu. Hal ini diimplementasikan melalui strategi berikut:

a) Penanganan isu stigma antargenerasi, dengan mendorong sinergi antarkelompok usia melalui dialog terbuka, penguatan empati, dan kolaborasi lintas generasi.
b) Penanganan isu *sandwich manager*, yakni pimpinan menengah yang berada di antara tekanan atasan dan kebutuhan tim, melalui pelatihan kepemimpinan dan penguatan dukungan struktural.
c) Penanganan isu dinamika internal baik antarindividu maupun antarunit, dengan pendekatan resolusi konflik yang adil dan peningkatan komunikasi yang konstruktif.
d) Penanganan isu relasi kultur-subkultur, untuk memastikan keselarasan visi-misi organisasi di tengah keberagaman unit

kerja dan karakter lokal.

9) Penguatan Kompetensi dan Mental Pemimpin

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, dibutuhkan pemimpin yang kompeten dan berkarakter. Oleh karena itu Kemenkeu secara konsisten melakukan penguatan kepemimpinan melalui beberapa strategi secara terstruktur. Pendekatan dalam mewujudkan penguatan kompetensi dan menumbuhkan mental pemimpin dilakukan melalui implementasi Kemenkeu *Leadership Development* Program (KLDP), Penguatan Karakter, dan Pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu (Kemenkeu *Leadership Academy*) sebagai wadah pembelajaran terpadu yang didesain untuk membentuk pemimpin yang berkarakter, proaktif, adaptif terhadap perubahan, tepercaya, andal dalam mengelola organisasi, mampu menjadi role model dalam menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dan mampu menginspirasi tim secara berkelanjutan.

10) Penyempurnaan Regulasi SDM yang Adaptif

Penyempurnaan kebijakan dan aturan di bidang sumber daya manusia menjadi agenda prioritas untuk memastikan tata kelola SDM yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan tantangan zaman. Penyempurnaan regulasi SDM misalnya terkait perencanaan, rekrutmen dan *onboarding*, penempatan lulusan PKN STAN, manajemen kompetensi, manajemen karier, penugasan pelaporan harta kekayaan, kode etik dan sistem informasi SDM.

11) Pengembangan Informasi SDM yang Terintegrasi, Berbasis Data Analitik, dan Berkelanjutan.

Kemenkeu melakukan langkah-langkah pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi pengelolaan sumber daya manusia untuk mewujudkan efisiensi biaya dan layanan, meningkatkan produktivitas, *well-being*, kepuasan, keterlibatan, dan hubungan antara pegawai dan organisasi. Hal ini dicapai melalui beberapa strategi, antara lain:

a) Pengembangan dan integrasi Sistem Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemenkeu, yang dirancang untuk menjadi pusat kendali seluruh proses bisnis organisasi dan SDM secara *end-to-end*.
b) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data serta optimalisasi dokumen SDM, dengan pendekatan berbasis analitik guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika organisasi.

3. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan

Mengacu pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah pengelolaan TIK Kemenkeu difokuskan pada pengarusutamaan TIK pada sektor ekonomi dengan tujuan mencapai Visi Indonesia Digital 2045 mencakup percepatan transformasi digital dan optimalisasi investasi TIK, antara lain melalui strategi:

a. Pembangunan dan/atau penguatan sistem informasi Kemenkeu yang andal dan berkualitas untuk mendukung pengelolaan keuangan negara dan sistem informasi nasional melalui interoperabilitas antarsistem informasi Kemenkeu dan penyempurnaan sistem

informasi Kemenkeu dengan melaksanakan implementasi kecerdasan buatan, penguatan *Single Profile*, dan penyediaan *Customer Relationship Management* yang berkualitas.
Strategi ini diarahkan untuk memastikan tersedianya sistem informasi yang terintegrasi, andal, dan memiliki kualitas tinggi guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara serta berkontribusi terhadap pengembangan sistem informasi nasional yang terpadu.

b. Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (data *enablement*) untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara antara lain melalui peningkatan kualitas data Kemenkeu dan pemanfaatan Portal Satu Data Kemenkeu.
Strategi ini bertujuan untuk mendorong integrasi data lintas unit eselon I/noneselon I dan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), serta meningkatkan kemampuan analisis data guna menghasilkan informasi yang berkualitas, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara.

c. Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital mencakup antara lain area data, keamanan, riset dan inovasi digital, serta penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional.
Transformasi digital memerlukan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Oleh karena itu, strategi ini mencakup penyempurnaan tata kelola yang selaras dengan regulasi nasional serta penyempurnaan mekanisme pengawasan guna mempercepat implementasi transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

d. Pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi, yang ditandai dengan disusunnya Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu Tahun 2025-2029.
Strategi ini dilakukan dengan menyusun Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu tahun 2025 s.d. 2029 untuk mendapatkan gambarkan pengembangan TIK Kemenkeu secara keseluruhan dan terintegrasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

e. Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making, alert*, dan *early warning.*
Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan adanya penambahan proses bisnis baru pada organisasi Kementerian Keuangan terkait dengan *decision making, alert*, dan *early warning*.

f. Penguatan dan modernisasi infrastruktur TIK antara lain melalui optimalisasi pusat data Kemenkeu, penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan keandalan sistem.
Untuk mendukung layanan digital yang efektif dan efisien, strategi ini berfokus pada penguatan infrastruktur berbagi pakai, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan keandalan sistem untuk mendukung ketersediaan layanan digital yang andal dan inklusif.

g. Penguatan keamanan informasi antara lain melalui penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan tata kelola dan

pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.

Seiring dengan meningkatnya risiko ancaman siber, strategi ini difokuskan pada penguatan sistem pelindungan informasi melalui penerapan standar keamanan informasi yang ketat, pengembangan kapabilitas pertahanan siber, penguatan pengelolaan keamanan informasi, serta peningkatan kesadaran dan budaya keamanan informasi di seluruh lingkungan Kemenkeu.

h. Pengembangan *talent* digital antara lain melalui serangkaian program penguatan *digital literacy*, kompetensi, motivasi, dan kolaborasi SDM TIK.
   Mempertimbangkan urgensi kebutuhan atas *talent* digital ASN dalam mendukung transformasi digital Kemenkeu, strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan jalur karier berbasis kompetensi, penguatan kompetensi digital yang terarah, penguatan literasi digital pegawai, penerapan *community of practice* peminatan kompetensi digital, serta penguatan *digital leadership* guna menciptakan SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

4. Kebijakan Penganggaran Kementerian Keuangan

Kebijakan penganggaran dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas belanja dan efisiensi belanja pemerintah. Kemenkeu telah menerapkan kebijakan efisiensi dan disiplin anggaran secara berkelanjutan untuk mewujudkan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, namun tetap *agile* dalam manghadapi tantangan internal dan eksternal yg dinamis. Kebijakan di bidang penganggaran diimplementasikan melalui strategi:

a. Pengendalian Belanja Birokrasi
   Belanja birokrasi merupakan belanja yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian target kinerja *output* yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat/publik. Dalam penyusunan anggaran, belanja birokrasi harus dialokasikan sesuai dengan prinsip *value for money* serta sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan pengendalian belanja birokrasi pada Kemenkeu meliputi tidak terbatas pada pengendalian belanja bahan, belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja perjalanan dinas luar negeri, belanja paket *meeting/konsinyering,* dan honorarium tim.
b. Skala Prioritas Pengalokasian Anggaran
   Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kemenkeu menerapkan strategi prioritasi pengalokasian anggaran dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan, dampak yang dihasilkan, serta kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Prioritas utama diberikan pada program dan kegiatan yang bersifat mendesak, menunjang pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan inovasi layanan. Kegiatan pendukung dilaksanakan apabila sumber daya dan pembiayaan mencukupi, tanpa mengganggu pencapaian target

utama. Dengan penerapan skala prioritas ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran, memberikan dampak optimal, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan.

c. Implementasi Standarisasi Biaya
Dalam rangka implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran serta menjaga keselarasan antarunit eselon I dalam penyusunan anggaran, salah satu kebijakan yang perlu diimplementasikan Kemenkeu yaitu standarisasi biaya. Standarisasi biaya dapat dijadikan acuan dalam rangka menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian suatu *output.* Kebijakan standarisasi biaya diterapkan melalui standarisasi struktur biaya, standarisasi biaya keluaran, dan standarisasi harga satuan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung tercapainya kebijakan nasional, Kemenkeu menetapkan 5 (lima) tujuan beserta 6 (enam) sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Program yaitu: (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; (2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara; (3) Program Pengelolaan Belanja Negara; (4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; dan (5) Program Dukungan Manajemen. Adapun target kinerja Kemenkeu tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1

Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029*

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator			Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi**							
	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman**			(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%
	a.	**Kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil**						
		1)	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100
		2)	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
2.	**Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional**							
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB**			12,36%	11,71% - 13,72%	11,70% - 15,06%	12,12% - 16,52%	12,86% - 18,00%
	a.	**Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal**						
		1)	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB**	10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52%-15,00%
		2)	Rasio PNBP (persen PDB)**	2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%
		3)	Waktu penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor**	2,90-2,85 hari	2,85-2,79 hari	2,79-2,72 hari	2,72-2,66 hari	2,66-2,60 hari
3.	**Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat**							

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator			Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara**			86	86,5	87	87,5	88
	a.	**Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas**						
		1)	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	85	85,5	86	86,5	87
		2)	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	100%	100%	100%	100%	100%
		3)	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%
		4)	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	100	100	100	100	100
		5)	Alokasi TKD untuk infrastruktur**	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T	55,6T
		6)	Persentase kinerja hibah daerah**	75%	75%	75%	75%	75%
4.	**Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik**							
	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB**			39,43%	39,13% - 39,85%	39,08% - 39,62%	39,04% - 39,29%	38,55%-38,64%
	a.	**Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif**						
		1)	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	3,26 (skala 4)	3,27 (skala 4)	3,28 (skala 4)	3,29 (skala 4)
		2)	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
		3)	Indeks pengelolaan aset	3,00 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,20 (skala 4)	3,30 (skala 4)	3,40 (skala 4)
		4)	Indeks efektivitas kebijakan investasi	100%	100%	100%	100%	100%
		5)	Imbal Hasil (Yield) SBN	7,0%	6,6% - 7,2%	6,3% - 7,3%	6,0% - 7,0%	6,0% - 7,0%
5	**Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional**							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan			4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
	a.	**Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.**						
		1)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator			Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		2)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
		3)	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100
		4)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100
		5)	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
		6)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5
	b.	**Pencapaian tugas khusus yang efektif**						
		1)	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100

Keterangan:
*) Indikator dan Target di atas merupakan Indikator dan agregasi Target pada level Kemenkeu. Indikator dan Target pada masing-masing unit eselon I mempertimbangkan *baseline* tahun 2024 dan proyeksi target tahun-tahun berikutnya.
**) Mandat Perpres RPJMN 2025-2029

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemenkeu telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Seluruh pendanaan tersebut bersumber dari APBN, yang terdiri dari Rupiah Murni, PNBP, Hibah, dan BLU, serta tidak terdapat sumber pendanaan yang bersumber dari non-APBN. Adapun rincian indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program/Sumber Dana	2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi**	**59.153**	**90.032**	**67.975**	**70.490**	**71.861**
	Rupiah Murni	*59.153*	*90.032*	*67.975*	*70.490*	*71.861*
2	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**	**2.369.115**	**1.997.068**	**2.364.123**	**2.460.552**	**2.508.766**
	Rupiah Murni	*2.369.115*	*1.997.068*	*2.364.123*	*2.460.552*	*2.508.766*
3	**Program Pengelolaan Belanja Negara**	**48.200**	**24.407**	**42.394**	**43.945**	**44.720**
	Rupiah Murni	*42.421*	*24.407*	*42.394*	*43.945*	*44.720*
	Hibah	*5.779*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko**	**238.140**	**289.233**	**231.105**	**243.616**	**248.893**
	Rupiah Murni	*223.513*	*268.048*	*219.456*	*231.492*	*236.531*
	PNBP	*14.627*	*21.184*	*11.649*	*12.124*	*12.362*
5	**Program Dukungan Manajemen**	**50.480.781**	**49.615.260**	**51.941.102**	**52.978.009**	**53.497.985**
	Rupiah Murni	*40.098.613*	*39.215.369*	*41.560.308*	*42.597.161*	*43.116.994*
	PNBP	*2.361*	*23.324*	*8.137*	*8.184*	*8.325*
	BLU	*10.376.197*	*10.376.567*	*10.372.657*	*10.372.663*	*10.372.666*
	Hibah	*3.610*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Total Pagu	**53.195.389**	**52.016.000**	**54.646.699**	**55.796.612**	**56.372.226**

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Direktif Presiden, Kemenkeu menyelenggarakan 59 RO Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp23,923 triliun. Adapun rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025 - 2029 per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi						
1	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	26	-	-	-	-
2	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	520	220	247	-	-
3	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	750	-	-	-	-
4	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	600	-	-	-	-
5	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	1.100	-	-	-	-
6	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)	-	1.000	-	-	-
7	Redesign Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBP pada Komoditas SDA (PN)	-	1.210	-	-	-
8	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)	-	1.210	-	-	-
9	Analisis Kriteria Rincian Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kebutuhan Pokok yang Dikenakan PPN (PN)	-	555	-	-	-
10	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan (PN)	-	499	-	-	-
11	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PN)	-	498	-	-	-
12	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (PN)	-	493	-	-	-
13	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	367	-	-	-	-
14	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	-	3.534	2.326	2.421	2.469
15	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional (PN)	-	481	-	-	-
16	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Aksesi Indonesia pada OECD (PN)	1.200	1.600	1.200	1.249	1.273
Total		**4.563**	**11.301**	**3.773**	**3.670**	**3.742**

Tabel 4.4
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengeloalan Penerimaan Negara						
1	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	880	-	-	-	-
2	Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) (PN)	-	640	-	-	-
3	Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis Input *Output* (PN)	-	800	-	-	-
4	Promosi Ekspor UMKM (PN)	373	175	373	389	396
5	Joint Task Force On Narcotics (PN)	1.628	812	1.628	1.695	1.728
6	Sinergi Patroli Laut Bersama (PN)	1.142	541	1.142	1.188	1.212
Total		**4.023**	**2.968**	**3.143**	**3.272**	**3.336**

Tabel 4.5
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Belanja Negara
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Belanja Negara						
1	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	1.778	1.710	1.778	1.851	1.887
2	Bimtek BUMDes (PN)	2.387	1.139	2.387	2.484	2.533
3	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	550	-	-	-	-
4	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	1.018	-	-	-	-
5	Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)	-	463	687	756	791
6	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	327	157	327	341	347
Total		**6.061**	**3.469**	**5.179**	**5.431**	**5.557**

Tabel 4.6
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko						
1	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	1.172	-	-	-	-
2	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)	-	1.056	484	504	514
3	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	1.509	812	372	387	395
4	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	706	-	-	-	-
5	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)	-	60.994	27.951	29.091	29.661
6	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	3.196	-	-	-	-

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
7	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	400	400	292	337	349
8	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)	1.226	600	896	1.032	1.068
9	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)	888	257	664	765	792
10	Pembangunan Sistem Pemesanan dan Pengembangan Desain Integrasi Channel Social Fund Linked Sukuk (PN)	1.098	363	1.276	1.469	1.520
11	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	207	73	151	174	180
12	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	260	147	209	241	250
13	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)	395	142	296	340	352
14	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	79	71	79	82	84
15	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	1.455	348	1.455	1.514	1.544
Total		**12.591**	**65.265**	**34.126**	**35.936**	**36.708**

Tabel 4.7
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Dukungan Manajemen
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukuman Manajemen						
1	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)	2.577	3.579	3.248	3.362	3.427
2	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)	4.169	4.799	4.355	4.507	4.596
3	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	887	888	805	834	850
4	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)	-	2.989	2.712	2.807	2.862
5	*Core Tax System* (PN)	201.743	-	-	-	-
6	Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (*Tax Crime Handling System*) (PN)	1.200	665	-	-	-
7	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476	4.237.476
8	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	31.714	31.702	31.714	31.714	31.714
9	Sistem INSW Generasi II (PN)	2.500	2.745	2.500	2.500	2.549
10	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	19	-	-	-	-
11	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	5.071	73.005	73.005	73.005	73.005
12	Beasiswa Afirmasi (PN)	8.446	324.236	324.236	324.236	324.236
13	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Riset (PN)	-	111.027	111.027	111.027	111.027

No.	Rencana *Output*	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
14	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)	-	3.233	-	-	-
15	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	600	-	-	-	-
16	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	2.326	-	-	-	-
Total		**4.498.728**	**4.796.344**	**4.791.080**	**4.791.468**	**4.791.743**

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan K/L untuk jangka menengah. Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Visi dan misi Kemenkeu "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Adapun misi Kemenkeu 1) Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif sehingga mampu menggerakkan transformasi ekonomi, 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat, 4) Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik, 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Penyusunan Renstra Kemenkeu tidak terlepas dari proses pengendalian dan evaluasi pada tahap penyusunan maupun pada tahap pelaksanaannya. Penelaahan substansi dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan RPJMN, serta dilaksanakan pula forum penyesuaian Renstra yang menjadi wadah penyelarasan dan koreksi Rancangan Renstra Kemenkeu, sebelum ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian berdasarkan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan proses evaluasi paruh waktu.

Dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kemenkeu dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud.

LAMPIRAN

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN KEUANGAN								**53,195,389.27**	**52,016,000.00**	**54,646,698.99**	**55,796,611.92**	**56,372,225.56**	
Sasaran Strategis	***Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**DJSEF**
	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan		*3 (skala 4)*	*3 (skala 4)*	*3 (skala 4)*	*3 (skala 4)*	*3 (skala 4)*						**DJSPSK**
Sasaran Strategis	***Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB*		*10,24%*	*10,08% - 11,34%*	*10,29% - 12,41%*	*10,75% - 13,67%*	*11,52%- 15,00%*						**DJP, DJBC**
	Rasio PNBP (persen PDB)		*2,11%*	*1,63% - 2,38%*	*1,40% - 2,64%*	*1,36% - 2,84%*	*1,33% - 2,99%*						**DJA**
	Waktu penahanan (dwell time) di Pelabuhan selama fase impor		*2,90-2,85 hari*	*2,85-2,79 hari*	*2,79-2,72 hari*	*2,72-2,66 hari*	*2,66-2,60 hari*						**LNSW**
Sasaran Strategis	***Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Indeks kualitas belanja pusat dan daerah*		*85*	*85,5*	*86*	*86,5*	*87*						**DJA, DJPK**
	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*						**DJA, DJPK**
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah		*6,10%*	*6,15%*	*6,35%*	*6,45%*	*-*						**DJPK**
	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD		*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*						**DJPK**
	Alokasi TKD untuk Infrastruktur		*55,6 Triliun*	*55,6 Triliun*	*55,6 Triliun*	*55,6 Triliun*	*55,6 Triliun*						**DJPK**
	Persentase Kinerja Hibah Daerah		*75%*	*75%*	*75%*	*75%*	*75%*						**DJPK**
Sasaran Strategis	***Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko yang Akuntabel, Prudent, dan Inovatif***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang*		*3,25*	*3,26*	*3,27*	*3,28*	*3,29*						**DJPB**
	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN		*98,8*	*98,8*	*98,8*	*98,8*	*98,8*						**DJPB**
	Indeks Pengelolaan Aset		*3,00*	*3,10*	*3,20*	*3,30*	*3,40*						**DJKN**
	Indeks efektivitas kebijakan investasi		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**DJKN**
	Imbal Hasil (Yield) SBN		*7,0*	*6,6-7,2*	*6,3-7,3*	*6,0-7,0*	*6,0-7,0*						**DJPPR**
Sasaran Strategis	***Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Indeks Kepuasan Pengguna Layanan*		*4.20 (Skala 5)*	*4.21 (Skala 5)*	*4.22 (Skala 5)*	*4.23 (Skala 5)*	*4.24 (Skala 5)*						**Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK,**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													DJPPR, BPPK, BaTII, LNSW
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**Seluruh UE 1**
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJPPR, BaTII, LNSW**
	Nilai evaluasi organisasi		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, BaTII, LNSW**
	Indeks Integritas		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**Setjen, Itjen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, LNSW**
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**Setjen, Itjen, DJA, DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJSEF, DJSPSK, DJPK, DJPPR, BPPK, LNSW**
Sasaran Strategis	***Pencapaian tugas khusus yang efektif***												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Indeks efektivitas kinerja SMV*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						**Setjen, DJPb, DJKN, DJPPR, BPPK**
Program	**CE Kebijakan Fiskal**							**59,152.64**	**90,032.33**	**67,974.99**	**70,489.96**	**71,861.37**	
Sasaran Program	**1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif**												
Indikator Kinerja Program	Rasio Defisit terhadap PDB		(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi		100	100	100	100	100						
	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan		3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)						
	Akurasi Proyeksi Realisasi APBN		3,25 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)	3,50 (skala 4)						
	Indeks Kinerja Reformasi Hukum		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal		86,6	86,6	86,6	86,6	86,6						
	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal		100	100	100	100	100						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi		100	100	100	100	100						
	Indeks Kinerja Kebijakan Stabilitas Sektor Keuangan		100	100	100	100	100						
Sasaran Program	**2. Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif**												
Indikator Kinerja Program	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJSPSK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan	**4762 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional**							**782.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DJSEF**
Sasaran Kegiatan	**Diplomasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		95,5%	-	-	-	-						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**782.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		15 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	480.37	-	-	-	-	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional dalam Sektor Keuangan		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	301.97	-	-	-	-	
Kegiatan	**4763 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan**							**102.56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DJSEF**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
Output	**Peraturan lainnya**							**73.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan		5 Rancangan Peraturan	-	-	-	-	73.27	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**3.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**26.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	26.29	-	-	-	-	
Kegiatan	**4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan**							**553.84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DJSEF**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	**Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan		100	-	-	-	-						
	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat		85%	-	-	-	-						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**553.84**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan		10 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	206.99	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan APBN		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	56.10	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	56.19	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	78.82	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	149.59	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	6.15	-	-	-	-	
Kegiatan	**4766 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**2,197.51**	**882.88**	**2,197.51**	**2,287.16**	**2,331.99**	**DJA**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian rekomendasi harmonisasi peraturan dan kebijakan penganggaran		94	95	95	95	95						
Output	**Undang-Undang**							**976.13**	**406.75**	**976.13**	**1,015.95**	**1,035.86**	
	RUU APBN/P		1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	976.13	406.75	976.13	1,015.95	1,035.86	
	Perencanaan dan Penganggaran							**1,221.38**	**476.13**	**1,221.38**	**1,271.21**	**1,296.13**	
	Nota Keuangan APBN/P		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,221.38	476.13	1,221.38	1,271.21	1,296.13	
Kegiatan	**4771 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**320.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DJP**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Peraturan		7,6	-	-	-	-						
Output	**Peraturan Pemerintah**							**320.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh		1 PP	-	-	-	-	320.85	-	-	-	-	
Kegiatan	**4772 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**4,950.00**	**3,960.59**	**4,788.79**	**4,952.59**	**5,034.49**	**DJPK**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah		80	82	82	82	82						
Output	**Peraturan Pemerintah**							**-**	**260.00**	**260.00**	**260.00**	**260.00**	
	RPP Retribusi Pemanfaatan Ruang		-	1 PP	1 PP	1 PP	1 PP	-	260.00	260.00	260.00	260.00	
	Peraturan Menteri							**1,794.56**	**2,582.87**	**1,794.56**	**1,867.78**	**1,904.39**	
	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	66.21	45.51	66.21	68.91	70.26	
	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	42.43	45.51	42.43	44.16	45.03	
	PMK Turunan PP terkait UU HKPD		8 PerMen	12 PerMen	12 PerMen	12 PerMen	12 PerMen	1,685.92	2,491.85	1,685.92	1,754.70	1,789.09	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**3,155.44**	**1,117.72**	**2,734.23**	**2,824.81**	**2,870.10**	
	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	83.96	83.02	83.96	87.38	89.10	
	Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	449.79	-	-	-	-	
	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	105.72	-	-	-	-	
	Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	379.85	-	-	-	-	
	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	139.83	54.37	139.83	145.53	148.39	
	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	184.06	114.70	184.06	191.57	195.33	
	Rekomendasi Kebijakan PDRD – Opsen Pajak Daerah dan Earmarking		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	514.15	514.15	514.15	514.15	
	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	294.09	83.41	294.09	306.09	312.09	
	ALCO Regional (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	280.73	78.26	280.73	292.18	297.91	
	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)		3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	920.41	98.94	920.41	957.96	976.74	
	KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	317.00	90.88	317.00	329.93	336.40	
Kegiatan	**4773 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**520.00**	**593.53**	**520.00**	**314.42**	**325.49**	**DJPPR**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas rumusan kebijakan		100	100	100	100	100						
Output	**Peraturan Pemerintah**							**520.00**	**220.00**	**246.90**	**-**	**-**	
	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)		1 RPP	1 RPP	1 RPP	-	-	520.00	220.00	246.90	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**-**	**373.53**	**273.11**	**314**	**325**	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penjaminan Pemerintah dalam rangka Mengurangi Risiko Fiskal atas Pembiayaan Pembangunan Nasional (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	373.53	273.11	314.42	325.49	
Kegiatan	**7790 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**4,547.52**	**6,846.87**	**1,592.10**	**1,657.06**	**1,689.54**	**DJSEF**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85						
Output	**Peraturan Lainnya**							**1,592.10**	**1,481.38**	**1,592.10**	**1,657.06**	**1,689.54**	
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan		5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	1,592.10	1,481.38	1,592.10	1,657.06	1,689.54	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**505.42**	**1,390**	**-**	**-**	**-**	
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	502.42	-	-	-	-	
	Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	
	Perkembangan AI (Transformasi Digital) dan Dampaknya terhadap Struktur Tenaga Kerja Indonesia (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	400.00	-	-	-	
	Transformasi Struktur Ekonomi: Potensi dan Tantangan Penguatan Kontribusi Sektor Tersier terhadap Pertumbuhan PDB (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	990.00	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**2,450.00**	**3,975.49**	**-**	**-**	**-**	
	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	
	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	
	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	
	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	
	Redesign Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBP pada Komoditas SDA (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	
	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,210.00	-	-	-	
	Analisis Kriteria Rincian Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kebutuhan Pokok yang Dikenakan PPN (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	555.49	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	**7793 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**1,566.67**	**8,286.57**	**3,893.00**	**4,051.84**	**4,131.25**	**DJSPSK**
Sasaran Kegiatan	**Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**1,566.67**	**7,105.15**	**3,526.34**	**3,670.21**	**3,742.15**	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	498.62	-	-	-	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	498.05	-	-	-	
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	493.32	-	-	-	
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	366.67	-	-	-	-	
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	3,534.04	2,326.34	2,421.25	2,468.71	
	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	481.12	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Aksesi Indonesia pada OECD (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,200.00	1,600.00	1,200.00	1,248.96	1,273.44	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**-**	**1,181.42**	**366.67**	**381.62**	**389.10**	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	203.30	122.22	127.21	129.70	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	506.17	122.22	127.21	129.70	
	Penguatan Pengaturan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	471.95	122.22	127.21	129.70	
Kegiatan	**4768 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional**							**16,182.12**	**15,850.91**	**16,182.12**	**16,842.35**	**17,172.46**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**Diplomasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas penyelenggaraan kegiatan pertemuan internasional		3,2	3,1	3,1	3,1	3,1						
	Tingkat keberhasilan mengawal kepentingan nasional terkait sistem klasifikasi barang dalam sidang internasional		72%	73%	73%	73%	73%						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**3,359.14**	**3,151.50**	**3,359.14**	**3,496.19**	**3,564.71**	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures (PU)		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1,969.78	1,839.57	1,969.78	2,050.15	2,090.33	
	Rekomendasi Kebijakan Free Trade Agreement melalui Verification Visit (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,389.35	300.00	1,389.35	1,446.04	1,474.38	
	Rekomendasi Kebijakan Nilai Pabean Hasil Perundingan Internasional (PU)		-	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,011.93	-	-	-	
	Forum							**3,197.77**	**3,192.77**	**3,197.77**	**3,328.24**	**3,393.48**	
	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)		3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3,197.77	3,192.77	3,197.77	3,328.24	3,393.48	
	Kerja Sama							**9,625.21**	**9,506.64**	**9,625.21**	**10,017.91**	**10,214.27**	
	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	7,051.23	6,989.42	7,051.23	7,338.92	7,482.76	
	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2,573.98	2,517.23	2,573.98	2,679.00	2,731.51	
Kegiatan	**7796 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional**							**8,813.34**	**9151.43**	**8,813.34**	**9,172.92**	**9,352.71**	**DJSPSK**
Sasaran Kegiatan	**Diplomasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan sektor keuangan**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerjasama ekonomi dan keuangan internasional		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**8,813.34**	**9151.43**	**8,813.34**	**9,172.92**	**9,352.71**	
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	4,252.93	2,357.72	4,252.93	4,426.44	4,513.20	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral		5 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	3,893.01	3,518.01	3,304.50	3,463.33	3,542.75	
	Rekomendasi Posisi Runding Indonesia dalam rangka Perjanjian Perdagangan Internasional		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	588.52	588.52	588.52	588.52	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	140.74	975.69	140.74	146.48	149.35	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	273.50	963.87	273.50	284.66	290.24	
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	253.16	747.61	253.16	263.49	268.65	
Kegiatan	**4769 Komunikasi dan Edukasi**							**221.66**	**201.40**	**221.66**	**230.71**	**235.23**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**Komunikasi dan Edukasi Hasil Kerja Sama dan Perundingan yang Optimal**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektifitas pemberian bimbingan teknis kepada stakeholder DJBC		80	81	81	81	81						
Output	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara**							**221.66**	**201.40**	**221.66**	**230.71**	**235.23**	
	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai		4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	221.66	201.40	221.66	230.71	235.23	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	**7792 Komunikasi dan Edukasi**							**3,630.29**	**3,075.84**	**3,630.28**	**3,778.37**	**3,852.46**	**DJSEF**
Sasaran Kegiatan	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan APBN		80	80	80	80	80						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**3,630.29**	**3,075.84**	**3,630.28**	**3,778.37**	**3,852.46**	
	International Forum		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,075.46	1,652.55	2,075.46	2,160.14	2,202.47	
	National Forum		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00	-	1.00	1.04	1.06	
	International Tax Forum		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	550.00	212.49	550.00	572.44	583.66	
	Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional		1 Kegiatan	-	-	-	-	671.99	-	-	-	-	
	Forum Nasional Optimalisasi PNBP		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00	390.00	1.00	1.04	1.06	
	Forum dan Technical Assistance in Fiscal Formulation		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	330.84	410.00	330.83	344.30	351.09	
	Forum and Technical Asisstance for Regional Economy		-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	410.80	671.99	699.41	713.11	
Kegiatan	**7795 Komunikasi dan Edukasi**							**2,911.12**	**12,915.74**	**4,438.57**	**4,619.66**	**4,710.21**	**DJSPSK**
Sasaran Kegiatan	**Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan		100	100	100	100	100						
Output	**Konferensi dan Event**							**2,911.12**	**2,138.43**	**2,911.12**	**3,029.89**	**3,089.28**	
	Forum Internasional Keuangan Syariah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,743.53	450.60	1,743.53	1,814.67	1,850.23	
	Forum Internasional Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	481.24	334.44	481.24	500.87	510.69	
	Forum Internasional Literasi Keuangan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	686.35	427.91	686.35	714.35	728.35	
	Penyelenggaraan AARG Inspection Workshop and FSSG Workshop 2026		-	1 Kegiatan	-	-	-	-	925.48	-	-	-	
	Komunikasi Publik							**-**	**10,777.30**	**1,527.45**	**1,589.77**	**1,620.93**	
	Komite dan Sekretariat		-	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	-	10,777.30	1,527.45	1,589.77	1,620.93	
Kegiatan	**4770 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**470.04**	**510.01**	**470.04**	**489.21**	**498.80**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas insentif fiskal		85	85	85	85	85						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**470.04**	**510.01**	**470.04**	**489.21**	**498.80**	
	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanan		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	470.04	510.01	470.04	489.21	498.80	
Kegiatan	**4774 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**375.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DJPPR**
Sasaran Kegiatan	**Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru		100	-	-	-	-						
Output	**Pelayanan Publik Lainnya**							**375.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PU)		3 Dokumen	-	-	-	-	375.36	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	**7791 Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**5,888.66**	**9,337.50**	**5,888.65**	**6,128.91**	**6,249.04**	**DJSEF**
Sasaran Kegiatan	**Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat		85%	85%	85%	85%	85%						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**5,888.655**	**9,337.50**	**5,888.65**	**6,128.91**	**6,249.04**	
	Strategi di bidang Perpajakan		10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1,501.01	1,620.13	1,501.00	1,562.25	1,592.87	
	Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	2,590.90	1,501.90	2,590.90	2,696.61	2,749.46	
	Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	101.00	1,500.00	101.00	105.12	107.18	
	Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.00	1,465.61	1.00	1.04	1.06	
	Strategi Stablisasi Ekonomi		3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1,693.75	1,784.24	1,693.75	1,762.85	1,797.40	
	Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.00	1,465.62	1.00	1.04	1.06	
Kegiatan	**7794 Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi**							**5,118.78**	**18419.08**	**15,338.94**	**15,964.77**	**16,277.71**	**DJSPSK**
Sasaran Kegiatan	**Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan		100	100	100	100	100						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**5,118.78**	**9,536.64**	**8,104.21**	**8,434.86**	**8,600.22**	
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	770.82	1,139.69	770.82	802.27	818.00	
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	472.83	1,123.83	472.83	492.13	501.77	
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan		1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1,045.86	1,092.62	1,045.86	1,088.54	1,109.87	
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	1,450.41	395.88	1,450.41	1,509.59	1,539.17	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1,378.85	319.08	1,378.85	1,435.11	1,463.27	
	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	5,239.35	2,675.22	2,784.37	2,838.95	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perizinan Profesi Keuangan		-	150 Rekomendasi Kebijakan	150 Rekomendasi Kebijakan	150 Rekomendasi Kebijakan	150 Rekomendasi Kebijakan	-	226.20	310.21	322.86	329.19	
	Peraturan lainnya							**-**	**7.10**	**15.91**	**16.56**	**16.88**	
	Regulasi Profesi Keuangan		-	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	-	7.10	15.91	16.56	16.88	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							**-**	**8,875.33**	**7,218.82**	**7,513.35**	**7,660.61**	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan		-	227 Laporan	227 Laporan	227 Laporan	227 Laporan	-	8,875.33	7,218.82	7,513.35	7,660.61	
Program	**CC Pengelolaan Penerimaan Negara**							**2,369,115.49**	**1,997,068.48**	**2,364,123.07**	**2,460,552.37**	**2,508,766.21**	
Sasaran Program	**1. Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan**												
Indikator Kinerja Program	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan		10,24%	10,08% - 11,34%	10,29% - 12,41%	10,75% - 13,67%	11,52%- 15,00%						**DJP, DJBC**
	Rasio PNBP terhadap PDB		2,11%	1,63% - 2,38%	1,40% - 2,64%	1,36% - 2,84%	1,33% - 2,99%						**DJA**
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						**DJP**
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						**DJBC**
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJA)		100%	100%	100%	100%	100%						**DJA**
Sasaran Program	**2. Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif**												
Indikator Kinerja Program	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan		78%	79%	79%	79%	79%						**DJBC**
	Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik - (DJBC)		88	89	89	89	89						**DJBC**
	Tingkat efektivitas pengawasan PNBP (DJA)		85%	85%	86%	86%	86%						**DJA**
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (DJP)		86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%						**DJP**
	Waktu penahanan (dwell time) di Pelabuhan selama fase impor		2,90-2,85 hari	2,85-2,79 hari	2,79-2,72 hari	2,72-2,66 hari	2,66-2,60 hari						**LNSW**
Kegiatan	**4786 Perumusan Kebijakan Administratif**							**2,427.22**	**3,036.57**	**2,427.22**	**2,526.25**	**2,575.76**	**DJA**
Sasaran Kegiatan	**Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian rekomendasi harmonisasi peraturan dan kebijakan penganggaran		95	95	95	95	95						
	Indeks kualitas rumusan kebijakan penganggaran dan PNBP		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5						
Output	**Peraturan Pemerintah**							**654.37**	**974.17**	**654.37**	**681.07**	**694.42**	
	Peraturan Pemerintah terkait Bidang PNBP		6 PP	5 PP	5 PP	5 PP	5 PP	654.37	974.17	654.37	681.07	694.42	
	Peraturan Menteri							**374.30**	**440.84**	**374.30**	**389.57**	**397.20**	
	Peraturan Menteri terkait Bidang PNBP		7 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	374.30	440.84	374.30	389.57	397.20	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**208.19**	**206.88**	**208.19**	**216.69**	**220.93**	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian PNBP		6 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	208.19	206.88	208.19	216.69	220.93	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							**1,190.36**	**1,414.67**	**1,190.36**	**1,238.93**	**1,263.21**	
	Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBP		6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1,190.36	1,414.67	1,190.36	1,238.93	1,263.21	
Kegiatan	**4790 Perumusan Kebijakan Administratif**							**2,848.26**	**5,931.53**	**1,002.26**	**1,043.15**	**1,063.59**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan		80	80	80	80	80						
	Indeks kinerja reformasi hukum		85	85,5	85,5	85,5	85,5						
Output	**Peraturan Menteri**							**342.73**	**586.87**	**342.73**	**356.71**	**363.70**	
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peraturan Menteri terkait Bidang Teknis Kepabeanan		3 RPerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	197.71	296.40	197.71	205.78	209.81	
	Peraturan Menteri terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan		4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	145.02	146.39	145.02	150.93	153.89	
	Peraturan Menteri terkait Pengelolaan Penerimaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai		-	1 PerMen	-	-	-	-	144.08	-	-	-	
	Peraturan Lainnya							**659.53**	**448.46**	**659.53**	**686.44**	**699.89**	
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai		3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	254.99	109.50	254.99	265.40	270.60	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Teknis Kepabeanan		2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	77.16	103.12	77.16	80.31	81.88	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan		3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	95.01	98.82	95.01	98.89	100.82	
	Peraturan Lainnya terkait Pengelolaan Penerimaan		2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	168.35	73.00	168.35	175.22	178.65	
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	64.02	64.02	64.02	66.63	67.94	
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peraturan Lainnya terkait Audit Kepabeanan dan Cukai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**880.00**	**640.00**	**-**	**-**	**-**	
	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	
	Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB) (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	640.00	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							**966.00**	**4,256.20**	**-**	**-**	**-**	
	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)		1 rekomendasi	-	-	-	-	966.00	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Perluasan Basis Penerimaan - Bea Keluar Mineral (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	542.39	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Cukai akibat Peralihan Konsumsi Produk Hasil Tembakau Yang Lebih Murah (Downtrading) (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	1,229.17	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai dari Aspek Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal (PU)		-	1 rekomendasi	-	-	-	-	2,484.64	-	-	-	
Kegiatan	**4795 Perumusan Kebijakan Administratif**							**50,065.29**	**20,688.52**	**46,375.58**	**48,263.61**	**49,207.58**	**DJP**
Sasaran Kegiatan	**Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien**												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	NIlai Kinerja regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak		95%	-	-	-	-						
	Indeks kinerja reformasi hukum		-	95,5	95,5	95,5	95,5						
Output	**Peraturan lainnya**							**6,393.93**	**1,490.36**	**6,293.92**	**6,546.63**	**6,672.96**	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	200.00	36.50	200.00	208.16	212.23	
	Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional		3 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	600.16	36.50	600.16	624.65	636.89	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan		1 peraturan	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional		8 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	706.25	73.00	706.25	735.06	749.47	
	Peraturan terkait Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	487.52	249.71	487.51	507.40	517.35	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PBB		3 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	600.00	110.37	600.00	624.48	636.71	
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PPN dan PTLL		9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	9 peraturan	1,800.00	328.50	1,800.00	1,873.44	1,910.15	
	Peraturan Lainnya terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		2 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	400.00	73.00	400.00	416.32	424.48	
	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP		7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	7 peraturan	1,400.00	509.79	1,400.00	1,457.12	1,485.68	
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang PPh		-	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	2 peraturan	-	73.00	100.00	100.00	100.00	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**42,471.36**	**17,621.05**	**38,560.81**	**40,134.08**	**40,920.70**	
	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum		5 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	160.12	215.49	160.12	166.66	169.92	
	Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan		2 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	3,110.56	-	-	-	-	
	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan		3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	752.73	454.00	752.73	783.45	798.80	
	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,262.30	1,429.92	2,262.30	2,354.60	2,400.75	
	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	519.20	413.69	519.20	540.38	550.97	
	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	349.42	285.05	349.42	363.67	370.80	
	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	782.89	334.18	782.89	814.83	830.80	
	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,860.24	1,695.98	1,860.24	1,936.13	1,974.08	
	Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan		11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	11 kajian	528.56	207.19	528.56	550.13	560.91	
	Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan		4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	1,839.24	787.17	1,839.24	1,914.28	1,951.80	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian di Bidang Keberatan dan Banding		2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	1,661.25	1,224.10	1,661.25	1,729.03	1,762.92	
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggalian Potensi Wajib Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Yang Andal		10 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	14 rekomendasi kebijakan	4,366.46	1,810.63	4,366.46	4,544.61	4,633.69	
	Kajian terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan		5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	567.69	364.10	567.69	590.85	602.43	
	Kajian terkait Penyusunan/Penyempurnaan Proses Bisnis		69 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	72 rekomendasi kebijakan	20,513.70	5,562.67	17,513.70	18,350.66	18,769.13	
	Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak		7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	7 rekomendasi kebijakan	1,844.75	767.50	1,844.75	1,920.01	1,957.64	
	Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	552.26	259.22	552.26	574.79	586.06	
	Kebijakan di bidang Pendataan dan Pemetaan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	603.39	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kebijakan di Bidang Pengawasan Perpajakan		-	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	-	603.39	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kebiijakan di Bidang Penilaian Perpajakan		-	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	6 rekomendasi kebijakan	-	603.39	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PU)		1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	
	Peraturan Menteri							**1,200.00**	**644.11**	**1,200.00**	**1,248.96**	**1,273.44**	
	Peraturan Menteri terkait Bidang PPh		5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	5 PerMen	1,000.00	563.16	1,000.00	1,040.80	1,061.20	
	Regulasi Interkoneksi Data Pendukung Penanganan Tindak Pidana di Bidang Penerimaan Negara		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200.00	80.95	200.00	208.16	212.24	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**-**	**800.00**	**-**	**-**	**-**	
	Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PN)		-	1 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	800.00	-	-	-	
	Peraturan Pemerintah							**-**	**133.00**	**320.85**	**333.94**	**340.48**	
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh		-	1 PP	1 PP	1 PP	1 PP	-	133.00	320.85	333.94	340.48	
Kegiatan	**6611 Perumusan Kebijakan Administratif**							**7,355.52**	**4,277.56**	**6,052.86**	**6,276.95**	**6,388.99**	**LNSW**
Sasaran Kegiatan	**Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisian**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kajian integrasi proses bisnis		4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)						
	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program		85%	85%	85%	85%	85%						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**4,630.22**	**2,867.14**	**2,767.14**	**2,880.03**	**2,936.48**	
	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor		6 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	920.05	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor		2 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	423.04	-	-	-	-	
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW		2 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2,767.14	2,867.14	2,767.14	2,880.03	2,936.48	
	Pengelolaan Data SINSW		4 rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	520.00	-				
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							**-**	**560.43**	**560.43**	**560.43**	**560.43**	
	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor dan Logistik		-	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	-	560.43	560.43	560.43	560.43	
	Perjanjian							**2,725.30**	**850.00**	**2,725.30**	**2,836.49**	**2,892.08**	
	Perjanjian kerjasama di bidang Single Window		6 perjanjian	1 perjanjian	6 perjanjian	6 perjanjian	6 perjanjian	2,725.30	850.00	2,725.30	2,836.49	2,892.08	
Kegiatan	**4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi**							**589,605.38**	**573,829.06**	**589,605.38**	**613,661.28**	**625,689.04**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**1. Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan pengguna jasa		3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)						
	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai		80%	80,5%	80,5%	80,5%	80,5%						
	Tingkat efektivitas dukungan UMKM berorientasi ekspor		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan	**2. Komunikasi dan Edukasi yang efektif**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai		80 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)	80,5 (skala 100)						
	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi		78 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)	78,5 (skala 100)						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**698.80**	**664.89**	**698.80**	**727.31**	**741.56**	
	Pengembangan National Logistic Ecosystem		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	698.80	664.89	698.80	727.31	741.56	
	Sosialisasi dan Diseminasi							**13,635.81**	**8,815.73**	**13,635.81**	**14,192.15**	**14,470.32**	
	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)		56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	56.252 orang	13,635.81	8,815.73	13,635.81	14,192.15	14,470.32	
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							**105,484.47**	**95,780.65**	**105,484.47**	**109,788.23**	**111,940.08**	
	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai		85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	85.019 laporan	99,276.17	90,946.98	99,276.17	103,326.64	105,351.84	
	Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang		35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	35.330 laporan	6,208.30	4,833.67	6,208.30	6,461.59	6,588.24	
	Komunikasi Publik							**4,134.27**	**3,924.46**	**4,134.27**	**4,302.95**	**4,387.28**	
	Iklan Layanan Masyarakat		11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	11.301 kegiatan	4,134.27	3,924.46	4,134.27	4,302.95	4,387.28	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							**8,668.27**	**5,317.27**	**8,668.27**	**9,021.94**	**9,198.77**	
	Asistensi Di Bidang Cukai		18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	18 unit kerja	130.07	258.27	130.07	135.38	138.03	
	Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan		5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	125.00	115.23	125.00	130.10	132.65	
	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan		8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	8 unit kerja	118.05	172.77	118.05	122.86	125.27	
	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang		12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	12 unit kerja	532.36	472.23	532.36	554.08	564.94	
	Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum		6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja	94.86	176.29	94.86	98.73	100.67	
	Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		313 orang	313 orang	313 orang	313 orang	313 orang	2,080.47	1,862.98	2,080.47	2,165.35	2,207.79	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Internalisasi Peraturan/Kebijakan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai		90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	2,828.59	71.44	2,828.59	2,944.00	3,001.70	
	Asistensi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai		11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	11 unit kerja	2,307.09	1,786.73	2,307.09	2,401.22	2,448.28	
	Asistensi di bidang audit kepabeanan dan cukai		10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	286.79	401.33	286.79	298.49	304.34	
	Asistensi Di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		10 unit kerja	-	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	165.00	-	165.00	171.73	175.10	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							**3,215.50**	**12,300.60**	**3,215.50**	**3,346.69**	**3,412.29**	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai		19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	19 rekomendasi	1,010.42	10,320.25	1,010.42	1,051.64	1,072.25	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan		35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	380.76	564.20	623.22	648.65	661.36	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan		60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	60 rekomendasi	716.18	683.12	924.51	962.23	981.09	
	Sertifikasi AEO/MITA		27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	27 rekomendasi	421.07	563.31	421.07	438.25	446.84	
	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)		10 rekomendasi	-	-	-	-	242.46	-	-	-	-	
	Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	236.28	169.73	236.28	245.92	250.74	
	Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi (PU)		1 rekomendasi	-	-	-	-	208.33	-	-	-	-	
	Pelayanan Publik kepada UMKM							**-**	**753.54**	**-**	**-**	**-**	
	Klinik Ekspor		-	161 UMKM	-	-	-	-	753.54	-	-	-	
	Benda Meterai dan Cukai							**453,394.79**	**446,096.46**	**453,394.79**	**471,893.29**	**481,142.40**	
	Pita Cukai		182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	182.505.000 lembar	453,394.79	446,096.46	453,394.79	471,893.29	481,142.40	
	Pelayanan Publik kepada UMKM							**373.48**	**175.46**	**373.48**	**388.72**	**396.34**	
	Promosi Ekspor UMKM (PN)		50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	373.48	175.46	373.48	388.72	396.34	
Kegiatan	**4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi**							**133,441.32**	**90,565.37**	**133,441.30**	**138,885.72**	**141,607.88**	**DJP**
Sasaran Kegiatan	**Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP		100	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan		100	-	-	-	-						
	Persentase pemenuhan indeks kepuasan pelayanan DJP		-	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemenuhan indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan		-	100%	100%	100%	100%						
Output	**Koordinasi**							**11,344.15**	**4,011.88**	**11,344.15**	**11,806.99**	**12,038.42**	
	Koordinasi terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	-	45 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	5,464.13	2,613.13	5,464.13	5,687.07	5,798.54	
	Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional		4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1,428.52	510.29	1,428.52	1,486.80	1,515.95	
	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional		125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	125 kegiatan	3,874.93	636.89	3,874.93	4,033.02	4,112.07	
	Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional		5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	576.57	251.58	576.57	600.10	611.86	
	Kerja sama							**646.06**	**546.36**	**646.06**	**672.42**	**685.60**	
	Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya		10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	10 kesepakatan	646.06	546.36	646.06	672.42	685.60	
	Konferensi dan Event							**3,978.82**	**1,226.87**	**3,978.82**	**4,141.16**	**4,222.32**	
	Kemitraan Perpajakan Internasional		6 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	3,978.82	1,226.87	3,978.82	4,141.16	4,222.32	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Data dan Informasi Publik							**1,149.18**	**846.33**	**1,149.18**	**1,196.07**	**1,219.51**	
	Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1,149.18	846.33	1,149.18	1,196.07	1,219.51	
	Komunikasi Publik							**116,323.10**	**83,933.93**	**116,323.09**	**121,069.08**	**123,442.03**	
	Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan		23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	23 layanan	2,448.91	2,530.60	2,448.90	2,548.82	2,598.78	
	Layanan dan Konsultasi Perpajakan		1.073 kegiatan	772 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	1.073 kegiatan	33,119.29	16,033.68	33,119.29	34,470.56	35,146.18	
	Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan		14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	14 layanan	801.91	1,431.90	801.91	834.63	850.99	
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan		701.039 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	53.442 kegiatan	71,359.23	58,104.11	67,359.23	70,270.69	71,726.39	
	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	315.48	93.87	315.48	328.35	334.79	
	Pembinaan/Edukasi Publik		207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	207 kegiatan	566.01	475.18	566.01	589.10	600.65	
	Kehumasan Eksternal DJP		30 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	2,609.67	1,283.92	2,609.67	2,716.15	2,769.38	
	Publikasi online		17 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	544.02	79.21	544.02	566.21	577.31	
	Publikasi media Cetak		12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	853.34	491.39	853.34	888.15	905.56	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		12 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	22 kegiatan	3,034.49	1,880.65	3,034.49	3,158.30	3,220.20	
	Redesain dan peningkatan interkoneksi laman edukasi perpajakan		1 media	1 media	1 media	1 media	1 media	670.75	306.42	670.75	698.12	711.80	
	Pembuatan Aplikasi Mitra Inklusi Berbasis Website		-	1 media	1 media	1 media	1 media	-	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Pengukuran Indeks Literasi Perpajakan Nasional		-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Sentralisasi Layanan Perpajakan		-	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	-	123.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Pelaksanaan Inklusi pada pendidikan jenjang menengah secara bertahap di seluruh Indonesia yang berkelanjutan		-	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	-	300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Kegiatan	**6206 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi**							**908.71**	**651.27**	**908.71**	**945.78**	**964.32**	**DJA**
Sasaran Kegiatan	**Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara**												
Indikator Kinerja Kegiatan	- Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100	100	100	100						
Output	**Sosialisasi dan Diseminasi**							**908.71**	**651.27**	**908.71**	**945.78**	**964.32**	
	Diseminasi/Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (PU)		650 orang	400 orang	650 orang	650 orang	650 orang	908.71	651.27	908.71	945.78	964.32	
Kegiatan	**6610 Pelayanan, komunikasi, dan edukasi**							**720.60**	**770.95**	**720.60**	**750.00**	**764.70**	**LNSW**
Sasaran Kegiatan	**Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Informasi Publik		3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)						
Output	**Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]**							**720.60**	**770.95**	**720.60**	**750.00**	**764.70**	
	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Teknis LNSW		1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	720.60	770.95	720.60	750.00	764.70	
Kegiatan	**4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara**							**210,844.23**	**157,984.83**	**210,844.22**	**219,446.67**	**223,747.82**	**DJP**
Sasaran Kegiatan	**Penggalian Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifiikasi berdasarkan target kinerja organisasi (indikator pada RPJMN)		90%	90%	90%	90%	90%						
Output	**Data dan Informasi Publik**							**210,844.23**	**157,984.83**	**210,844.22**	**219,446.67**	**223,747.82**	
	Data dan Informasi Perpajakan		2 data	2 data	2 data	2 data	2 data	15,181.17	2,059.75	15,181.17	15,800.56	16,110.26	
	Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan		500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	537.50	432.03	537.50	559.43	570.39	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi		552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	552.378 dokumen	54,404.00	56,593.76	54,404.00	56,623.68	57,733.50	
	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data		654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	654.870 dokumen	140,721.56	98,899.29	140,721.55	146,463.00	149,333.67	
Kegiatan	**4785 Pengawasan dan Penegakan Hukum**							**2,474.29**	**2,500.00**	**2,474.29**	**2,575.24**	**2,625.72**	**DJA**
Sasaran Kegiatan	**Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program berdasarkan target yang ditetapkan		86%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kepatuhan atas regulasi PNBP		92%	92%	92%	92%	92%						
	Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)		90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%						
Output	**Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan**							**1,285.99**	**1,523.21**	**1,285.99**	**1,338.46**	**1,364.69**	
	Joint Program Penerimaan (PU)		3 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	1,134.34	1,523.21	1,134.34	1,180.62	1,203.76	
	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	151.65	-	-	-	-	
	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas)		-	-	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	-	-	151.65	157.84	160.93	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							**1,188.30**	**976.79**	**1,188.30**	**1,236.78**	**1,261.02**	
	Rekomendasi peningkatan kepatuhan instansi pengelola PNBP		4 rekomendasi	-	4 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	439.74	-	439.74	457.68	466.65	
	Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU)		2 rekomendasi	4 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	748.56	976.79	748.56	779.10	794.37	
Kegiatan	**4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum**							**321,032.90**	**308,563.20**	**322,878.90**	**336,052.36**	**342,638.99**	**DJBC**
Sasaran Kegiatan	**1. Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai		80%	80,5%	80,5%	80,5%	80,5%						
	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Task Force on Narcotics		75%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program - DJBC		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan	**2. Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal**												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%						
	Persentase efektivitas patroli dan operasi kepabeanan dan cukai		78%	78%	78%	78%	78%						
	Persentase efektivitas kegiatan patroli pengawasan NPP		73%	73%	73%	73%	73%						
Output	Operasi Bidang Keamanan							220,866.66	225,570.04	220,866.66	229,878.02	234,383.63	
	Pemberantasan Narkotika		102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	102 operasi	7,083.88	6,633.54	7,083.88	7,372.90	7,517.41	
	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)		2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	2 operasi	1,480.18	839.40	1,480.18	1,540.57	1,570.77	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Patroli Laut		466 operasi	466 operasi	466 operasi	466 operasi	466 operasi	41,514.80	42,297.66	41,514.80	43,208.61	44,055.49	
	Pengoperasian Kapal Patroli		173 operasi	173 operasi	173 operasi	173 operasi	173 operasi	170,787.80	175,799.44	170,787.80	177,755.94	181,239.95	
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							95,761.86	70,643.90	95,761.86	99,668.95	101,622.46	
	Laporan Hasil Audit (LHA)		186 laporan	186 laporan	186 laporan	186 laporan	186 laporan	9,359.27	11,907.14	9,359.27	9,741.13	9,932.06	
	Analysis Targetting		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	235.27	334.37	235.27	244.87	249.67	
	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan		4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	4.794 laporan	66,371.14	58,402.39	86,167.32	89,682.95	91,440.73	
	Joint Audit (LJA)		18 laporan	-	-	-	-	19,796.18	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,634.47	10,996.65	3,480.47	3,622.47	3,693.47	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai		8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	204.65	341.96	1,170.65	1,218.41	1,242.29	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	646.36	586.63	1,526.36	1,588.64	1,619.77	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	449.89	541.95	449.89	468.25	477.42	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	333.56	350.10	333.56	347.17	353.98	
	Laporan Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN		-	325 laporan	-	-	-	-	8,973.42	-	-	-	
	Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Pelatihan Unit Anjing Pelacak (K-9) Internasional (PU)		-	1 laporan	-	-	-	-	202.60	-	-	-	
	Operasi Bidang Keamanan							2,769.91	1,352.61	2,769.91	2,882.93	2,939.43	
	Joint Task Force On Illegal Goods (PN)		1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1,628.18	811.50	1,628.18	1,694.60	1,727.82	
	Sinergi Patroli Laut Bersama (PN)		1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1,141.74	541.11	1,141.74	1,188.32	1,211.61	
Kegiatan	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum							1,026,563.76	812,627.58	1,026,563.73	1,068,447.55	1,089,389.12	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan		83,75%	-	-	-	-						
	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi berdasarkan target yang ditetapkan (Indikator pada RPJMN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program berdasarkan target yang ditetapkan - DJP		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Penanganan Perkara							39,598.47	40,670.51	39,598.46	41,214.08	42,021.88	
	Dokumen Penagihan Aktif		2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	2.647.135 berkas perkara	39,598.47	40,670.51	39,598.46	41,214.08	42,021.88	
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan							244,893.67	209,156.25	244,893.67	254,885.34	259,881.10	
	Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak		68 laporan	70 laporan	70 laporan	70 laporan	70 laporan	150.62	101.31	150.62	156.77	159.84	
	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan		110.224 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	160.929 laporan	2,261.53	1,191.93	55,514.39	57,779.38	58,911.86	
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka pengawasan		1.332.426 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	1.988.610 laporan	55,514.39	50,369.94	102,233.19	106,608.30	108,795.83	
	Laporan Penilaian		14.772 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	16.508 laporan	107,233.19	96,031.08	19,488.54	20,283.67	20,681.23	
	Laporan Kegiatan Pengamatan		2.584 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	1.408 laporan	19,488.54	13,908.80	11,932.70	12,419.55	12,662.97	
	Data Digital Forensik Perpajakan dan Barang Bukti		80 laporan	85 laporan	85 laporan	85 laporan	85 laporan	11,932.70	7,948.84	2,261.53	2,353.80	2,399.93	
	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan		2.162 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	1.188 laporan	11,685.95	9,013.79	11,685.95	12,162.74	12,401.13	
	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)		560 laporan	546 laporan	546 laporan	546 laporan	546 laporan	9,332.45	8,632.00	9,332.45	9,713.22	9,903.60	
	Laporan Penyidikan Telah Selesai		109 laporan	117 laporan	117 laporan	117 laporan	117 laporan	23,672.35	16,430.88	23,672.35	24,638.18	25,121.09	
	Laporan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara (PU)		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,029.33	897.94	1,029.33	1,071.33	1,092.33	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)		15 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,023.33	100.00	1,023.33	1,065.08	1,085.96	
	Laporan Kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas negara (PU)		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1,569.29	956.15	1,569.29	1,633.32	1,665.33	
	Sertifikasi dan Penjaminan Keahlian Tenaga Forensik Digital		-	247 laporan	247 laporan	247 laporan	247 laporan	-	18.47	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Kolaborasi Penegakan Hukum yang optimal		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	1,699.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Joint Intelligence Perpajakan		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	527.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB)		-	102 laporan	102 laporan	102 laporan	102 laporan	-	524.15	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Joint Audit DJP-DJBC		-	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	-	803.79	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Benda Meterai dan Cukai							706,816.38	534,542.36	706,816.38	735,654.49	750,073.31	
	Benda Meterai		618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	618.588.981 keping	706,816.38	534,542.36	706,816.38	735,654.49	750,073.31	
	Sosialisasi dan Diseminasi							4,089.28	1,672.64	4,089.28	4,256.12	4,339.54	
	Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman Penegakan Hukum oleh APH		1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	3,437.08	1,417.61	3,437.08	3,577.31	3,647.43	
	Diseminasi dalam Rangka Pencegahan Dini Tindak Pidana di Bidang Perpajakan		100 orang	-	-	-	-	652.20	-	-	-	-	
	Diseminasi Penanganan Wajib Pajak yang Terindikasi Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan		-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	255.03	652.20	678.81	692.11	
	Perjanjian							1,158.92	469.98	1,158.92	1,206.21	1,229.85	
	Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum (PU)		2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	1,158.92	469.98	1,158.92	1,206.21	1,229.85	
	Data dan Informasi Publik							30,007.03	26,115.85	30,007.02	31,231.31	31,843.44	
	Data Digital SPT dan Selain SPT		6 data	6 data	6 data	6 data	6 data	26,783.50	25,586.27	26,783.50	27,876.27	28,422.64	
	Dokumen Risk Engine CRM dan BI Perpajakan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3,223.53	529.58	3,223.52	3,355.04	3,420.80	
Kegiatan	4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan							1,723.14	1,312.63	1,723.14	1,793.45	1,828.60	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak		55%	56%	56%	56%	56%						
Output	Penanganan Perkara							1,723.14	1,312.63	1,723.14	1,793.45	1,828.60	
	Putusan Penanganan Perkara		399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	399 perkara	706.84	489.08	706.84	735.67	750.09	
	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai		122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	122 perkara	1,016.31	823.55	1,016.31	1,057.77	1,078.50	
Kegiatan	6209 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan							19,104.90	14,329.41	19,104.89	19,884.37	20,274.10	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak		45%	46%	46%	46%	46%						
Output	Penanganan Perkara							19,104.90	14,329.41	19,104.89	19,884.37	20,274.10	
	Dokumen Penyelesaian Banding DJP		367.991 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	24.000 berkas perkara	5,796.87	2,974.47	5,796.87	6,033.39	6,151.63	
	SK Keberatan/Non Keberatan		691.616 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	472.450 berkas perkara	6,968.46	5,010.33	6,968.46	7,252.76	7,394.93	
	Dokumen Peninjauan Kembali DJP		2.474 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	3.660 berkas perkara	6,339.56	6,344.62	6,339.56	6,598.22	6,727.54	
Program	CB Pengelolaan Belanja Negara							48,200.34	24,406.80	42,393.96	43,944.87	44,720.3145	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program	Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJA)		85	85,5	86	86,5	87						***DJA***
	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)		85	85,5	86	86,5	87						***DJPK***
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara (DJA)		86	86,5	87	87,5	88						***DJA***
	Indeks ketimpangan antar wilayah		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27						***DJPK***
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah		6,10%	6,15%	6,35%	6,45%	6,50%						***DJPK***
	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara (DJPK)		86	86,5	87	87,5	88						***DJPK***
	Alokasi TKD untuk Infrastruktur		55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun						***DJPK***
	Persentase Kinerja Hibah Daerah		75%	75%	75%	75%	75%						***DJPK***
Kegiatan	4775 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							5,249.16	1,960.20	5,249.16	5,463.33	5,570.41	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100	100	100	100						
Output	Sosialisasi dan Diseminasi							1,636.98	733.68	1,636.98	1,703.77	1,737.16	
	Diseminasi/Sosialisasi terkait APBN		1,500 orang	1,500 orang	1,500 orang	1,500 orang	1,500 orang	1,636.98	733.68	1,636.98	1,703.77	1,737.16	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							3,612.18	1,226.52	3,612.18	3,759.56	3,833.24	
	Bimtek/Sosialisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat		1,300 orang	200 orang	1,300 orang	1,300 orang	1,300 orang	1,560.50	1,226.52	1,560.50	1,624.17	1,656.00	
	Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA)		245 orang	-	200 orang	200 orang	200 orang	630.28	-	630.28	655.99	668.85	
	Bimtek/Sosialisasi Kinerja Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat		1,800 orang	-	1,650 orang	1,650 orang	1,650 orang	1,421.40	-	1,421.40	1,479.39	1,508.39	
Kegiatan	4779 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							17,683.96	9,265.18	17,683.96	18,405.46	18,766.21	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen						
	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah		78	78	78	78	78						
	Tingkat Penguatan Local Taxing Power		70	80	80	80	80						
Output	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							13,519.27	6,416.07	13,519.27	14,070.86	14,346.65	
	Internship dan Secondment		70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	132.33	74.12	132.33	137.73	140.43	
	Pengelolaan Jafung		750 Orang	185 Orang	185 Orang	185 Orang	185 Orang	872.96	215.86	872.96	908.58	926.39	
	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa		560 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	868.00	677.48	868.00	903.41	921.12	
	Peningkatan Kapasitas dan Supervisi di Bidang PDRD		-	1,100 Orang	1,100 Orang	1,100 Orang	1,100 Orang	-	770.58	770.58	770.58	770.58	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Keuangan Desa		-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	339.05	339.05	339.05	339.05	
	Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah		-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	-	429.90	429.90	429.90	429.90	
	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)		300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	260.57	164.33	260.57	271.20	276.52	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)		11,500 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	3,700 Orang	11,385.42	3,744.76	9,845.90	10,310.42	10,542.68	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							1,778.06	1,709.78	1,778.06	1,850.60	1,886.87	
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)		1,150 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,250 Orang	1,778.06	1,709.78	1,778.06	1,850.60	1,886.87	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa							2,386.63	1,139.33	2,386.63	2,484.00	2,532.69	
	Bimtek BUMDes (PN)		2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,000 Desa	2,386.63	1,139.33	2,386.63	2,484.00	2,532.69	
Kegiatan	4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							11,450.93	3,538.48	8,011.75	8,338.63	8,502.07	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKDD												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,904.90	1,760.66	1,904.90	1,982.62	2,021.48	
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran		70 Rekomendasi Kebijakan	70 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	18 Rekomendasi Kebijakan	1,904.90	1,760.66	1,904.90	1,982.62	2,021.48	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							8,995.59	1,777.82	6,106.85	6,356.01	6,480.59	
	Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	4,182.78	1,361.76	4,182.78	4,353.43	4,438.76	
	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	292.18	239.36	292.18	304.10	310.06	
	Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pusat dan Daerah		3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	465.28	95.94	465.28	484.26	493.75	
	Laporan Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Program JKN		2 Laporan	-	-	-	-	2,888.74	-	-	-	-	
	Rekomendasi Hasil Monev Kinerja		8 Rekomendasi	1 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	1,166.62	80.75	1,166.62	1,214.21	1,238.01	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			-				550.44	-	-	-	-	
	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)		1 Kajian	-	-	-	-	550.44	-	-	-	-	
Kegiatan	4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD							2,405.19	2,159.76	2,405.19	2,503.32	2,552.38	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan TKD												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		100	100	100	100	100						
	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah		80	85	85	85	85						
Output	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,386.76	1,696.64	1,718.45	1,747.33	1,761.77	
	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	230.71	133.97	230.71	240.13	244.83	
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	362.51	412.82	362.51	377.30	384.70	
	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi		-	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	-	218.02	218.02	218.02	218.02	
	Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda dan Perda PDRD		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	457.94	457.94	457.94	457.94	
	Rekomendasi Kebijakan Analisis Penerimaan dan Pertumbuhan PDRD		-	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	-	159.60	159.60	159.60	159.60	
	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	544.40	115.71	115.71	115.71	115.71	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)		1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	114.64	139.26	114.64	119.32	121.66	
	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	134.49	59.32	59.32	59.32	59.32	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,018.43	463.12	686.74	755.99	790.62	
	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)		2 Rekomendasi	-	-	-	-	1,018.43	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)		-	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	463.12	686.74	755.99	790.62	
Kegiatan	4777 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Deviasi Akurasi Perencanaan kas pemerintah pusat		3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)	3,25 (Skala 4)						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara							185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	
	Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 99907) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908)		2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	185.61	8.10	185.61	193.19	196.97	
Kegiatan	4781 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD							3,328.58	2,636.12	3,030.49	3,075.28	3,097.68	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal		12	-	-	-	-						
	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD		100	-	-	-	-						
	Indeks deviasi akurasi perencanaan kas dan pengendalian SILPA		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25						
Output	Perencanaan dan Penganggaran							2,230.74	1,932.65	1,932.65	1,932.65	1,932.65	
	Rincian Alokasi DAU		1 Dokumen	-	-	-	-	296.60	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DAK Fisik		1 Dokumen	-	-	-	-	419.00	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DAK Nonfisik		1 Dokumen	-	-	-	-	182.23	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Hibah Daerah		1 Dokumen	-	-	-	-	356.80	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus		1 Dokumen	-	-	-	-	120.56	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Keistimewaan		1 Dokumen	-	-	-	-	166.62	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Dana Desa		1 Dokumen	-	-	-	-	222.16	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi Insentif Fiskal		1 Dokumen	-	-	-	-	154.50	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DBH SDA		1 Dokumen	-	-	-	-	156.14	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DBH Non SDA		1 Dokumen	-	-	-	-	156.14	-	-	-	-	
	Rincian Alokasi DTU		-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	594.48	594.48	594.48	594.48	
	Rincian Alokasi DTK		-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	539.04	539.04	539.04	539.04	
	Rincian Alokasi DDIOKK		-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	799.125	799.125	799.125	799.125	
	Pengelolaan Keuangan Negara							770.66	546.48	770.66	802.10	817.82	
	Laporan Keuangan TKD dan Hibah		1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	264.16	275.97	264.16	274.94	280.33	
	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	506.50	270.51	506.50	527.16	537.49	
	Perencanaan dan Penganggaran							327.19	157.00	327.19	340.54	347.21	
	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	327.19	157.00	327.19	340.54	347.21	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							2,915.50	1,934.13	2,915.50	3,034.45	3,093.93	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang Kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks implementasi penganggaran berbasis kinerja		90	90	90	90	90						
Output	Peraturan Presiden							268.04	164.20	268.04	278.97	284.44	
	Peraturan Presiden Bidang Penganggaran		1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	1 PerPres	268.04	164.20	268.04	278.97	284.44	
	Peraturan Menteri							568.08	134.19	568.08	591.26	602.85	
	Peraturan Menteri Bidang Penganggaran		4 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	488.74	134.19	488.74	508.68	518.65	
	Peraturan Menteri terkait Anggaran BA BUN		1 PerMen	-	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	79.34	-	79.34	82.58	84.20	
	Peraturan lainnya							35.33	-	35.33	36.77	37.49	
	Peraturan Lainnya Bidang Penganggaran		1 Peraturan	-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	35.33	-	35.33	36.77	37.49	
	Perencanaan dan Penganggaran							2,044.05	1,635.74	2,044.05	2,127.45	2,169.14	
	Pagu Indikatif		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	215.55	231.30	215.55	224.34	228.74	
	Pagu Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216.55	208.20	216.55	225.39	229.80	
	Pagu Alokasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222.17	223.20	222.17	231.23	235.77	
	DIPA		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,265.60	973.04	1,265.60	1,317.23	1,343.05	
	Dokumen Anggaran BA-BUN		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124.18	-	124.18	129.25	131.78	
Kegiatan	4782 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD							4,981.41	2,904.84	2,912.30	2,931.21	2,940.67	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD yang Kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		86	-	-	-	-						
	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	90	90	90	90						
Output	Peraturan Presiden							149.50	150.05	149.50	155.60	158.65	
	Perpres Juknis DAK		1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	1 R. Perpres	149.50	150.05	149.50	155.60	158.65	
	Peraturan Menteri							239.53	271.68	239.53	249.30	254.19	
	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa		5 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	239.53	271.68	239.53	249.30	254.19	
	Peraturan Lainnya							74.56	253.40	293.56	296.60	298.12	
	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	74.56	34.40	74.56	77.60	79.12	
	KMK terkait Dana Transfer ke Daerah		-	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	6 Rancangan Peraturan	-	219.00	219.00	219.00	219.00	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							4,517.82	2,229.71	2,229.71	2,229.71	2,229.71	
	Rekomendasi Kebijakan DAU		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,909.29	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,139.34	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	172.53	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	172.53	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	230.16	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	111.56	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	216.11	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	342.00	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DBH SDA		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	112.15	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	112.15	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Transfer Umum		-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	-	570.15	570.15	570.15	570.15	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Transfer Khusus		-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	-	373.61	373.61	373.61	373.61	
	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		-	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	-	870.90	870.90	870.90	870.90	
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan IKN		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	415.05	415.05	415.05	415.05	
Program	CD Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							238,139.79	289,232.57	231,105.32	243,616.11	248,892.53	
Sasaran Program	1.Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang - DJPb		3,25 (skala 4)	3,26 (skala 4)	3,27 (skala 4)	3,28 (skala 4)	3,29 (skala 4)						***DJPB***
	Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN - DJPb		98,8	98,8	98,8	98,8	98,8						***DJPB***
Sasaran Program	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan												
Indikator Kinerja Program	Indeks Pengelolaan Aset		3,00	3,10	3,20	3,30	3,40						***DJKN***
	Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara		100%	100%	100%	100%	100%						***DJKN***
	Indeks Efektivitas Kebijakan Investasi - Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%							***DJKN***

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program	3. Pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif dan risiko yang prudent												
Indikator Kinerja Program	Imbal Hasil (Yield) SBN		7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0						***DJPPR***
	Rasio utang terhadap PDB - DJPPR		39,43	39,13-39,85	39,08-39,62	39,04-39,29	38,55-38,64						***DJPPR***
	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali - DJPPR		100	100	100	100	100						***DJPPR***
	Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik - DJPPR		100	100	100	100	100						***DJPPR***
	Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang - DJPPR		3,25 (Skala 4)	3,26 (Skala 4)	3,27 (Skala 4)	3,28 (Skala 4)	3,29 (Skala 4)						***DJPPR***
Kegiatan	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							9,306.49	7,442.89	9,306.49	9,686.20	9,876.05	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		-	74	75	76	77						
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		100	-	-	-	-						
Output	Sosialisasi dan Diseminasi							9,306.49	7,442.89	9,306.49	9,686.20	9,876.05	
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara		1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	5,781.37	5,667.52	5,781.37	6,017.25	6,135.19	
	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara		1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1,525.59	1,052.33	1,525.59	1,587.84	1,618.96	
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang		2123 orang	2123 orang	1.037 orang	795 orang	580 orang	1,999.52	723.04	1,999.52	2,081.10	2,121.89	
Kegiatan	4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							8,788.03	12,367.24	8,788.03	9,146.58	9,325.85	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		-	100%	100%	-	-						
	Persentase Produktivitas lelang		-	80%	80%	80%	80%						
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		100%	-	-	-	-						
Output	Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko							8,788.03	12,367.24	8,788.03	9,146.58	9,325.85	
	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi		19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	5,669.74	8,850.60	5,669.74	5,901.07	6,016.73	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara		27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	1,607.42	2,664.56	1,607.42	1,673.01	1,705.80	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang		199 Rekomendasi	199 Rekomendasi	180 Rekomendasi	109 Rekomendasi	57 Rekomendasi	1,244.74	692.28	1,244.74	1,295.53	1,320.92	
	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)		4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	96.51	67.63	96.51	100.45	102.41	
	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	169.61	92.17	169.61	176.53	179.99	
Kegiatan	4798 Pengelolaan Aset							93,049.19	203,053.38	93,049.19	96,845.59	98,743.77	***DJKN***

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		-	100%	100%	100%	100%						
	Persentase realisasi pokok lelang		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase evaluasi kinerja BMN		-	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas layanan penilaian		70%	72%	74%	76%	78%						
	Indeks efektivitas kinerja SMV		100	100	100	100	100						
Output	Peraturan Lainnya							21,376.32	34,939.72	16,011.12	16,664.38	16,991.00	
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara		11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	14,493.67	25,547.60	11,707.18	12,184.84	12,423.66	
	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara		9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	6,882.65	9,392.12	4,303.94	4,479.54	4,567.34	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							4,460.82	11,585.07	5,308.85	5,525.46	5,633.75	
	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	270.58	133.01	60.95	63.44	64.68	
	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	135.21	75.57	34.63	36.04	36.75	
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset		26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	2,822.30	6,181.69	2,832.76	2,948.34	3,006.12	
	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		-	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	-	3,467.00	1,588.75	1,653.57	1,685.98	
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	998.90	1,026.61	470.44	489.64	499.24	
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	233.83	315.97	144.79	150.70	153.66	
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	339.31	155.49	161.83	165.00	
	Rekomendasi Dukungan APBN kepada BUMN		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	45.91	21.04	21.90	22.33	
	Pelayanan Publik Lainnya							2,043.95	6,816.84	3,123.82	3,251.27	3,314.99	
	Risalah Lelang		34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	2,043.95	2,149.12	984.83	1,025.02	1,045.11	
	Laporan Penilaian		-	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	-	4,667.72	2,138.98	2,226.25	2,269.89	
	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN							183.08	95.00	43.53	45.31	46.20	
	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan		5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	183.08	95.00	43.53	45.31	46.20	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							4,416.72	2,977.01	1,364.21	1,419.87	1,447.70	
	Pengelolaan Jafung		550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	490.84	374.22	171.49	178.48	181.98	
	Sertifikasi Penilai Pemerintah		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	436.91	520.32	238.43	248.16	253.03	
	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	569.97	448.78	205.65	214.04	218.24	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang		1.963 Orang	1.963 Orang	473 Orang	508 Orang	543 Orang	2,433.23	567.87	260.23	270.84	276.15	
	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah		37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	485.77	1,065.83	488.42	508.34	518.31	
	Perencanaan dan Penganggaran							74.25	37.16	17.03	17.73	18.07	
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga		86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	74.25	37.16	17.03	17.73	18.07	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							12,349.56	41,515.95	19,024.68	19,800.89	20,188.98	
	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan		4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	225.30	302.91	138.81	144.47	147.30	
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara		273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	3,880.97	25,883.08	11,860.92	12,344.84	12,586.80	
	Rekomendasi Hasil Penilaian		188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	2,615.63	5,209.56	2,387.28	2,484.68	2,533.38	
	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara		12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	1,084.70	1,599.76	733.09	763.00	777.96	
	Penggalian Potensi Lelang		176 Rekomendasi	176 Rekomendasi	266 Rekomendasi	277 Rekomendasi	286 Rekomendasi	3,822.47	2,731.60	1,251.75	1,302.83	1,328.36	
	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang		40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	195.28	109.08	49.99	52.03	53.05	
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)		-	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	27.090 Rekomendasi	-	5,262.41	2,411.50	2,509.89	2,559.08	
	Peta Tematik BMN (PU)		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	525.21	417.55	191.34	199.15	203.05	
	Pengelolaan Aset BUN							41,561.66	42,223.88	19,349.09	20,138.53	20,533.24	
	Aset BUN yang Dikelola		3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	3.284 Aset	41,561.66	42,223.88	19,349.09	20,138.53	20,533.24	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3,387.09	1,868.31	856.15	891.09	908.55	
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1,171.62	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1,056.45	484.12	503.87	513.74	
	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1,509.20	811.87	372.04	387.22	394.81	
	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	706.28	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							-	60,994	27,951	29,091	29,661	
	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)		-	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	175 Rekomendasi	-	60,994.45	27,950.70	29,091.09	29,661.27	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							3,195.75	-	-	-	-	
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)		27.090 Rekomendasi	-	-	-	-	3,195.75	-	-	-	-	
Kegiatan	4799 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara							1,167.17	518.38	1,167.17	1,214.79	1,238.60	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas belanja dan investasi		-	100	100	100	100						
	Indeks deviasi perencanaan kas pemerintah pusat		3.25	-	-	-	-						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,167.17	518.38	1,167.17	1,214.79	1,238.60	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)		3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	75.81	17.84	75.81	78.90	80.45	
	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	43.52	43.75	43.52	45.30	46.19	
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan		21 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1,038.84	456.78	1,038.84	1,081.22	1,102.41	
	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah		4 Rekomendasi Kebijakan	-	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	9.00	-	9.00	9.37	9.55	
Kegiatan	4800 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							272.12	138.87	272.12	283.22	288.77	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN		-	92	92.5	93	93.5						
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian LBMN		82	-	-	-	-						
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		91	-	-	-	-						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara							272.12	138.87	272.12	283.22	288.77	
	Laporan Barang Milik Negara		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35.00	15.00	35.00	36.42	37.14	
	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144.00	30.27	144.00	149.88	152.81	
	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	93.13	93.60	93.13	96.92	98.82	
Kegiatan	4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif							2,228.57	2,129.80	2,228.57	2,319.50	2,364.96	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95.5	95.5	95.5	95.5						
	Nilai kinerja regulasi		85	-	-	-	-						
Output	Undang-Undang							976.75	1,019.25	976.75	1,016.60	1,036.52	
	RUU terkait Penilai		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	191.05	430.80	191.05	198.84	202.74	
	RUU terkait Perlelangan		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	369.83	493.96	369.83	384.92	392.47	
	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	415.86	94.50	415.86	432.83	441.31	
	Peraturan Pemerintah							318.32	51.20	318.32	331.31	337.80	
	RPP Penetapan Investasi Pemerintah		12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	318.32	51.20	318.32	331.31	337.80	
	Peraturan Menteri							489.58	379.52	489.58	509.55	519.54	
	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	489.58	379.52	489.58	509.55	519.54	
	Peraturan Lainnya							145.39	304.16	145.39	151.32	154.29	
	Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	6 Peraturan	5 Peraturan	145.39	304.16	145.39	151.32	154.29	
	Perizinan Lembaga							80.00	80.00	80.00	83.26	84.90	
	Perizinan Balai Lelang		10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	80.00	80.00	80.00	83.26	84.90	
	Perizinan Profesi							218.53	295.68	218.53	227.45	231.91	
	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II		187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	218.53	295.68	218.53	227.45	231.91	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4807 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							1,730.98	332.76	750.10	863.57	893.99	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas komunikasi kebijakan publik												
Indikator Kinerja Kegiatan	Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100	100	100	100						
Output	Forum							138.29	28.76	101.11	116.41	120.51	
	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah		2 forum	2 forum	2 forum	2 forum	2 forum	138.29	28.76	101.11	116.41	120.51	
	Data dan Informasi Publik							152.00	43.10	79.73	91.79	95.03	
	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat		14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	14 publikasi	152.00	43.10	79.73	91.79	95.03	
	Sistem Informasi Pemerintahan							744.78	-	-	-	-	
	Modernisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi Dalam Rangka Transformasi Layanan Setelmen Pembiayaan		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	744.78	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							244.71	66.40	178.92	205.98	213.24	
	Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung		15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	15 K/L	244.71	66.40	178.92	205.98	213.24	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							451.20	194.50	390.34	449.39	465.22	
	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor		13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	392.68	178.70	345.30	397.54	411.54	
	Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	58.52	15.80	45.04	51.85	53.68	
Kegiatan	4808 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara							22,470.90	13,116.99	19,585.02	22,547.66	23,341.72	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan		100	100	100	100	100						
	Tingkat Efektifitas Kerjasama Kelembagaan		100	100	100	100	100						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							918.34	1,016.36	1,333.77	1,535.53	1,589.60	
	Pengembangan Tools Debt Service Calculator (DSC) (PU)		0 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	388.76	465.74	536.19	555.07	
	Kajian atas Revisi Penggunaan Progress Variant (PV) sebagai Formula Project Rating atas Kegiatan yang Dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah (PU)		0 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	352.40	557.73	642.10	664.71	
	Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing Roadmap) 2025–2029		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	459.43	275.20	310.30	357.24	369.82	
	Penyusunan Model/Framework Analisis Kesinambungan Daya Serap Pasar SBN Domestik (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	217.36	-	-	-	-	
	Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN (PU)		2 Kajian	-	-	-	-	241.55	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,766.20	1,158.55	1,262.89	1,453.93	1,505.13	
	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang		44 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	950.00	131.03	542.66	624.74	646.74	
	Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang		32 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	417.77	712.56	324.54	373.63	386.79	
	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko		8 Rekomendasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	398.43	314.96	395.70	455.55	471.60	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							16,174.03	9,322.35	13,859.40	15,955.92	16,517.83	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyusunan rekomendasi kebijakan creative financing untuk pembiayaan proyek SBSN (PU)		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	409.16	819.87	943.89	977.13	
	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	386.63	200.00	282.68	325.44	336.90	
	Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	949.75	450.00	694.41	799.45	827.60	
	Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai Sumber Dana Lainnya Untuk Akum		1 Dokumen	-	-	-	-	295.18	-	-	-	-	
	Penyusunan SDG Bond Allocation and Impact Report (PU)		1 Dokumen	-	-	-	-	612.57	-	-	-	-	
	Evaluasi dan Pengembangan Pricing Model SBSN		1 Dokumen	-	-	-	-	219.90	-	-	-	-	
	Profiling Donor dan Pemetaan Sebaran Proyek yang Dibiayai Hibah (PU)		1 Dokumen	-	-	-	-	861.98	-	-	-	-	
	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur		45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	2,359.83	1,218.18	2,460.57	2,832.79	2,932.55	
	Register Pinjaman dan Hibah		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	101.64	100.14	74.31	85.56	88.57	
	Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	322.13	346.90	270.85	311.83	322.81	
	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02		9 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	278.14	161.84	221.89	255.45	264.45	
	Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	122.64	62.12	98.63	113.56	117.55	
	Pengelolaan underlying aset dan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh SBSN		24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	211.80	100.12	170.34	196.11	203.02	
	Penerbitan SBSN		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	745.75	338.24	664.61	765.15	792.09	
	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN		42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	653.71	713.93	551.45	634.87	657.23	
	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor		5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	24.10	127.49	19.38	22.32	23.10	
	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	939.56	573.30	733.37	844.30	874.04	
	Perjanjian Pinjaman dan Hibah		129 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	694.18	693.92	588.16	677.13	700.98	
	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah		21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	359.44	73.52	311.42	358.53	371.16	
	Penguatan Hubungan Kelembagaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	800.00	800.00	1,133.27	1,304.70	1,350.65	
	Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara		32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	1,334.90	538.97	921.62	1,061.04	1,098.40	
	Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor		12 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	2,543.58	833.76	1,348.08	1,552.00	1,606.66	
	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	936.51	579.67	684.72	788.30	816.06	
	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN		36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	420.10	258.99	353.23	406.66	420.99	
	Penyusunan Impact Report dan Pembiayaan Proyek Budget Tagging Melalui SUN Tematik		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	742.11	1,456.52	1,676.85	1,735.90	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,626.06	1,000.00	1,188.88	1,368.72	1,416.93	
	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	400.00	400.00	292.46	336.70	348.56	
	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1,226.06	600.00	896.42	1,032.03	1,068.37	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							1,986.28	619.73	1,940.09	2,233.57	2,312.22	
	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	887.90	256.69	664.39	764.89	791.83	
	Pembangunan Sistem Pemesanan dan Pengembangan Desain Integrasi Channel Social Fund Linked Sukuk (PN)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,098.38	363.04	1,275.70	1,468.68	1,520.40	
Kegiatan	4809 Pengelolaan risiko Keuangan Negara							5,386.60	2,732.48	4,981.60	5,735.17	5,937.14	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Produktif dengan Risiko yang Terkendali												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara		100	100	100	100	100						
Output	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							4,524.53	2,369.88	4,325.42	4,979.73	5,155.10	
	Pembiayaan Risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Bencana Alam (PU)		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	132.12	274.13	315.60	326.72	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJ		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	585.20	327.49	517.27	595.51	616.49	
	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara		12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	784.27	464.41	604.47	695.91	720.42	
	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	664.49	440.27	696.62	802.00	830.24	
	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	611.33	444.76	782.20	900.53	932.24	
	Implementasi Risiko Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Kontinjensi, Dan Neraca (Risiko A		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	361.73	173.23	251.54	289.59	299.79	
	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi		36 Rekomendasi	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	1,517.52	387.61	1,199.19	1,380.59	1,429.21	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							862.07	362.60	656.18	755.44	782.05	
	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	206.62	72.81	151.07	173.92	180.05	
	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	260.44	147.29	209.46	241.14	249.64	
	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	395.01	142.49	295.66	340.38	352.37	
Kegiatan	4810 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							99.13	323.10	235.81	271.48	281.04	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN		91%	92%	92%	92%	92%						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara							99.13	323.10	235.81	271.48	281.04	
	Laporan Statistik Utang, Hibah, dan Pembiayaan Lainnya		38 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	99.13	98.36	53.40	61.48	63.65	
	Laporan Keuangan Utang, Hibah, dan Pembiayaan Lainnya		0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0.00	224.74	182.41	210.00	217.39	
Kegiatan	4811 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							3,291.63	-	-	-	-	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		93%	-	-	-	-						
	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN		4	-	-	-	-						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara							3,291.63	-	-	-	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan BA BUN dan LKPP		4 Laporan	-	-	-	-	3,291.63	-	-	-	-	
Kegiatan	6212 - Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							43,262.21	21,292.51	43,262.20	45,027.30	45,909.84	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan		4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks	4 (skala 5) Indeks						
	Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan		100%	-	-	-	-						
	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara		3,3 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks	3,25 (skala 4) Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L		90 (Nilai)	-	-	-	-						
	Indeks kualitas nilai IKPA K/L		-	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks	3 (skala 4) Indeks						
	Indeks kinerja penyaluran dana transfer ke daerah		-	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks						
Output	Sosialisasi dan Diseminasi							4,156.93	1,402.13	4,156.92	4,326.53	4,411.33	
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah		400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	2,104.86	624.34	2,104.86	2,190.74	2,233.68	
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	957.74	286.743	957.74	996.82	1,016.35	
	Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	6.66	3.658	6.66	6.93	7.07	
	Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah		245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	245 Orang	722.73	333.075	722.73	752.22	766.96	
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	364.93	154.314	364.93	379.82	387.27	
	Komunikasi Publik							4,220.80	2,369.37	4,220.80	4,393.00	4,479.11	
	Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay		218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	218 kegiatan	4,220.80	2,369.37	4,220.80	4,393.00	4,479.11	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							12,562.17	4,791.63	12,562.17	13,074.72	13,330.98	
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi		19.998 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	16.055 Unit Kerja	6,893.15	2,659.68	6,893.15	7,174.39	7,315.00	
	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU		3.720 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	4.664 Orang	1,900.07	1,083.43	1,900.07	1,977.59	2,016.35	
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	584.65	123.2	584.65	608.50	620.43	
	Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS		248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	248 Unit kerja	46.08	24.3	46.08	47.96	48.90	
	Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa		173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	173 unit Kerja	1,787.64	665.709	1,787.64	1,860.58	1,897.05	
	Penajaman Metode Analytical BLU		1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	1 unit Kerja	128.95	7.92	128.95	134.22	136.85	
	Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan		19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	19.213 Orang	1,221.63	227.394	1,221.63	1,271.48	1,296.40	
	Pengelolaan Keuangan Negara							8,936.80	3,700.73	8,936.79	9,301.41	9,483.73	
	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN		744 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	740 Laporan	6,890.70	3,016.73	6,890.70	7,171.84	7,312.41	
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)		273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	273 Laporan	706.45	415.358	706.45	735.27	749.69	
	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN		356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	356 Laporan	1,339.64	268.641	1,339.64	1,394.30	1,421.63	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							13,306.56	8,957.24	13,306.56	13,849.46	14,120.91	
	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran		273 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	2,947.75	1,288.39	2,947.75	3,068.02	3,128.15	
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas		10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	360.69	259.991	360.69	375.40	382.76	
	Konsultasi Pencairan Dana		1.792 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	1.802 Kegiatan	9,998.12	7,408.86	9,998.12	10,406.04	10,610.00	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							78.96	71.42	78.96	82.18	83.79	
	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)		100.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	50.000 Dokumen	78.96	71.416	78.96	82.18	83.79	
Kegiatan	6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							26,307.65	15,124.73	26,307.65	27,381.00	27,917.66	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pencapaian tugas khusus yang efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas kinerja BLU sesuai hasil Performance Metrics		3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks	3 (skala 5) Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU		100%	-	-	-	-						
	Persentase Pencapaian Target Kinerja BLU		-	100%	100%	100%	100%						
	Indeks pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman		3 (Indeks)	-	-	-	-						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,780.67	874.40	1,780.67	1,853.33	1,889.65	
	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah		67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	67 Kajian	1780.674	874.398	1,780.67	1,853.33	1,889.65	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							2,027.40	268.94	2,027.40	2,110.12	2,151.47	
	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan		1.806 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	1703 Orang	2027.398	268.938	2,027.40	2,110.12	2,151.47	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							13,095.49	8,804.19	13,095.49	13,629.80	13,896.93	
	Monev Pengelolaan Kas Negara		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	424.09	311.312	424.09	441.39	450.04	
	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	245.79	139.214	245.79	255.82	260.83	
	Rekomendasi atas Peningatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah		8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	2,477.63	939.275	2,477.63	2,578.72	2,629.26	
	Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	98.65	30.803	98.65	102.68	104.69	
	ALCo Regional		34 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	3,331.61	2,743.21	3,331.61	3,467.54	3,535.50	
	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah		437 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	435 Rekomendasi	4,392.77	2,938.84	4,392.77	4,572.00	4,661.61	
	Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2,124.95	1,701.54	2,124.95	2,211.65	2,255.00	
	Pengelolaan Keuangan Negara							28.99	8.15	28.99	30.17	30.76	
	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.99	8.153	28.99	30.17	30.76	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							9,375.10	5,169.05	9,375.10	9,757.60	9,948.85	
	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas		246 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,332.90	5.322	1,332.90	1,387.28	1,414.47	
	Rekomendasi atas Pelaksanaan Disbursement		4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	36.00	-	36.00	37.47	38.20	
	Reviu Belanja Pemerintah		319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	319 dokumen	8,006.20	5,163.73	8,006.20	8,332.85	8,496.18	
Kegiatan	6214 Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara							5,505.44	1,403.26	5,505.44	5,730.05	5,842.37	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas		3 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks	3,2 (skala 4) Indeks						
Sasaran Kegiatan	Penyaluran dana investasi yang optimal dan tepat sasaran												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase imbal hasil dana kelolaan		100%	100%	100%	100%	100%						
	Indeks kinerja penyaluran investasi dan subsidi		-	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks	4 (Skala 5) Indeks						
Output	Perjanjian							98.95	25.75	98.95	102.98	105.00	
	Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP		2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	2 Perjanjian	80.95	13.6	80.95	84.25	85.9	
	Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah		15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	15 Perjanjian	18	12.15	18	18.73	19.1	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,793.15	595.77	1,793.15	1,866.31	1,902.89	
	Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah		41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	1,553.69	595.765	1553.69	1617.08	1648.77	
	Rekomendasi Outstanding Pinjaman		38 Rekomendasi	0 Rekomendasi	38 Rekomendasi	38 Rekomendasi	38 Rekomendasi	59.46	-	59.46	61.89	63.1	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OIP)		2 Rekomendasi	0 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	180	-	180	187.34	191.02	
	Pengelolaan Keuangan Negara							2.22	-	2.22	2.31	2.36	
	Konsolidasi LK K/L dan LK BUN		39 Laporan	0 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	2.22	-	2.22	2.31	2.36	
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan							2,156.47	433.30	2,156.48	2,244.45	2,288.45	
	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		241 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	751.675	29.777	751.68	782.34	797.68	
	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana		472.572 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	466.868 Dokumen	611.47	200.25	611.47	636.42	648.89	
	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara		5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	5.500.000.000 Dokumen	793.327	203.27	793.33	825.69	841.88	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,454.65	348.45	1,454.65	1,514.00	1,543.67	
	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,454.65	348.45	1454.65	1514	1543.67	
Kegiatan	6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara							3,681.04	1,927.63	3,681.03	3,831.22	3,906.31	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP		96%	-	-	-	-						
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		92%	-	-	-	-						
	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Pengelolaan Keuangan Negara							3,681.04	1,927.63	3,681.03	3,831.22	3,906.31	
	Government Financial Statistic (GFS)		152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	152 Laporan	1,411.89	721.305	1411.89	1469.49	1498.3	
	Laporan Keuangan BUN		873 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	876 Laporan	1,510.80	1,042.40	1510.8	1572.44	1603.26	
	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	724.363	143.56	724.36	753.92	768.69	
	Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	33.984	20.372	33.98	35.37	36.06	
Kegiatan	6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif							9,641.26	6,140.81	9,641.26	10,034.61	10,231.28	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan perbendaharaan yang berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi		85 (Nilai)	-	-	-	-						
	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan		-	90,25 Indeks	90,25 Indeks	90,25 Indeks	90,25 Indeks						
Output	Undang-Undang							573.38	330.47	573.38	596.77	608.47	
	RUU P2 APBN		1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	1 UU	573.379	330.47	573.38	596.77	608.47	
	Peraturan Pemerintah							80.54	346.94	80.54	83.82	85.46	
	RPP Pelaksanaan Anggaran		1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	80.535	80.54	80.54	83.82	85.46	
	RPP Investasi Pemerintah		-	1 PP	-	-	-	-	266.4	-	-	-	
	Peraturan Menteri							1,060.36	457.66	1,060.36	1,103.62	1,125.25	
	Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	3 PerMen	504.96	207.59	504.96	525.56	535.86	
	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	30 PerMen	514.80	231.12	514.8	535.8	546.31	
	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah		4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	4 PerMen	40.60	18.95	40.6	42.26	43.08	
	Peraturan lainnya							5165.73	3,790.17	5,165.73	5,376.49	5,481.86	
	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah		9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	3820.33	3,374.60	3820.33	3976.2	4054.13	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	267.31	108.17	267.31	278.22	283.67	
	Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	68.50	68.25	68.5	71.29	72.69	
	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	433.29	232.36	433.29	450.97	459.81	
	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah		2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	576.30	6.8	576.3	599.81	611.56	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							2761.25	1,215.57	2,761.25	2,873.91	2,930.24	
	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	128.80	12.00	128.8	134.06	136.68	
	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan		34 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	41 Rekomendasi	256.24	186.24	256.24	266.69	271.92	
	Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2263.40	859.29	2263.4	2355.75	2401.92	
	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	112.81	158.05	112.81	117.41	119.72	
Kegiatan	6217 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							1,951.39	1,187.74	2,343.64	2,698.16	2,793.18	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek Pemerintah		100	100	100	100	100						
	Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek		89	89	89	89	89						
Output	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,951.39	1,187.74	2,343.64	2,698.16	2,793.18	
	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)		13 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	565.841	154.057	190.943	219.828	227.569	
	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman Dan Hibah		16 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	1385.546	1033.681	2152.697	2478.336	2565.615	
Program	WA Dukungan Manajemen							50,480,781.02	49,615,259.82	51,941,101.66	52,978,008.61	53,497,985.13	
Sasaran Program	1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (SETJEN)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJP)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (LNSW)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJSEF)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPPR)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (BPPK)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJA)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (BPPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (Setjen)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (LNSW)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJKN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPB)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (ITJEN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJA)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJSEF)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJPPR)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (BaTII)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (LNSW)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BaTII)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJA)		100	100	100	100	100						
Sasaran Program	2. Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara												
Indikator Kinerja Program	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (BaTII)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJKN)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJPB)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (LNSW)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJP)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJBC)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100%	-	-	-	-						
Sasaran Program	3. Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi												
Indikator Kinerja Program	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (ITJEN)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJP)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPK)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJBC)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (LNSW)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJA)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJSPSK)		100	100	100	100	100						
	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (BPPK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJBC)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJKN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (LNSW)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJPB)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJP)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJSPSK)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)		92.5	93	93.5	94	94.5						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - Kementerian Keuangan (DJA)		92.5	93	93.5	94	94.5						
Sasaran Program	4. Pencapaian tugas khusus yang efektif												
Indikator Kinerja Program	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJPB)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJPPR)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (DJKN)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (BPPK)		100	100	100	100	100						
	Indeks efektivitas kinerja SMV – Kementerian Keuangan (SETJEN)		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4672 Legislasi dan Litigasi							24.30	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		95	-	-	-	-						
Output	Peraturan Lainnya							12.15	-	-	-	-	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		1 Peraturan	-	-	-	-	12.15	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12.15	-	-	-	-	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	-	-	-	-	12.15	-	-	-	-	
Kegiatan	4673 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							32,015.40	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		100	-	-	-	-						
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	-	-	-	-						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21,845.21	-	-	-	-	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	-	-	-	-	2,915.06	-	-	-	-	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	-	-	-	-	198.52	-	-	-	-	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Layanan	-	-	-	-	135.87	-	-	-	-	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	-	-	-	-	18,595.77	-	-	-	-	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							9,160.25	-	-	-	-	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		52 Unit	-	-	-	-	2,535.24	-	-	-	-	
	Kendaraan Bermotor		7 Unit	-	-	-	-	5,222.77	-	-	-	-	
	Gedung/Bangunan		400 m2	-	-	-	-	1,402.24	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,009.93	-	-	-	-	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	42.44	-	-	-	-	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	707.12	-	-	-	-	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	-	-	-	-	105.74	-	-	-	-	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	17.30	-	-	-	-	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Laporan	-	-	-	-	137.34	-	-	-	-	
Kegiatan	4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							2,291.54	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100	-	-	-	-						
Output	Komunikasi Publik							2,291.54	-	-	-	-	
	Pembinaan/Edukasi Publik		13 Layanan	-	-	-	-	1,628.34	-	-	-	-	
	Kehumasan		12 Layanan	-	-	-	-	313.15	-	-	-	-	
	Publikasi Media Cetak		6 Layanan	-	-	-	-	132.08	-	-	-	-	
	Publikasi Media Elektronik		6 Layanan	-	-	-	-	146.64	-	-	-	-	
	Publikasi Media Website		1 Layanan	-	-	-	-	71.33	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4675 Pengelolaan Organisasi dan SDM							11,410.70	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK		94%	-	-	-	-						
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM		96	-	-	-	-						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							9,165.35	-	-	-	-	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	-	-	-	-	4,070.83	-	-	-	-	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	-	-	-	-	5,094.53	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,245.34	-	-	-	-	
	Pengembangan SDM		476 Orang	-	-	-	-	1,258.59	-	-	-	-	
	Administrasi Kepegawaian		528 Orang	-	-	-	-	620.51	-	-	-	-	
	Pengelolaan Jafung		180 Orang	-	-	-	-	366.24	-	-	-	-	
Kegiatan	4676 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							146.70	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		98%	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal		82%	-	-	-	-						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							146.70	-	-	-	-	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal		1 Rekomendasi	-	-	-	-	146.70	-	-	-	-	
Kegiatan	4677 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi							91.03	-	-	-	-	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat *downtime* sistem TIK		0.1 Persen										
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							91.03	-	-	-	-	
	Layanan Teknologi / Sistem Informasi		12 Layanan	-	-	-	-	91.03	-	-	-	-	
Kegiatan	4678 Legislasi dan Litigasi							21.49	10.00	21.49	22.36	22.80	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi		86 (Indeks)	-	-	-	-						
	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)	95.5 (Indeks)						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21.49	10.00	21.49	22.36	22.80	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	21.49	10.00	21.49	22.36	22.80	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4679 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							119,759.32	97,767.02	154,439.76	172,030.22	180,094.61	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		84.1 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100 (poin)	-	-	-	-						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							196.93	5,384.12	196.93	196.93	200.79	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		72 Unit	181 Unit	72 Unit	72 Unit	72 Unit	196.93	5,384.12	196.93	196.93	200.79	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							84,575.94	71,152.74	119,256.38	136,815.98	144,190.18	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	199.09	24.68	199.09	207.21	211.27	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,789.95	965.73	2,789.95	2,903.78	2,960.70	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,693.83	418.38	2,693.83	2,803.73	2,858.69	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	78,893.07	69,743.94	113,573.51	130,901.25	138,159.52	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							34,345.92	21,180.16	34,345.92	34,350.63	35,023.91	
	Kendaraan Bermotor		7 Unit	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit	196.00	-	196.00	196.00	199.84	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		1.501 Unit	51 Unit	1.501 Unit	1.501 Unit	1.501 Unit	9,998.82	2,604.24	9,998.82	10,003.54	10,199.61	
	Gedung/Bangunan		8.950 m2	7.185 m2	8.950 m2	8.950 m2	8.950 m2	24,151.09	18,575.92	24,151.09	24,151.09	24,624.45	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							640.54	50.00	640.54	666.67	679.74	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101.89	10.00	101.89	106.04	108.12	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	123.93	10.00	123.93	128.98	131.51	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	166.87	10.00	166.87	173.68	177.08	
Kegiatan	4680 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							91,651.77	22,999.58	91,651.77	93,489.98	95,322.38	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU		100%	-	-	-	-						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							45,054.20	22,999.58	45,054.20	46,892.41	47,811.50	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	58.92	33.29	58.92	61.32	62.53	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	361.08	100.00	361.08	375.81	383.18	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	44,634.20	22,866.29	44,634.20	46,455.28	47,365.80	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							46,597.57	-	46,597.57	46,597.57	47,510.88	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2.306 Unit	-	2.306 Unit	2.306 Unit	2.306 Unit	8,006.50	-	8,006.50	8,006.50	8,163.43	
	Gedung/Bangunan		11.800 m2	-	11.800 m2	11.800 m2	11.800 m2	38,591.07	-	38,591.07	38,591.07	39,347.45	
Kegiatan	4681 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							973.56	304.66	973.56	1,013.29	1,033.15	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100 (poin)	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Komunikasi Publik							973.56	304.66	973.56	1,013.29	1,033.15	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jurnal BPPK		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	94.54	59.46	94.54	98.40	100.33	
	Corpu TV		1 Layanan	-	-	-	-	7.22	-	-	-	-	
	Strategi Komunikasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	300.00	10.00	307.22	319.76	326.03	
	Pameran/Eksibisi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	505.00	225.20	505.00	525.60	535.91	
	Publikasi Media Elektronik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	66.80	10.00	66.80	69.53	70.89	
Kegiatan	4682 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							991.53	240.35	991.53	1,031.99	1,052.22	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100 (poin)	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Komunikasi Publik							991.53	240.35	991.53	1,031.99	1,052.22	
	Jurnal Keuangan Negara		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	424.80	140.35	424.80	442.13	450.80	
	Layanan Kepustakaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	566.73	100.00	566.73	589.86	601.42	
Kegiatan	4683 Pengelolaan Organisasi dan SDM							305,037.61	215,083.70	305,037.61	317,483.14	323,705.81	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya		87%	87%	87%	87%	87%						
	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya		87%	87%	87%	87%	87%						
Output	Peraturan Menteri							32.19	10.00	32.19	33.50	34.16	
	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi		1 Permen	1 Permen	1 Permen	1 Permen	1 Permen	32.19	10.00	32.19	33.50	34.16	
	Peraturan lainnya							17.56	10.00	17.56	18.28	18.63	
	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan		1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	17.56	10.00	17.56	18.28	18.63	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1,288.45	540.00	1,288.45	1,341.02	1,367.30	
	Kajian Akademis BPPK		24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	788.45	540.00	788.45	820.62	836.71	
	Center of Case Study		1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.00	-	500.00	520.40	530.60	
	Akreditasi Lembaga							152.99	15.30	152.99	159.24	162.36	
	Akreditasi Program Pelatihan Keuangan Negara		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	152.99	15.30	152.99	159.24	162.36	
	Konferensi dan Event							-	381.48	900.00	936.72	955.08	
	Regional Training Center		-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	381.48	900.00	936.72	955.08	
	Sarana Bidang Pendidikan							-	480.01	3,256.48	3,389.34	3,455.77	
	Program dan Materi Pembelajaran		-	311 Unit	311 Unit	311 Unit	311 Unit	-	150.00	1,500.00	1,561.20	1,591.80	
	Alat Uji		-	2 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	-	195.01	1,223.80	1,273.73	1,298.69	
	Manajemen Pengetahuan		-	390 Unit	390 Unit	390 Unit	390 Unit	-	135.00	532.68	554.41	565.28	
	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan							275,324.52	201,847.80	271,168.04	282,231.70	287,763.44	
	Program dan Materi Pembelajaran		240 Orang	-	-	-	-	1,500.00					
	Pembelajaran Digital		170.042 Orang	113.740 Orang	170.042 Orang	170.042 Orang	170.042 Orang	9,605.80	6,483.18	9,605.80	9,997.72	10,193.67	
	Pembelajaran Klasikal		17.226 Orang	235 Orang	17.226 Orang	17.226 Orang	17.226 Orang	66,986.93	966.97	66,986.93	69,719.99	71,086.50	
	Sertifikasi Kompetensi		14.276 Orang	4.500 Orang	14.276 Orang	14.276 Orang	14.276 Orang	14,521.67	4,050.00	14,521.67	15,114.15	15,410.39	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Alat Uji		13 Orang	-	-	-	-	1,223.80	-	-	-	-	
	Manajemen Pengetahuan		396 Unit	-	-	-	-	532.68	-	-	-	-	
	Karyasiswa Beasiswa		290 Orang	288 Orang	290 Orang	290 Orang	290 Orang	162,662.63	161,371.95	162,662.63	169,299.27	172,617.54	
	Regional Training Center		2 Kegiatan	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	
	Pembelajaran Dengan Kriteria Tertentu		-	2.510 Orang	1.240 Orang	1.240 Orang	1.240 Orang		28,652.73	16,590.77	17,267.68	17,606.12	
	E-Learning Empowering Leadership for Workplace Well-being		12.000 Orang	-	-	-	-	800.24	-	-	-	-	
	Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kepala Daerah (PU)		342 Orang	-	-	-	-	3,009.00	-	-	-	-	
	Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan (PU)		13.717 Orang	-	-	-	-	7,519.36	-	-	-	-	
	Training of Trainers Pengelola Pajak Daerah (PU)		228 Orang	-	-	-	-	1,979.52	-	-	-	-	
	Pelatihan Global Security: Green Customs (PU)		60 Orang	-	-	-	-	795.96	-	-	-	-	
	Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)		859 Orang	-	-	-	-	1,771.29	-	-	-	-	
	Workshop Environmental. Social. and Governance (ESG) Framework for Asia Pacific Public Policymakers (PU)		35 Orang	-	-	-	-	1,515.64	-	-	-	-	
	E-Learning Digital Leadership Awareness (PU)		-	60.000 Orang	60.000 Orang	60.000 Orang	60.000 Orang	-	98.75	244.67	254.65	259.64	
	Program Pembelajaran Strategis Dukungan Teknis Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi SDM Kementerian Keuangan (PU)		-	328 Orang	328 Orang	328 Orang	328 Orang	-	50.87	126.04	131.18	133.75	
	Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Perpajakan – Penguatan Kompetensi Dasar Perpajakan bagi SDM Direktorat Jenderal Pajak Pengampu Fungsi Kepatuhan Perpajakan 2026 (PU)		-	2.216 Orang	2.216 Orang	2.216 Orang	2.216 Orang	-	127.49	315.87	328.76	335.20	
	Pembelajaran terkait Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir (PU)		-	176 Orang	176 Orang	176 Orang	176 Orang	-	45.88	113.66	118.30	120.62	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12,965.83	9,032.90	12,965.83	13,494.83	13,759.33	
	Penjaminan Mutu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	255.75	25.58	255.75	266.19	271.40	
	Learning Organization		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,760.48	458.45	1,760.48	1,832.30	1,868.22	
	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,239.14	469.39	1,239.14	1,289.70	1,314.97	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	241.10	24.11	241.10	250.94	255.85	
	Pengelolaan Inovasi BPPK		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	161.38	16.14	161.38	167.96	171.25	
	AKP Kewilayahan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,357.31	330.00	1,357.31	1,412.69	1,440.38	
	Layanan Analisis Data Pembelajaran		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.40	14.84	148.40	154.45	157.48	
	Layanan Pemantauan Dukungan Pembelajaran		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.40	14.84	148.40	154.45	157.48	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,653.88	7,679.56	7,653.88	7,966.15	8,122.29	
	Layanan Manajemen SDM Internal							15,256.07	2,766.20	15,256.07	15,878.51	16,189.73	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.982 Orang	1.753 Orang	1.982 Orang	1.982 Orang	1.982 Orang	12,249.07	2,200.00	12,249.07	12,748.83	12,998.70	
	Administrasi Kepegawaian		1.258 Orang	1.258 Orang	1.258 Orang	1.258 Orang	1.258 Orang	162.00	16.20	162.00	168.61	171.91	
	Pengelolaan Jafung		353 Orang	403 Orang	353 Orang	353 Orang	353 Orang	2,845.00	550.00	2,845.00	2,961.08	3,019.11	
Kegiatan	4684 Pengelolaan Organisasi dan SDM							37,769.63	20,728.07	37,769.63	39,310.63	40,081.12	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal baik		93%	93%	93%	93%	93%						
Output	Pendidikan Tinggi							35,125.89	18,545.30	34,925.89	36,350.87	37,063.35	
	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan		4.523 Orang	4.548 Orang	4.523 Orang	4.523 Orang	4.523 Orang	32,683.61	13,033.42	32,683.61	34,017.11	34,683.84	
	Program Pengabdian Masyarakat		50 Orang	23 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1,112.83	511.89	1,112.83	1,158.23	1,180.93	
	Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa		70 Orang	85 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	1,129.45	5,000.00	1,129.45	1,175.53	1,198.57	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Desa dan BUM Desa (PU)		40 Orang	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2,243.23	2,182.76	2,243.23	2,334.76	2,380.52	
	Penjaminan Mutu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	167.68	100.00	167.68	174.52	177.94	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,075.55	2,082.76	2,075.55	2,160.24	2,202.58	
	Layanan Manajemen SDM Internal							400.50	-	600.50	625.00	637.25	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		262 Orang	-	262 Orang	262 Orang	262 Orang	400.50	-	600.50	625.00	637.25	
Kegiatan	4685 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		82 (Indeks)	-	-	-	-						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti		97%	-	-	-	-						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		-	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)	92.5 (Indeks)						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		-	95.3%	95.3%	95.3%	95.3%						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	142.00	14.20	142.00	147.79	150.69	
Kegiatan	4686 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Integritas		91.1 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	86.28	6.89	86.28	89.80	91.56	
Kegiatan	4688 Legislasi dan Litigasi							17.58	27.04	17.58	18.3	18.65	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		83	83	83	83	83						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							17.58	27.04	17.58	18.29	18.65	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	17.58	27.04	17.58	18.29	18.65	
Kegiatan	4689 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							37,694.94	22,727.94	43,547.53	47,160.67	48,876.93	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28,634.42	19,421.40	34,487.02	38,036.29	39,573.71	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	254.23	30.43	254.23	264.60	269.79	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,253.15	1,242.64	3,253.15	3,385.88	3,452.24	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,882.69	870.63	1,882.69	1,959.50	1,997.91	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	20,846.19	17,277.69	26,698.79	29,930.30	31,308.85	
	Rekomendasi Data dan Informasi Anggaran		1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,924.02	-	1,924.02	2,002.52	2,041.77	
	Rekomendasi Data dan Informasi PNBP		1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	474.13	-	474.13	493.47	503.15	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							7,495.12	2,802.25	7,495.12	7,495.12	7,642.02	
	Gedung/Bangunan		2.462 m2	1.546 m2	2.462 m2	2.462 m2	2.462 m2	5,686.95	2,802.25	5,686.95	5,686.95	5,798.42	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		8 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1,808.17	-	1,808.17	1,808.17	1,843.61	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,565.40	504.30	1,565.40	1,629.26	1,661.20	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.14	20.00	75.14	78.20	79.74	
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	202.96	-	202.96	211.24	215.38	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,054.34	469.00	1,054.34	1,097.35	1,118.86	
	Layanan Penyelengaraan Kearsipan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.96	15.30	232.96	242.46	247.22	
Kegiatan	4690 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							891.72	198.50	891.72	928.10	946.30	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							891.72	198.50	891.72	928.10	946.30	
	Publikasi Media Elektronik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	891.72	198.50	891.72	928.10	946.30	
Kegiatan	4691 Pengelolaan Organisasi dan SDM							13,374.76	7,708.32	13,374.76	13,920.45	14,193.29	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM		97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%						
	Nilai evaluasi organisasi		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							10,361.18	7,256.32	10,361.18	10,783.91	10,995.28	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2,646.59	154.00	2,646.59	2,754.58	2,808.56	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,714.58	7,102.32	7,714.58	8,029.34	8,186.71	
	Layanan Manajemen SDM Internal							3,013.59	452.00	3,013.59	3,136.54	3,198.02	
	Pengembangan SDM		843 orang	843 orang	843 orang	843 orang	843 orang	2,451.52	368.12	2,451.52	2,551.55	2,601.56	
	Rekomendasi Pengelolaan SDM		5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	562.06	83.88	562.06	584.99	596.46	
Kegiatan	4692 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							439.52	124.46	439.52	457.46	466.42	***DJA***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							439.52	124.46	439.52	457.46	466.42	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	439.52	124.46	439.52	457.46	466.42	
Kegiatan	4694 Legislasi dan Litigasi							1,991.16	1,254.43	1,991.16	2,072.40	2,113.02	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai		79	79	79	79	79						
	Persentase kualitas pemberian bantuan hukum terkait penegakan hukum pidana		79%	79%	79%	79%	79%						
Output	Peraturan Lainnya							466.75	309.19	466.75	485.79	495.31	
	Harmonisasi Peraturan / Kebijakan		6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	6 peraturan	466.75	309.19	466.75	485.79	495.31	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1,524.42	945.25	1,524.42	1,586.62	1,617.71	
	Layanan Bantuan Hukum		35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	35 layanan	1,524.42	945.25	1,524.42	1,586.62	1,617.71	
Kegiatan	4695 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							1,929,564.91	1,790,966.87	2,139,879.90	2,271,412.36	2,344,389.72	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		80	80	80	80	80						
	Persentase kualitas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi		80%	81%	81%	81%	81%						
Output	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan							331,011.39	443,239.53	331,011.39	331,280.90	337,774.01	
	Sarana Operasi Pengawasan		78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	331,011.39	443,239.53	331,011.39	331,280.90	337,774.01	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							3,093.33	239.73	3,093.33	3,093.33	3,153.96	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		114 unit	35 unit	114 unit	114 unit	114 unit	3,093.33	239.73	3,093.33	3,093.33	3,153.96	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							845,072.52	658,027.56	1,055,387.51	1,175,428.09	1,226,924.17	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,637.09	1,089.01	1,637.09	1,703.88	1,737.28	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	65,488.41	61,881.48	65,488.41	68,160.34	69,496.28	
	Kerumahtanggaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	28,832.06	19,317.09	28,832.06	30,008.41	30,596.57	
	Layanan Perkantoran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	749,114.96	575,739.98	959,429.95	1,075,555.47	1,125,094.04	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							475,474.83	411,846.74	475,474.83	475,480.75	484,800.17	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		7.589 unit	4.682 unit	7.589 unit	7.589 unit	7.589 unit	132,387.23	86,105.47	132,387.23	132,393.14	134,988.05	
	Kendaraan Bermotor		271 unit	248 unit	271 unit	271 unit	271 unit	60,877.58	74,124.80	60,877.58	60,877.58	62,070.78	
	Gedung/Bangunan		29.695 m2	39.039 m2	29.695 m2	29.695 m2	29.695 m2	276,325.49	250,251.95	276,325.49	276,325.49	281,741.47	
	Tanah		20.211 m2	3.886 m2	20.211 m2	20.211 m2	20.211 m2	5,884.55	1,364.53	5,884.55	5,884.55	5,999.88	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							6,540.66	3,984.44	6,540.66	6,807.52	6,940.95	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,306.80	823.28	1,306.80	1,360.11	1,386.77	
	Laporan Keuangan Unit		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1,900.53	1,188.10	1,900.53	1,978.07	2,016.84	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,455.48	916.95	1,455.48	1,514.86	1,544.55	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	299.14	95.72	299.14	311.35	317.45	
	Dokumen Perencanaan Strategis		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	356.78	214.35	356.78	371.34	378.61	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1,221.94	746.04	1,221.94	1,271.80	1,296.72	
	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan							268,272.17	273,628.88	268,272.17	279,217.68	284,690.35	
	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai		3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	3.744 unit	260,301.58	265,406.80	260,301.58	270,921.89	276,231.95	
	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai		344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	344 unit	7,970.59	8,222.08	7,970.59	8,295.79	8,458.39	
	Peraturan Lainnya							100.00	-	100.00	104.08	106.12	
	Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara		1 peraturan	-	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	100.00	-	100.00	104.08	106.12	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4696 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							15,796.11	6,567.62	15,796.11	16,440.59	16,762.82	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya		2.75%	-	-	-	-						
	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		100	100	100	100	100						
	Indeks opini publik terhadap DJBC		-	70	70	70	70						
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							15,796.11	6,567.62	15,796.11	16,440.59	16,762.82	
	Pembinaan/Edukasi Publik		1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	1.610 kegiatan	2,430.53	406.72	2,430.53	2,529.69	2,579.28	
	Layanan Kepustakaan		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	591.62	217.42	591.62	615.76	627.83	
	Contact Center		179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	179.050 orang	1,985.77	1,315.30	1,985.77	2,066.79	2,107.30	
	Kehumasan		5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1,378.88	345.70	1,378.88	1,435.14	1,463.27	
	Pameran/Eksibisi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	390.67	115.76	390.67	406.61	414.58	
	Publikasi Media Cetak		6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	6.000 media	847.26	518.94	847.26	881.82	899.11	
	Publikasi Media Elektronik		4 media	4 media	4 media	4 media	4 media	498.90	235.32	498.90	519.26	529.43	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	4,323.06	2,161.53	4,323.06	4,499.44	4,587.63	
	Implementasi PUG		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	168.13	105.92	168.13	174.99	178.42	
	Strategi Komunikasi		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	2,110.11	918.25	2,110.11	2,196.20	2,239.25	
	Hubungan Antar Lembaga		10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	395.80	87.05	395.80	411.95	420.02	
	Bimbingan Pengguna Jasa		9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	675.38	139.72	675.38	702.94	716.72	
Kegiatan	4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM							202,946.42	175,493.23	202,946.42	211,226.63	215,366.68	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat penyelesaian ekosistem delayering		100%	-	-	-	-						
	Tingkat implementasi learning organization - DJBC		84%	84%	84%	84%	84%						
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu - DJBC		100	100	100	100	100						
	Persentase Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dan WBBM - DJBC		75%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		97.30%	97.30%	97.30%	97.30%	97.30%						
Output	Peraturan Menteri							14.04	-	14.04	14.61	14.90	
	Peraturan Menteri Terkait Organisasi		1 RPermen	-	1 RPermen	1 RPermen	1 RPermen	14.04	-	14.04	14.61	14.90	
	Peraturan Lainnya							168.08	-	168.08	174.94	178.37	
	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi		3 peraturan	-	3 peraturan	3 peraturan	3 peraturan	168.08	-	168.08	174.94	178.37	
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							539.58	355.98	539.58	561.59	572.60	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I		1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	539.58	355.98	539.58	561.59	572.60	
	Layanan Manajemen SDM Internal							61,511.11	35,892.47	61,511.11	64,020.76	65,275.57	
	Pengembangan SDM		14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	14.757 orang	60,738.42	35,170.61	60,738.42	63,216.55	64,455.60	
	Administrasi Kepegawaian		1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	1.950 orang	772.68	721.86	772.68	804.21	819.97	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							140,713.61	139,244.78	140,713.61	146,454.72	149,325.24	
	Hasil Survei/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	347.98	359.40	347.98	362.17	369.27	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penilaian Unit ZI WBBM		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	395.65	129.49	395.65	411.80	419.87	
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		91 layanan	91 layanan	91 layanan	91 layanan	91 layanan	1,935.94	929.51	1,935.94	2,014.93	2,054.42	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	564.99	369.31	564.99	588.04	599.57	
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC		147 layanan	147 layanan	147 layanan	147 layanan	147 layanan	293.43	234.05	293.43	305.40	311.39	
	Standar Operasional Prosedur		300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	137.24	184.65	137.24	142.84	145.64	
	Layanan Perkantoran		12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	137,038.38	137,038.38	137,038.38	142,629.54	145,425.08	
Kegiatan	4698 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							4,461.23	2,507.70	4,461.23	4,643.25	4,734.26	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal		82 (skala 100)	-	-	-	-						
	Persentase efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal		80%	81%	81%	81%	81%						
	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		-	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)	83 (skala 100)						
Output	Peraturan Lainnya							4.58	-	4.58	4.76	4.85	
	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	4.58	-	4.58	4.76	4.85	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4,456.66	2,507.70	4,456.66	4,638.49	4,729.40	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	18 rekomendasi	4,213.87	2,359.73	4,213.87	4,385.79	4,471.75	
	Rekomendasi Manajemen Risiko		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	242.79	147.98	242.79	252.69	257.65	
Kegiatan	4699 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							524,740.36	406,077.43	524,740.67	537,028.33	547,553.58	***DJBC***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase efektivitas implementasi CEISA 40		81%	81%	81%	81%	81%						
	Tingkat response time sistem aplikasi kepabeanan (CEISA 40)		75%	-	-	-	-						
	Tingkat kualitas data. informasi. dan interoperabilitas antar sistem		-	80%	80%	80%	80%						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan		-					278,155.69	10,610.00	278,156.00	280,383.00	285,878.00	
	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai		25 modul aplikasi	-	-	-	-	1,074.83	-	-	-	-	
	CEISA 40: Driving Digital Transformation (PU)		1 sistem informasi	-	-	-	-	277,080.86	-	-	-	-	
	Smart Customs and Excise System (PU)		-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	-	10,610.00	278,156.00	280,383.00	285,878.00	
	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							246,584.67	395,241.09	246,584.67	256,645.33	261,675.58	
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	1.060 unit	246,584.67	306,541.66	246,584.67	256,645.33	261,675.58	
	Infrastruktur CEISA		-	1 unit	-	-	-		88,699.43				
	Layanan Manajemen SDM Internal							-	96.00	-	-	-	
	Asistensi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		-	25 orang	-	-	-	-	96.00	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							-	130.34	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai		-	1 Laporan	-	-	-	-	130.34	-	-	-	
Kegiatan	4700 Legislasi dan Litigasi							5,783.37	3,395.82	5,783.37	6,019.33	6,137.31	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Litigasi yang optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penanganan permasalahan hukum		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							5,783.37	3,395.82	5,783.37	6,019.33	6,137.31	
	Layanan Bantuan Hukum		1.891 Perkara	1.891 Perkara	1.891 Perkara	1.891 Perkara	1.891 Perkara	5,783.37	3,395.82	5,783.37	6,019.33	6,137.31	
Kegiatan	4701 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							476,436.31	426,423.79	530,000.67	560,638.18	578,874.47	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - DJKN		100	100	100	100	100						
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan - DJKN		100	100	100	100	100						
	Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki/Direnovasi		90	-	-	-	-						
	Persentase Pendanaan Pengadaan Tanah yang Tepat Waktu		90	-	-	-	-						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							8,516.00	6,079.56	8,516.00	8,516.00	8,682.91	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		309 Unit	-	-	-	-	8,516.00	6,079.56	8,516.00	8,516.00	8,682.91	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							215,279.86	217,577.46	268,844.22	299,419.02	312,535.41	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	569.78	191.55	569.78	593.03	604.65	
	Kerumahtanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	15,650.76	32,559.39	15,650.76	16,289.31	16,608.58	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	8,269.96	7,944.53	8,269.96	8,607.38	8,776.08	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	190,789.36	176,881.99	244,353.72	273,929.31	286,546.11	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							251,103.31	201,634.76	251,103.31	251,103.31	256,024.93	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2.565 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	21,079.13	5,187.53	21,079.13	21,079.13	21,492.28	
	Kendaraan Bermotor		126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	16,499.38	29,344.22	16,499.38	16,499.38	16,822.77	
	Gedung/Bangunan		18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	213,524.80	167,103.01	213,524.80	213,524.80	217,709.89	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,537.14	1,132.01	1,537.14	1,599.85	1,631.21	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	377.98	377.98	377.98	393.40	401.11	
	Laporan Keuangan Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	295.97	295.97	295.97	308.04	314.08	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	198.94	198.94	198.94	207.05	211.11	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Risiko Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	380.61	105.73	380.61	396.14	403.91	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	283.64	153.40	283.64	295.21	301.00	
Kegiatan	4702 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							5,878.00	5,009.19	5,878.00	6,117.82	6,237.73	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Komunikasi publik yang efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi - DJKN		-	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan - DJKN		100	-	-	-	-						
Output	Komunikasi Publik							5,878.00	5,009.19	5,878.00	6,117.82	6,237.73	
	Pembinaan/Edukasi Publik		4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang	4.983 Orang	1,891.16	1,184.40	1,891.16	1,968.32	2,006.90	
	Kehumasan		1.099 Kegiatan	1.099 Kegiatan	1.099 Kegiatan	1.099 Kegiatan	1.099 Kegiatan	2,232.45	2,481.18	2,232.45	2,323.53	2,369.07	
	Pameran/Eksibisi		65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	65 Kegiatan	692.69	791.08	692.69	720.95	735.08	
	Layanan Kepustakaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	64.87	55.25	64.87	67.52	68.84	
	Publikasi Media Website		13 Media	13 Media	12 Media	12 Media	12 Media	42.22	17.85	42.22	43.94	44.80	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		15 Kegiatan	15 Kegiatan	20 Kegiatan	22 Kegiatan	25 Kegiatan	426.28	337.24	426.28	443.67	452.37	
	Strategi Komunikasi		2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	2 Strategi	64.80	60.04	64.80	67.44	68.77	
	Contact Center		14.282 Customer	14.282 Customer	3.200 Customer	3.400 Customer	3.600 Customer	463.54	82.16	463.54	482.45	491.90	
Kegiatan	4703 Pengelolaan Organisasi dan SDM							51,366.77	54,439.75	51,366.77	53,462.54	54,510.40	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan organisasi yang efektif dan pengelolaan SDM yang adaptif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - DJKN		-	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi - DJKN		-	100	100	100	100						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJKN		96	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian program IS RBTK - DJKN		94	-	-	-	-						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							806.89	1,763.23	806.89	839.81	856.27	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon		18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	806.89	1,763.23	806.89	839.81	856.27	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28,573.66	28,084.62	28,573.66	29,739.47	30,322.36	
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		18 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	123.78	149.84	123.78	128.83	131.35	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	310.49	306.32	310.49	323.15	329.49	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	28,139.40	27,628.47	28,139.40	29,287.49	29,861.52	
	Layanan Manajemen SDM Internal							21,986.22	24,591.90	21,986.22	22,883.26	23,331.77	
	Pengembangan SDM		1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	21,986.22	24,591.90	21,986.22	22,883.26	23,331.77	
Kegiatan	4704 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas - DJKN		-	100	100	100	100						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi – DJKN		-	93	93	93	93						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal - DJKN		82	-	-	-	-						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti - DJKN		98	-	-	-	-						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	463 Dokumen	3,064.38	5,045.65	3,064.38	3,189.41	3,251.92	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4705 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							27,600.55	30,413.44	27,600.55	28,563.23	29,123.07	***DJKN***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan - DJKN		-	100	100	100	100						
	Persentase pengembangan sistem aplikasi		95	-	-	-	-						
Output	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							14,590.87	17,010.66	15,437.37	15,975.81	16,288.94	
	Pemeliharaan Sistem TIK DJKN		713 Unit	713 Unit	713 Unit	713 Unit	713 Unit	14,590.87	17,010.66	15,437.37	15,975.81	16,288.94	
	Sistem Informasi Pemerintahan							5,376.98	1,147.91	1,041.74	1,078.08	1,099.21	
	Sistem TIK		10 Modul Aplikasi	10 Modul Aplikasi	10 Modul Aplikasi	10 Modul Aplikasi	10 Modul Aplikasi	5,376.98	1,147.91	1,041.74	1,078.08	1,099.21	
	Sistem Informasi Pemerintahan							7,632.71	12,254.87	11,121.44	11,509.34	11,734.92	
	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,577.03	3,579.33	3,248.28	3,361.58	3,427.47	
	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	4,169.16	4,799.27	4,355.39	4,507.31	4,595.65	
	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	886.52	887.55	805.46	833.56	849.89	
	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	2,988.72	2,712.30	2,806.90	2,861.91	
Kegiatan	4706 Legislasi dan Litigasi							1,772.88	835.61	1,772.88	1,845.21	1,881.37	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tingkat Kemenangan Atas Putusan Penanganan Perkara/Sengketa		60%	-	-	-	-						
	Nilai kinerja optimalisasi penanganan perkara/sengketa yang ditujukan kepada DJP		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1,772.88	835.61	1,772.88	1,845.21	1,881.37	
	Layanan Bantuan Hukum		100 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	1,772.88	835.61	1,772.88	1,845.21	1,881.37	
Kegiatan	4707 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							3,034,346.28	2,256,446.43	3,697,656.84	4,072,918.15	4,242,499.78	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		100	-	-	-	-						
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		-	100	100	100	100						
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	100	100	100	100						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6,206.02	10,026.53	6,206.19	6,206.19	6,327.65	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		383 Unit	783 Unit	783 Unit	783 Unit	783 Unit	6,206.02	10,026.53	6,206.19	6,206.19	6,327.65	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2,578,138.45	1,854,003.20	3,241,448.86	3,616,489.04	3,777,124.79	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,362,627.10	1,747,964.52	3,025,937.50	3,392,184.94	3,548,424.21	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,232.42	3,041.92	6,232.42	6,486.60	6,613.84	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12,723.49	12,723.49	12,723.49	13,242.60	13,502.16	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	196,555.45	90,273.27	196,555.45	204,574.90	208,584.58	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							445,137.46	388,183.88	445,137.45	445,160.13	453,885.30	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kendaraan Bermotor		962 Unit	962 Unit	962 Unit	962 Unit	962 Unit	25,306.00	28,932.10	25,306.00	25,306.00	25,801.99	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		40.942 Unit	40.942 Unit	40.942 Unit	40.942 Unit	40.942 Unit	38,429.58	10,954.14	38,429.58	38,452.27	39,205.96	
	Gedung/Bangunan		80194 M2	110.238 M2	110.238 M2	110.238 M2	110.238 M2	381,401.88	348,297.64	381,401.87	381,401.86	388,877.35	
	Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4,864.35	4,232.82	4,864.34	5,062.79	5,162.04	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,540.51	2,200.36	2,540.51	2,644.15	2,695.98	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	790.34	500.56	790.34	822.59	838.71	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	723.10	721.50	723.09	752.59	767.35	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	810.40	810.40	810.40	843.46	860.00	
Kegiatan	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM							2,166,483.95	2,288,237.79	2,166,483.95	2,254,876.49	2,299,072.07	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Learning Organization		90	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							356,480.72	487,754.07	356,480.71	371,025.13	378,297.22	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	1,031.27	125,219.47	1,031.27	1,073.35	1,094.38	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	355,449.45	362,534.60	355,449.44	369,951.78	377,202.84	
	Layanan Manajemen SDM Internal							1,804,506.66	1,794,987.15	1,804,506.67	1,878,130.53	1,914,941.89	
	Biaya Operasional Pemungutan PBB		43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	43.859 Orang	1,650,093.67	1,602,330.22	1,650,093.67	1,717,417.49	1,751,078.87	
	Pengembangan SDM		4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	4.435 Orang	13,437.64	7,425.49	13,437.64	13,985.90	14,260.02	
	Pengembangan e-Audit DJP dan Pengelolaan e-Auditor (PU)		1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	1.300 Orang	878.35	453.06	878.35	914.18	932.10	
	Administrasi Kepegawaian		4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	4.566 Orang	140,097.01	184,778.38	140,097.01	145,812.96	148,670.90	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							5,496.57	5,496.57	5,496.57	5,720.83	5,832.96	
	Dukungan Implementasi/Penerapan Core Tax		45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	45.315 Orang	5,496.57	5,496.57	5,496.57	5,720.83	5,832.96	
Kegiatan	4709 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							5,039.23	3,224.37	5,039.23	5,244.83	5,347.62	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas UKI		82	-	-	-	-						
	Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi		-	92.5	92.5	92.5	92.5						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							5,039.23	3,224.37	5,039.23	5,244.83	5,347.62	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5,039.23	3,224.37	5,039.23	5,244.83	5,347.62	
Kegiatan	4710 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							502,618.82	624,543.66	502,018.80	508,678.99	518,859.08	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat *Downtime* Sistem TIK		0.10%	-	-	-	-						
	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK		94%	100%	100%	100%	100%						
	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan		-	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							322,161.66	173,490.26	119,819.12	119,116.65	121,661.33	
	Software Hardware SIDJP		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	106,950.49	159,889.51	106,950.48	105,240.58	107,336.81	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital		41 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	35 Sistem Informasi	11,268.65	11,391.65	11,268.64	11,635.27	11,863.33	
	Asset Recovery Management System Fase II (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1,000.00	544.45	1,000.00	1,040.80	1,061.19	
	Peralatan khusus intelijen. sarpras. dan infrastruktur kegiatan operasi intelijen		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	1,000.00	600.00	1,200.00	1,400.00	
	Core Tax System (PN)		5 Sistem Informasi	-	-	-	-	201,742.53	-	-	-	-	
	Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (*Tax Crime Handling System*) (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	1,200.00	664.65	-	-	-	
	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							180,457.16	451,053.40	382,199.68	389,562.34	397,197.75	
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	180,457.16	252,004.68	180,457.15	187,819.81	191,501.07	
	Pemeliharaan coretax system DJP		-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	199,048.72	201,742.53	201,742.53	205,696.68	
Kegiatan	4711 Legislasi dan Litigasi							176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penanganan perkara hukum keuangan Negara		4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	176.13	96.90	176.13	183.31	186.90	
Kegiatan	4712 Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit							6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	6,056,135.60	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tingkat Harga CPO		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Imbal Hasil Pengelolaan Dana		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		40 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							103,184.36	98,118.05	103,184.36	103,184.36	103,184.36	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,018.00	5,208.14	4,018.00	4,018.00	4,018.00	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,786.00	5,072.74	4,786.00	4,786.00	4,786.00	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	94,380.36	87,837.16	94,380.36	94,380.36	94,380.36	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,397.00	2,681.90	2,397.00	2,397.00	2,397.00	
	Pengembangan SDM		115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	2,397.00	2,681.90	2,397.00	2,397.00	2,397.00	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							2,953.64	3,884.69	2,953.64	2,953.64	2,953.64	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	155.10	293.58	155.10	155.10	155.10	
	Laporan Keuangan Unit		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	330.54	450.83	330.54	330.54	330.54	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2,218.00	2,833.10	2,218.00	2,218.00	2,218.00	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	250.00	307.18	250.00	250.00	250.00	
	Sistem Informasi Pemerintahan							3,915.00	3,909.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Aplikasi Internal		3 Modul	3 Modul	4 Modul	5 Modul	6 Modul	3,915.00	3,909.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	
	Hasil Kelolaan Dana							1,704,660.00	1,708,516.36	1,704,660.00	1,704,660.00	1,704,660.00	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		565 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	688 Milyar	6,000.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan		85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	85 Rupiah	118,000.00	119,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	
	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan		80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	80 Rupiah	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	
	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan		43.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	21.011 Hektar	1,260,660.00	1,261,016.36	1,260,660.00	1,260,660.00	1,260,660.00	
	Pendanaan untuk SDM Perkebunan		6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	6.500 Orang	120,000.00	121,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan		16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	16.000 Rupiah	117,000.00	118,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
	Hasil Kelolaan Dana							4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	
	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)		1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	1.000.000 Kilo Liter	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	4,237,475.60	
Kegiatan	4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*) Pengelolaan Investasi Pemerintah							95,640.78	95,640.78	95,640.77	95,640.77	95,640.77	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan pembiayaan ulltra mikro yang inklusif. prudent dan optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro		100%	100%	100%	100%	100%						
	Realisasi PNBP layanan utama BLU		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							58,923.49	58,923.49	58,923.49	58,923.49	58,923.49	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,289.86	3,289.86	3,289.86	3,289.86	3,289.86	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	411.06	411.06	411.06	411.06	411.06	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	55,222.57	55,222.57	55,222.57	55,222.57	55,222.57	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,145.00	1,339.88	1,145.00	1,145.00	1,145.00	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1,145.00	1,339.88	1,145.00	1,145.00	1,145.00	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	
	Pengembangan SDM		49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	2,413.39	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,072.32	1,084.32	1,072.32	1,072.32	1,072.32	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	
	Laporan Keuangan Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	363.48	363.48	363.48	363.48	363.48	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.96	18.96	18.96	18.96	18.96	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	658.13	670.13	658.13	658.13	658.13	
	Sistem Informasi Pemerintahan							300.00	105.12	300.00	300.00	300.00	
	Sistem Aplikasi Internal		1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	300.00	105.12	300.00	300.00	300.00	
	Hasil Kelolaan Dana							72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		336 Milyar	336 Milyar	336 Milyar	336 Milyar	336 Milyar	72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
	Hasil Kelolaan Dana							31,714.22	31,702.22	31,714.22	31,714.22	31,714.22	
	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)		1.470.000 Usaha Mikro	1.480.000 Usaha Mikro	1.480.000 Usaha Mikro	1.480.000 Usaha Mikro	1.480.000 Usaha Mikro	31,714.22	31,702.22	31,714.22	31,714.22	31,714.22	
Kegiatan	4714 Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup							69,603.24	69,603.24	66,062.98	66,062.98	66,062.98	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dana lingkungan hidup yang berkelanjutan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Dana Lingkungan Hidup		100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Peraturan lainnya							96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	
	Peraturan Lainnya terkait Organisasi		10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	10 Peraturan	96.89	96.89	96.89	96.89	96.89	
	Komunikasi Publik							2,515.40	2,515.40	2,515.40	2,515.40	2,515.40	
	Pembinaan/Edukasi Publik		1 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2,515.40	2,515.40	2,515.40	2,515.40	2,515.40	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							41,525.49	43,194.39	41,525.50	41,525.50	41,525.50	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	483.60	483.60	483.60	483.60	483.60	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	41,041.90	42,710.79	41,041.90	41,041.90	41,041.90	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							3,540.28	-	-	-	-	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gedung/Bangunan		1.461 M2	-	-	-	-	3,540.28	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							866.37	866.37	866.37	866.37	866.37	
	Pengembangan SDM		65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	809.42	809.42	809.42	809.42	809.42	
	Administrasi Kepegawaian		78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	78 Orang	56.95	56.95	56.95	56.95	56.95	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,277.81	1,277.81	1,277.82	1,277.82	1,277.82	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	467.73	467.73	467.73	467.73	467.73	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	176.48	176.48	176.48	176.48	176.48	
	Rekomendasi Manajemen Risiko		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	362.72	362.72	362.72	362.72	362.72	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	220.81	220.81	220.81	220.81	220.81	
	Sistem Informasi Pemerintahan							457.30	1,535.45	457.30	457.30	457.30	
	Sistem Aplikasi Internal		1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul	457.30	1,535.45	457.30	457.30	457.30	
	Hasil Kelolaan Dana							19,323.70	20,116.93	19,323.70	19,323.70	19,323.70	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		505 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	685 Milyar	3,813.68	3,813.68	3,813.68	3,813.68	3,813.68	
	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup		5.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	17.000 Orang	8,320.71	9,113.94	8,320.71	8,320.71	8,320.71	
	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup		100 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	230 Milyar	7,189.31	7,189.31	7,189.31	7,189.31	7,189.31	
Kegiatan	4715 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							731,887.77	327,032.76	831,129.39	903,608.29	938,925.46	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1 Indeks	84.1 Indeks	84.1 Indeks	84.1 Indeks	84.1 Indeks						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							1,642.88	-	1,642.88	1,642.88	1,675.08	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		155 Unit	-	155 Unit	155 Unit	155 Unit	1,642.88	-	1,642.88	1,642.88	1,675.08	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							465,844.95	272,848.51	595,964.27	667,906.68	698,604.07	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	18,722.26	8,167.11	18,722.26	19,486.13	19,868.06	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12Layanan	12Layanan	12Layanan	12Layanan	12,444.85	11,059.03	12,444.85	12,952.60	13,206.47	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,511.20	426.40	1,511.20	1,572.86	1,603.68	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	433,166.64	253,195.96	563,285.96	633,895.09	663,925.86	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							251,250.38	45,120.86	220,372.67	220,372.67	224,691.99	
	Kendaraan Bermotor		89 Unit	-	-	-	-	30,877.59	-	-	-	-	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		1065 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	36,428.11	11,646.60	36,428.00	36,428.00	37,142.00	
	Gedung/Bangunan		26.384 M2	7.628 M2	7.628 M2	7.628 M2	7.628 M2	183,944.67	33,474.26	183,944.67	183,944.67	187,549.99	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							13,149.57	9,063.39	13,149.57	13,686.06	13,954.32	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		433 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4,084.71	2,057.73	4,084.71	4,251.37	4,334.70	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		501 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	499 Dokumen	4,329.25	3,422.80	4,329.25	4,505.88	4,594.19	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,226.30	619.83	1,226.30	1,276.33	1,301.35	
	Laporan Keuangan Unit		71 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	1,624.21	1,361.24	1,624.21	1,690.47	1,723.61	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		3 Layanan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,885.10	1,601.79	1,885.10	1,962.01	2,000.47	
Kegiatan	4718 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							6,131.71	4,852.00	6,131.71	6,381.88	6,506.97	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks	3.55 (skala 4) Indeks						
Output	Komunikasi Publik							6,131.71	4,852.00	6,131.71	6,381.88	6,506.97	
	Pembinaan/Edukasi Publik		429 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	430 Kegiatan	2,958.55	2,047.94	2,958.55	3,079.25	3,139.61	
	Kehumasan		322 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	2,897.50	2,577.50	2,897.50	3,015.72	3,074.83	
	Implementasi PUG		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	275.66	226.56	275.66	286.91	292.53	
Kegiatan	4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM							152,110.37	128,115.64	152,110.37	158,316.48	161,419.46	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							99,441.31	98,612.13	99,441.32	103,498.52	105,527.07	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		430 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	427 Rekomendasi	18,384.93	18,819.65	18,384.93	19,135.03	19,510.08	
	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan		360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	1,328.44	553.45	1,328.44	1,382.64	1,409.73	
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		440 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	438 Dokumen	743.73	744.38	743.73	774.07	789.24	
	Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	216.06	97.45	216.06	224.88	229.28	
	Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	455.13	94.45	455.13	473.70	482.98	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	2.126 Layanan	78,313.03	78,302.75	78,313.03	81,508.20	83,105.76	
	Layanan Manajemen SDM Internal							52,669.07	29,503.51	52,669.07	54,817.97	55,892.39	
	Pengembangan SDM		5.360 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	5.266 Orang	20,409.32	7,870.25	20,409.32	21,242.02	21,658.36	
	Administrasi Kepegawaian		1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	1.200 Orang	32,055.28	21,547.06	32,055.28	33,363.14	34,017.05	
	Pengelolaan Jabatan Fungsional		275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	204.47	86.20	204.47	212.81	216.98	
Kegiatan	4722 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							1,250.90	737.15	1,250.90	1,301.94	1,327.46	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas UKI		82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,250.90	737.15	1,250.91	1,301.94	1,327.46	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian dan Pengawasan Internal		74 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	69 Laporan	458.15	376.42	458.15	476.84	486.19	
	Rekomendasi Manajemen Risiko		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	102.85	48.12	102.85	107.04	109.14	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	689.91	312.61	689.91	718.06	732.13	
Kegiatan	4725 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							506,431.60	361,341.94	506,431.58	518,090.53	528,245.10	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Implementasi *Blueprint* TIK DJPB		3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							263,251.92	359,638.67	263,251.92	273,992.60	279,362.86	
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	89,745.88	129,396.44	89,745.88	93,407.51	95,238.30	
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker		9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	117,920.51	164,463.87	117,920.51	122,731.67	125,137.21	
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Perbendaharaan		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	55,585.53	65,778.36	55,585.53	57,853.42	58,987.35	
	Sistem Informasi Pemerintahan							243,179.68	1,703.27	243,179.66	244,097.94	248,882.26	
	Sistem Pengelolaan Data Analitik		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	837.68	180.68	837.68	871.86	888.95	
	Sistem Aplikasi BUN		3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	3 Modul Aplikasi	7,551.80	308.13	7,551.80	7,859.91	8,013.97	
	Sistem Aplikasi Perbendaharaan		1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	5,067.78	518.72	5,067.78	5,274.55	5,377.93	
	Sistem Aplikasi Satker		1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	7,483.63	159.08	7,483.63	7,788.97	7,941.63	
	Software Hardware SPAN SAKTI dan MPN		5 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	5 Sistem Informasi	220,673.50	-	220,673.50	220,673.50	224,998.70	
	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen 2		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	917.12	247.82	917.12	954.54	973.25	
	Sistem Monev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)		2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	270.15	88.32	270.15	281.18	286.69	
	Sistem Layanan *Platform* Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	378.00	200.51	378.00	393.43	401.14	
Kegiatan	4728 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							32,791.98	22,521.01	38,369.26	41,840.49	43,415.22	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							25,843.49	19,105.96	31,420.77	34,744.16	36,179.81	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	256.35	58.11	256.35	266.81	272.04	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,386.15	500.00	1,386.15	1,442.71	1,470.98	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,335.45	4,674.86	4,335.45	4,512.33	4,600.77	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	19,865.54	13,873.00	25,442.82	28,522.31	29,836.01	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							3,325.13	2,508.59	3,325.13	3,325.13	3,390.30	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		101 unit	1 unit	101 unit	101 unit	101 unit	420.00	53.00	420.00	420.00	428.23	
	Gedung/Bangunan		589 m2	1.178 m2	1.178 m2	1.178 m2	1.178 m2	823.80	1,595.43	823.80	823.80	839.94	
	Kendaraan Bermotor		3 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2,081.33	860.16	2,081.33	2,081.33	2,122.12	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							3,623.37	906.46	3,623.37	3,771.20	3,845.12	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	318.82	23.04	318.82	331.83	338.33	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	730.37	250.00	730.37	760.16	775.06	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	108.21	129.42	108.21	112.63	114.83	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	157.60	139.72	157.60	164.03	167.24	
	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,927.17	139.35	1,927.17	2,005.80	2,045.11	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	381.20	224.93	381.20	396.76	404.53	
Kegiatan	4729 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							1,094.98	544.42	1,094.98	1,139.66	1,161.99	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektifitas komunikasi		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Komunikasi Publik							1,094.98	544.42	1,094.98	1,139.66	1,161.99	
	Layanan Kepustakaan		12 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	58.68	47.68	58.68	61.07	62.27	
	Pembinaan/Edukasi Publik		3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	186.66	100.00	186.66	194.28	198.08	
	Kehumasan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	458.00	118.80	458.00	476.69	486.03	
	Publikasi Media Cetak		5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	266.64	227.94	266.64	277.52	282.96	
	Publikasi Media Elektronik		3 Media	1 Media	3 Media	3 Media	3 Media	125.00	50.00	125.00	130.10	132.65	
Kegiatan	4730 Pengelolaan Organisasi dan SDM							8,250.20	7,462.35	8,250.20	8,586.81	8,755.11	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*		94	100	100	100	100						
	Indeks Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia			87	87	87	87						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							20.40	20.40	20.40	21.23	21.65	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	20.40	20.40	20.40	21.23	21.65	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							6,172.49	6,927.85	6,172.49	6,424.32	6,550.24	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1,748.20	2,503.56	1,748.20	1,819.52	1,855.19	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,424.29	4,424.29	4,424.29	4,604.80	4,695.05	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,057.32	514.10	2,057.32	2,141.26	2,183.23	
	Pengembangan SDM		538 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	2,057.32	514.10	2,057.32	2,141.26	2,183.23	
Kegiatan	4731 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							163.01	96.45	163.01	169.66	172.99	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas		100	100	100	100	100						
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti		98%										
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							163.01	96.45	163.01	169.66	172.99	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	163.01	96.45	163.01	169.66	172.99	
Kegiatan	4733 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							31,738.52	31,196.86	44,964.79	45,384.14	46,524.33	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	84.1	84.1	84.1	84.1						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							20.00	2,129.87	3,326.68	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	20.00	2,129.87	3,326.68			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28,910.00	22,857.80	35,185.86	39,538.09	41,320.57	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,858.37	2,640.72	2,299.11	2,646.90	2,740.11	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	732.96	499.75	589.25	678.38	702.27	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	259.70	173.29	203.20	233.93	242.17	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	25,058.97	19,544.04	32,094.31	35,978.87	37,636.01	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,870.28	5,848.98	5,817.33	5,115.07	4,447.05	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kendaraan Bermotor		-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	5,848.98	2,082.96	2,082.96	2,082.96	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		11 Unit	-	147 Unit	147 Unit	147 Unit	500.00	-	2,364.09	2,364.09	2,364.09	
	Gedung/Bangunan		610 m2	-	610 m2	610 m2	-	1,370.28	-	1,370.28	668.02	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							938.24	360.20	634.93	730.97	756.72	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.05	-	10.28	11.83	12.25	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	411.29	107.67	292.46	336.70	348.56	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		84 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	90.00	23.56	65.80	75.76	78.43	
	Laporan Keuangan Unit		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	160.00	41.89	73.19	84.26	87.23	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	102.70	26.89	76.08	87.58	90.67	
	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	160.20	160.20	117.13	134.85	139.60	
Kegiatan	4734 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							8,242.59	1,788.49	6,283.22	7,233.68	7,488.43	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Komunikasi		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							8,242.59	1,788.49	6,283.22	7,233.68	7,488.43	
	Layanan Informasi dan Dokumentasi		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1,386.09	573.94	1,192.38	1,372.75	1,421.09	
	Strategi Komunikasi		9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3,851.36	374.05	2,732.42	3,145.76	3,256.54	
	Publikasi Media Elektronik		6 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	2,205.14	740.50	1,773.50	2,041.78	2,113.68	
	Iklan dan Media Placement		5 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	800.00	100.00	584.92	673.40	697.11	
Kegiatan	4735 Pengelolaan Organisasi dan SDM							8,513.83	5,556.07	7,583.89	8,271.91	8,495.66	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit		100	100	100	100	100						
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM		96%	96%	96%	96%	96%						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							625.56	117.91	457.37	526.56	545.10	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	625.56	117.91	457.37	526.56	545.10	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							4,543.23	4,303.95	4,587.02	4,821.70	4,923.94	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	45.00	145.00	32.90	37.88	39.21	
	Standar Mutu Layanan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	494.08	154.79	397.37	457.48	473.59	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,004.15	4,004.15	4,156.75	4,326.34	4,411.14	
	Layanan Manajemen SDM Internal							3,345.04	1,134.22	2,539.51	2,923.66	3,026.62	
	Pengelolaan Jafung		1 Orang	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	42.70	-	31.22	35.94	37.21	
	Pengembangan SDM		512 Orang	512 Orang	533 Orang	533 Orang	533 Orang	2,989.08	976.25	2,246.31	2,586.11	2,677.19	
	Administrasi Kepegawaian		512 Orang	512 Orang	533 Orang	533 Orang	533 Orang	313.26	157.97	261.97	301.60	312.22	
Kegiatan	4736 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							404.10	94.00	303.51	349.43	361.73	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Integritas Organisasi		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							404.10	94.00	303.51	349.43	361.73	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		33 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	404.10	94.00	303.51	349.43	361.73	
Kegiatan	4737 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							38.17	-	-	-	-	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK		95	-	-	-	-						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							38.17	-	-	-	-	
	Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi		6 Dokumen	-	-	-	-	38.17	-	-	-	-	
Kegiatan	4738 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							28,405.06	16,531.63	33,306.96	36,172.69	37,544.95	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Kualitas Pengelolaan Anggaran		100 (Indeks)	-	-	-	-						
	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu		-	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							2,517.46	670.48	2,517.46	2,517.46	2,566.80	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		70 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	2,517.46	670.48	2,517.46	2,517.46	2,566.80	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21,036.88	13,491.31	25,938.78	28,791.30	30,018.89	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		4 Dokumen	-	-	-	-	92.04	-	-	-	-	
	Dukungan Pimpinan dan Protokoler		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,099.78	498.43	2,099.78	2,185.45	2,228.28	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,224.89	349.60	1,224.89	1,274.87	1,299.85	
	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		33 Layanan	4 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	160.23	30.90	160.23	166.77	170.03	
	Layanan Barang Milik Negara		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	33.34	92.04	95.79	97.67	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	17,459.94	12,579.03	22,361.84	25,068.42	26,223.04	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							4,526.96	2,249.85	4,526.96	4,526.96	4,615.69	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		275 Unit	133 Unit	275 Unit	275 Unit	275 Unit	1,635.46	1,403.75	1,635.46	1,635.46	1,667.51	
	Gedung/Bangunan		800 m2	312 m2	800 m2	800 m2	800 m2	1,599.11	846.10	1,599.11	1,599.11	1,630.45	
	Kendaraan Bermotor		3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1,292.40	-	1,292.40	1,292.40	1,317.73	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							323.76	119.99	323.76	336.97	343.58	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	51.68	11.45	51.68	53.79	54.85	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		2 Dokumen	-	-	-	-	119.98	-	-	-	-	
	Laporan Keuangan Unit		4 Laporan	-	-	-	-	108.17	-	-	-	-	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		2 Dokumen	-	-	-	-	43.93	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	58.20	228.15	237.46	242.11	
	Layanan Manajemen Kinerja		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	50.34	43.93	45.72	46.62	
Kegiatan	4739 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							896.54	200.02	896.54	933.12	951.40	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Ekosistem kehumasan		100 (Indeks)	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Efektivitas Komunikasi		-	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)	100 (Indeks)						
Output	Komunikasi Publik							896.54	200.02	896.54	933.12	951.40	
	Layanan Kepustakaan		12 Layanan	-	-	-	-	107.36	-	-	-	-	
	Publikasi Media Cetak		60 Volume	-	-	-	-	789.18	-	-	-	-	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	200.02	896.54	933.12	951.40	
Kegiatan	4740 Pengelolaan Organisasi dan SDM							11,166.39	6,471.52	11,166.39	11,621.98	11,849.77	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Learning Organization (ITJEN)		90%	-	-	-	-						
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara		-	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							216.59	21.41	216.59	225.43	229.85	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I		5 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	216.59	21.41	216.59	225.43	229.85	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							4,841.72	4,303.74	4,841.72	5,039.26	5,138.03	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4,841.72	4,303.74	4,841.72	5,039.26	5,138.03	
	Layanan Manajemen SDM Internal							5,992.12	2,146.36	6,108.09	6,357.29	6,481.90	
	Pengembangan SDM		709 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang	5,661.98	2,056.06	5,661.98	5,892.99	6,008.49	
	Administrasi Kepegawaian		709 Orang	-	-	-	-	75.37	-	-	-	-	
	Pengelolaan Jafung		488 Orang	-	-	-	-	254.77	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM		-	680 Orang	680 Orang	680 Orang	680 Orang		90.30	446.10	464.30	473.40	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							115.97	-	-	-	-	
	Laporan Penilaian Integritas		13 Laporan	-	-	-	-	115.97	-	-	-	-	
Kegiatan	4741 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							24,640.19	12,959.27	24,640.19	25,645.50	26,148.16	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		73 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	60 Indeks	60 Indeks						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti		82 Persen	82 Persen	82 Persen	82 Persen	82 Persen						
Output	Layanan Manajemen SDM Internal							147.79	-	-	-	-	
	Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai		1 Rekomendasi	-	-	-	-	147.79	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							24,492.40	12,959.27	24,640.19	25,645.50	26,148.16	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal		3 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	924.34	362.43	924.34	962.05	980.90	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara		3 Rekomendasi	48 Rekomendasi	48 Rekomendasi	48 Rekomendasi	48 Rekomendasi	5,309.57	2,364.05	5,309.57	5,526.20	5,634.51	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara		2 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	1,198.54	1,075.05	1,198.54	1,247.44	1,271.89	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		3 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	2,006.25	1,858.23	2,006.25	2,088.10	2,129.03	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L		8 Rekomendasi	87 Rekomendasi	87 Rekomendasi	87 Rekomendasi	87 Rekomendasi	7,584.06	3,610.61	7,584.06	7,893.49	8,048.20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Hasil Penindakan		2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1,413.65	1,054.66	1,413.65	1,471.33	1,500.16	
	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN		5 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	951.74	200.00	951.74	990.58	1,009.99	
	Laporan Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan		2 Laporan	-	-	-	-	385.89	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	32.61	13.61	32.61	33.94	34.61	
	Laporan Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	221.95	347.03	221.95	231.01	235.54	
	Rekomendasi Komite Audit		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	477.04	517.99	477.04	496.50	506.24	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan LK BA BUN		-	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	-	127.89	147.79	153.82	156.83	
	Laporan Kegiatan Intelijen dan *Surveillance*		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	215.32	385.89	401.63	409.50	
	Laporan Pengembangan Audit *Algorithm* (PU)		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,184.51	414.51	1,184.51	1,232.83	1,257.00	
	Laporan Pengembangan Pengawasan Keamanan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Tiga Lini (PU)		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,603.44	468.05	1,603.44	1,668.86	1,701.57	
	Laporan Kegiatan Intelijen dan *Surveillance* (PU)		1 Laporan	-	-	-	-	459.34	-	-	-	-	
	Implementasi Pengawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Kementerian Keuangan (PU)		1 Rekomendasi	-	-	-	-	739.48	-	-	-	-	
	Pemantauan, Penjaminan Kualitas, dan Asistensi pelaksanaan SPI Terintegrasi (PU)		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	329.86	1,198.82	1,247.73	1,272.18	
Kegiatan	4743 Legislasi dan Litigasi							183.70	183.70	183.70	191.19	194.94	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas penyelesaian peraturan		94	94	94	94	94						
Output	Peraturan Lainnya							151.46	151.46	151.45	157.63	160.72	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		4 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	4 Peraturan	151.46	151.46	151.45	157.63	160.72	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							32.25	32.25	32.25	33.56	34.22	
	Layanan Bantuan Hukum		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	32.25	32.25	32.25	33.56	34.22	
Kegiatan	4745 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							12,493.52	4,933.05	15,164.44	16,688.79	17,377.29	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							10,584.39	4,933.05	13,255.31	14,773.76	15,424.70	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Layanan	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	11.63	-	11.62	12.10	12.30	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	741.47	-	741.47	771.72	786.85	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	317.79	-	317.79	330.76	337.24	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	9,513.50	4,933.05	12,184.43	13,659.18	14,288.31	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,764.07	-	1,764.07	1,764.07	1,798.65	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		14 Unit	-	14 Unit	14 Unit	14 Unit	235.60	-	235.60	235.60	240.22	
	Gedung/Bangunan		6.788 m2	-	6.788 m2	6.788 m2	6.788 m2	1,528.47	-	1,528.47	1,528.47	1,558.43	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							145.05	-	145.06	150.96	153.94	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.63	-	27.63	28.75	29.32	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.55	-	27.55	28.67	29.24	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.40	-	80.40	83.68	85.32	
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.48	-	9.48	9.86	10.06	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4746 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							2,051.75	1,532.03	2,051.75	2,135.45	2,177.31	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)	3.55 (skala 4)						
Output	Komunikasi Publik							2,051.75	1,532.03	2,051.75	2,135.45	2,177.31	
	Pembinaan/Edukasi Publik		4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	982.93	-	982.93	1,023.03	1,043.08	
	Contact Center		10.000 Layanan	1.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	10.000 Layanan	1,018.49	1,532.03	1,018.49	1,060.04	1,080.82	
	Publikasi Media Cetak		10 Layanan	-	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	50.33	-	50.33	52.38	53.41	
Kegiatan	4747 Pengelolaan Organisasi dan SDM							9,675.41	7,280.41	9,675.41	10,070.16	10,267.54	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		94%	94%	94%	94%	94%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							7,796.44	7,280.41	7,796.44	8,114.52	8,273.57	
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan		2 Layanan	4 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	233.10	413.15	233.10	242.61	247.37	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		4 Layanan	-	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	156.57	-	156.57	162.95	166.15	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	7,406.77	6,867.26	7,406.77	7,708.96	7,860.05	
	Layanan Manajemen SDM Internal							1,878.98	-	1,878.98	1,955.64	1,993.97	
	Pengembangan SDM		243 Orang	-	243 Orang	243 Orang	243 Orang	1,710.44	-	1,710.44	1,780.23	1,815.12	
	Administrasi Kepegawaian		243 Orang	-	243 Orang	243 Orang	243 Orang	168.53	-	168.53	175.41	178.85	
Kegiatan	4748 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							41.51	-	41.51	43.21	44.05	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		97%	97%	97%	97%	97%						
	Indeks efektivitas UKI		75	75	75	75	75						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							41.51	-	41.51	43.21	44.05	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		5 Rekomendasi	-	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	41.51	-	41.51	43.21	44.05	
Kegiatan	4749 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							55,418.00	65,037.55	51,022.45	53,002.16	54,041.00	***LNSW***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		92%	92%	92%	92%	92%						
Output	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							48,375.69	62,292.55	48,375.69	50,349.42	51,336.26	
	Operasional Sistem INSW		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	23,510.81	28,895.00	23,510.81	24,470.05	24,949.66	
	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	24,249.40	32,745.30	24,249.40	25,238.77	25,733.45	
	Lisensi Sistem INSW		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	615.48	652.25	615.48	640.60	653.15	
	Sistem Informasi Pemerintahan							4,542.32	-	146.76	152.74	155.74	
	Design Teknis Perancangan Sistem		1 Sistem Informasi	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	128.28	-	128.28	133.51	136.13	
	Infrastruktur Sistem INSW		3 Sistem Informasi	-	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	4,414.04	-	18.48	19.23	19.61	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Informasi Pemerintahan							2,500.00	2,745.00	2,500.00	2,500.00	2,549.00	
	Sistem INSW Generasi II (PN)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,500.00	2,745.00	2,500.00	2,500.00	2,549.00	
Kegiatan	4750 Legislasi dan Litigasi							10,757.39	5,556.91	10,757.39	11,196.29	11,415.74	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Reformasi Hukum		95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks	95.5 Indeks						
	Indeks Kualitas Penanganan Regulasi		95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks	95 Indeks						
	Indeks Kualitas Advokasi Keuangan Negara		80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks	80 Indeks						
	Indeks efektivitas penanganan/penyelesaian regulasi (SETJEN)		95 Indeks	0	0	0	0						
	Indeks putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan		90 Indeks	0	0	0	0						
Output	Peraturan Menteri							2,065.02	407.83	2,065.02	2,149.27	2,191.39	
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Telaahan Hukum		105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	105 PerMen	2,065.02	407.83	2,065.02	2,149.27	2,191.39	
	Peraturan lainnya							162.48	5.91	162.48	169.11	172.43	
	Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan		85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	85 Peraturan	162.48	5.91	162.48	169.11	172.43	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							8,529.90	5,143.17	8,529.90	8,877.91	9,051.92	
	Layanan Hukum		100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	17.66	10.86	17.66	18.38	18.75	
	Layanan Bantuan Hukum		324 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	162 Layanan	8,512.23	5,132.30	8,512.23	8,859.53	9,033.18	
Kegiatan	4751 Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*)							28,819.77	7,794.26	25,097.14	26,121.12	26,633.09	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks rata-rata capaian kualitas kajian/rekomendasi		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Indeks Penyelesaian Administrasi Sengketa Pajak		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks						
	Tingkat Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Pushaka		100%	88.50%	88.50%	88.50%	88.50%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							17,173.08	4,527.96	17,153.75	17,853.64	18,203.57	
	Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan		12 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	5,003.01	1,012.51	5,003.01	5,207.14	5,309.20	
	Perizinan Profesi Keuangan		260 Rekomendasi Kebijakan	-	260 Rekomendasi Kebijakan	260 Rekomendasi Kebijakan	260 Rekomendasi Kebijakan	36.80	-	36.80	38.31	39.06	
	Rekomendasi/Kajian Perpajakan		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1,267.34	826.78	1,267.34	1,319.05	1,344.90	
	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		7 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	10,846.60	2,688.66	10,846.60	11,289.14	11,510.41	
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	19.32	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi							1,167.38	-	1,167.38	1,215.01	1,238.82	
	Koordinasi Tugas Komite Pengawas Perpajakan		6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1,167.38	-	1,167.38	1,215.01	1,238.82	
	Penanganan Perkara							924.26	268.50	924.26	961.97	980.83	
	Administrasi Persidangan		13.000 Perkara	15.000 Perkara	15.000 Perkara	15.000 Perkara	15.000 Perkara	924.26	268.50	924.26	961.97	980.83	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							7,999.44	2,997.80	5,851.75	6,090.50	6,209.87	
	Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri		162 Laporan	538 Laporan	538 Laporan	538 Laporan	538 Laporan	5,851.75	2,997.80	5,851.75	6,090.50	6,209.87	
	Dukungan Manajerial Pelaksanaan PFM-MDTF		1 Laporan	-	-	-	-	2,147.69	-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							1,555.61	-	-	-	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan		227 Laporan	-	-	-	-	1,555.61	-	-	-	-	
Kegiatan	4752 Pelaksanaan Tugas Khusus *(Special Mission)* Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan							3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	3,934,153.05	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Imbal Hasil Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan		100	100	100	100	100						
	Indeks Luaran Riset dan Talenta yang Berkualitas		100	100	100	100	100						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							390,850.95	192,714.20	192,714.20	192,714.20	192,714.20	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	65,905.75	16,501.03	16,501.03	16,501.03	16,501.03	
	Sosialisasi Program Layanan LPDP		10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,708.62	1,708.62	1,708.62	1,708.62	1,708.62	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	323,236.58	174,504.55	174,504.55	174,504.55	174,504.55	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,878.31	2,014.82	2,014.82	2,014.82	2,014.82	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		200 Orang	228 Orang	228 Orang	228 Orang	228 Orang	2,878.31	2,014.82	2,014.82	2,014.82	2,014.82	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							571.83	400.28	400.28	400.28	400.28	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	571.83	400.28	400.28	400.28	400.28	
	Hasil Kelolaan Dana							3,526,335.02	3,230,754.77	3,230,754.77	3,230,754.77	3,230,754.77	
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU		10.667 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	10.402 Milyar	5,161.32	3,612.93	3,612.93	3,612.93	3,612.93	
	Seleksi Beasiswa		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	57,338.50	57,338.50	57,338.50	57,338.50	
	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Beasiswa		-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	-	2,608,369.79	2,608,369.79	2,608,369.79	2,608,369.79	
	Penilaian Program dan Penerima Beasiswa		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	773.00	773.00	773.00	773.00	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan		3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi		23 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
	Persiapan Keberangkatan (PK) Penerima Beasiswa		-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	-	9,001.19	9,001.19	9,001.19	9,001.19	
	Seleksi Riset		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	664.37	664.37	664.37	664.37	
	Penilaian Program dan Penerima Riset		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	994.99	994.99	994.99	994.99	
	Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa		10.500 Orang	-	-	-	-	1,750,192.77	-	-	-	-	
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset		25 Orang	-	-	-	-	1,220,980.93	-	-	-	-	
	Hasil Kelolaan Dana							13,516.94	508,268.98	508,268.98	508,268.98	508,268.98	
	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)		1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	5,070.97	73,005.22	73,005.22	73,005.22	73,005.22	
	Beasiswa Afirmasi (PN)		1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	8,445.97	324,236.48	324,236.48	324,236.48	324,236.48	
	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Riset (PN)		-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	-	111,027.29	111,027.29	111,027.29	111,027.29	
Kegiatan	4753 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							1,219,520.29	739,821.52	1,477,820.72	1,618,417.82	1,683,579.05	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100	100	100	100	100						
Output	Peraturan lainnya							590.23	-	590.24	614.31	626.35	
	Peraturan lainnya terkait Keuangan, Kinerja dan Risiko		3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	84.94	-	84.94	88.40	90.13	
	Peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BMN		3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	3 Peraturan	505.30	-	505.30	525.91	536.22	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							955,790.32	553,082.84	1,206,705.09	1,346,788.90	1,406,770.97	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Tingkat Kementerian		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,187.76	760.13	2,187.76	2,277.02	2,321.65	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,365.37	163.00	2,365.37	2,461.88	2,510.13	
	Layanan Pengadaan		50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1,028.49	52.20	1,028.49	1,070.45	1,091.43	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,270.12	81.64	1,270.12	1,321.94	1,347.85	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	67,508.46	52,445.00	67,508.46	70,262.81	71,639.96	
	Layanan Barang Milik Negara (BMN)		15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	110.67	66.93	110.67	115.18	117.44	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	881,319.46	499,513.93	1,132,234.22	1,269,279.62	1,327,742.51	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							251,484.01	183,255.71	258,834.01	258,847.70	263,777.04	
	Kendaraan Bermotor		5 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1,890.58	12,911.51	1,890.58	1,890.58	1,927.63	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		2446 Unit	1671 Unit	1671 Unit	1671 Unit	1671 Unit	65,457.79	52,211.38	65,457.79	65,471.48	66,754.72	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	250	250	250	250	-	7,349.99	7,349.99	7,349.99	7,349.99	
	Gedung/Bangunan		40.025 m2	134.069 m2	134.069 m2	134.069 m2	134.069 m2	184,135.65	110,782.83	184,135.65	184,135.65	187,744.70	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							11,655.73	3,482.97	11,691.38	12,166.91	12,404.69	
	Rencana Kerja dan Anggaran Tingkat Kementerian		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	740.00	421.74	740.00	770.19	785.29	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,408.79	1,542.54	1,408.79	1,466.27	1,495.01	
	Dokumen Perbendaharaan Tingkat Kementerian		20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	447.79	247.34	447.79	466.06	475.19	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	275.96	40.26	275.96	287.22	292.85	
	Laporan Keuangan Tingkat Kementerian		4 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	795.69	378.14	795.69	828.15	844.39	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	748.01	24.26	748.01	778.53	793.78	
	Laporan Kinerja Tingkat Kementerian		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	153.77	23.07	153.77	160.04	163.18	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	389.84	37.03	389.84	405.75	413.70	
	Rencana Strategis Tingkat Kementerian		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	364.20	-	364.20	379.06	386.49	
	Rencana Strategis Tingkat Unit		1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	239.21	-	239.21	248.96	253.84	
	Implementasi PUG		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	388.45	124.38	388.45	404.30	412.22	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tingkat Kementerian		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	211.16	211.07	211.16	219.77	224.08	
	Manajemen Risiko Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	35.64	35.64	35.64	35.64	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5,492.87	397.50	5,492.87	5,716.97	5,829.03	
Kegiatan	4755 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							26,534.67	8,616.73	26,534.67	27,617.28	28,158.58	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi Publik Kementerian Keuangan yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks						
Output	Komunikasi Publik							26,534.67	8,616.73	26,534.67	27,617.28	28,158.58	
	Layanan Kepustakaan		12 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1,388.93	50.00	1,388.93	1,445.59	1,473.93	
	Pembinaan/Edukasi Publik		48 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	8,838.60	2,900.00	8,838.60	9,199.21	9,379.52	
	Pengembangan *Contact Center* Kemenkeu 134		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1,557.06	338.00	1,557.06	1,620.58	1,652.35	
	Strategi Komunikasi		75 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	2,036.11	667.00	2,036.11	2,119.18	2,160.72	
	Kehumasan		19 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	6,590.56	2,759.82	6,590.56	6,859.45	6,993.90	
	Publikasi Media Cetak		37 Media	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	1,026.00	150.00	1,026.00	1,067.86	1,088.79	
	Publikasi Media Elektronik		13 Media	12 Media	12 Media	12 Media	12 Media	3,608.46	1,178.00	3,608.46	3,755.69	3,829.30	
	Publikasi Media *Website*		12 Media	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	488.97	173.91	488.97	508.92	518.89	
	Iklan dan Media *Placement*		5 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,000.00	400.00	1,000.00	1,040.80	1,061.20	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	4757 Pengelolaan Organisasi dan SDM							26,745,527.97	27,309,355.86	26,742,853.06	26,754,823.04	26,760,807.94	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal		100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)						
	Indeks Evaluasi AKIP Setjen		100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)						
Output	Peraturan Menteri							72.66	99.96	72.66	75.62	77.11	
	Peraturan Menteri terkait Keorganisasian		1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	72.66	99.96	72.66	75.62	77.11	
	Peraturan lainnya							3,088.53	-	3,088.53	3,214.54	3,277.54	
	Peraturan Lainnya terkait Keorganisasian		11 Peraturan	-	11 Peraturan	11 Peraturan	11 Peraturan	2,758.76	-	2,758.76	2,871.31	2,927.59	
	Peraturan Lainnya terkait SDM		52 Peraturan	-	52 Peraturan	52 Peraturan	52 Peraturan	329.77	-	329.77	343.23	349.95	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							807.84	202.00	807.84	840.80	857.28	
	Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	807.84	202.00	807.84	840.80	857.28	
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							235,752.23	98,816.03	235,752.23	245,370.92	250,180.19	
	Kebijakan Pengelolaan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	233,502.38	98,816.03	233,502.38	243,029.28	247,792.65	
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,249.84	-	2,249.84	2,341.64	2,387.53	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							26,461,416.52	27,197,513.98	26,458,741.61	26,459,119.85	26,459,308.96	
	Kesehatan Pegawai		38.815 Layanan	38.815 Layanan	38.815 Layanan	38.815 Layanan	38.815 Layanan	6,805.88	5,083.41	6,805.88	7,083.56	7,222.40	
	Laporan Analisa Beban Kerja		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	162.32	91.44	162.32	168.94	172.25	
	Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Organisasi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	512.73	85.51	512.73	533.65	544.11	
	Laporan Hasil Survey Keorganisasian		2 Laporan	-	-	-	-	2,674.91	-	-	-	-	
	Laporan Pengelolaan Pelayanan Publik Kementerian Keuangan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	401.30	186.25	401.20	417.68	425.86	
	Laporan Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenkeu		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	96.00	96.00	96.00	96.00	
	Dokumen Infrastruktur Organisasi Kementerian Keuangan		-	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	-	361.90	361.90	361.90	361.90	
	Asistensi Pembangunan. Penilaian. dan Monev Keberlanjutan ZI/WBK/WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu		150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	360.32	200.73	360.22	375.02	382.37	
	Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	183.60	43.90	183.50	191.09	194.84	
	Laporan Penyusunan Strategi Organisasi dan Penyempurnaan Bisnis Proses Kementerian Keuangan		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	844.35	580.65	844.25	878.80	896.02	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	26,449,471.11	27,190,784.19	26,449,013.61	26,449,013.21	26,449,013.22	
	Layanan Manajemen SDM Internal							44,390.20	12,723.89	44,390.20	46,201.32	47,106.87	
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Eselon I		2.432 Orang	2.432 Orang	2.432 Orang	2.432 Orang	2.432 Orang	7,933.30	1,186.05	7,933.30	8,256.98	8,418.82	
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Kementerian Keuangan		74.000 Orang	60.000 Orang	74.000 Orang	74.000 Orang	74.000 Orang	2,678.82	802.37	2,678.82	2,788.11	2,842.76	
	Pengelolaan Jafung		7 Layanan	1 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	901.24	108.15	901.24	938.01	956.40	
	Rekrutmen Pegawai Kemenkeu		2.100 Orang	4.350 Orang	4.350 Orang	4.350 Orang	4.350 Orang	9,562.50	7,832.16	9,562.50	9,952.65	10,147.72	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		14.047 Orang	13.468 Orang	13.468 Orang	13.468 Orang	13.468 Orang	15,074.45	997.82	15,074.45	15,689.49	15,997.00	
	Pengembangan SDM Tingkat Kementerian Keuangan		800 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	8,239.89	1,797.34	8,239.89	8,576.08	8,744.17	
Kegiatan	4759 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi		92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi		92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks	92.5 Indeks						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,271.28	573.92	1,271.28	1,323.15	1,349.09	
Kegiatan	4761 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi							2,852.18	-	-	-	-	***Setjen***
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat *Downtime* Sistem TIK - Setjen		0.1 Persen	-	-	-	-						
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Setjen		95 Persen	-	-	-	-						
	TIngkat Pemulihan Layanan TIK		100 Persen	-	-	-	-						
Output	Peraturan lainnya							13.00	-	-	-	-	
	Peraturan/Kebijakan Terkait TIK		2 Peraturan	-	-	-	-	13.00	-	-	-	-	
	Sistem Informasi Pemerintahan							2,839.18	-	-	-	-	
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		17 Layanan	-	-	-	-	523.05	-	-	-	-	
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	194.02	-	-	-	-	
	Sistem Pelaporan Keuangan Indonesia		1 Modul Aplikasi	-	-	-	-	108.48	-	-	-	-	
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	1,875.36	-	-	-	-	
	Sistem Informasi Property Nasional (PU)		1 Modul Aplikasi	-	-	-	-	138.27	-	-	-	-	
Kegiatan	6199 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	***DJP***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						
Output	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara							330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	
	Kehumasan Internal DJP		1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	330.80	169.10	330.80	344.29	351.04	
Kegiatan	6389 Pelaksanaan Tugas Khusus *(Special Mission)* Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional							43,013.92	43,013.92	44,268.22	43,013.92	43,013.92	***DJPPR***
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta pelaksanaan tugas khusus lain yang efektif dan efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas		100	100	100	100	100						
	Persentase Penyaluran Dana Hibah		85	85	85	85	85						
Output	Komunikasi Publik							446.48	446.48	446.48	446.48	446.48	
	Strategi Komunikasi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	446.48	446.48	446.48	446.48	446.48	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6.70	268.20	6.70	6.70	6.70	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.70	268.20	6.70	6.70	6.70	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							36,472.73	36,796.86	36,472.73	36,472.73	36,472.73	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi dan Kinerja		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2,403.23	2,727.36	2,403.23	2,403.23	2,403.23	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	34,069.51	34,069.51	34,069.51	34,069.51	34,069.51	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							333.30	75.48	1,587.60	333.30	333.30	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	333.30	75.48	333.30	333.30	333.30	
	Gedung dan Bangunan		-	-	500 m2	-	-	-	-	1,254.30	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							760.45	760.45	760.45	760.45	760.45	
	Pengembangan SDM		38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	760.45	760.45	760.45	760.45	760.45	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							859.75	873.75	859.75	859.75	859.75	
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.85	494.85	480.85	480.85	480.85	
	Rekomendasi Satuan Pemeriksaan Intern		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.60	50.60	50.60	50.60	50.60	
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	328.30	328.30	328.30	328.30	328.30	
	Hasil Kelolaan Dana							4,134.51	3,792.70	4,134.51	4,134.51	4,134.51	
	Hasil Kelolaan Dana Investasi		597 Milyar	596 Milyar	596 Milyar	596 Milyar	596 Milyar	925.20	660.84	925.20	925.20	925.20	
	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman		17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	3,209.31	3,131.86	3,209.31	3,209.31	3,209.31	
Kegiatan	6609 Legislasi dan Litigasi							223.23	94.82	223.23	232.34	236.89	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95,5	95,5	95,5	95,5						
Output	Peraturan Lainnya							194.25	67.96	194.25	202.18	206.14	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	6 Peraturan	194.25	67.96	194.25	202.18	206.14	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							28.98	26.86	28.98	30.17	30.76	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	28.98	26.86	28.98	30.17	30.76	
Kegiatan	6885 Legislasi dan Litigasi							122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	***Itjen***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	NIlai Kinerja Regulasi		85 Indeks	-	-	-	-						
	Nilai Kinerja Reformasi Hukum		-	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks						
Output	Peraturan lainnya							122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	122.50	26.65	122.50	127.50	129.99	
Kegiatan	6990 Pelaksanaan Tugas Khusus *(Special Mission)* Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua							57,875.08	66,011.37	57,875.08	60,236.38	61,417.02	***DJPB***
Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus Badan Pengarah Papua yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Dukungan Kesekretariatan Badan Pengarah Papua		70%	70%	70%	70%	70%						
	Tingkat Efektivitas Sinkronisasi Harmonisasi Evaluasi dan Koordinasi Badan Pengarah Papua		70%	70%	70%	70%	70%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							25,544.89	11,344.85	25,544.89	26,587.12	27,108.23	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua		4 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	25,544.89	11,344.85	25,544.89	26,587.12	27,108.23	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							32,330.19	54,666.52	32,330.19	33,649.27	34,308.79	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	1,685.13	4,364.98	1,685.13	1,753.88	1,788.26	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	30,645.07	50,301.54	30,645.07	31,895.38	32,520.53	
Kegiatan	7061 Pelaksanaan Tugas Khusus *(Special Mission)* Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional							163,471.00	163,471.00	163,471.00	163,471.00	163,471.00	***DJKN (BLU-LMAN)***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Aset yang Inovatif dan Berkelanjutan. serta Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang Optimal dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas BLU -LMAN		100	100	100	100	100						
	Persentase Realisasi Manfaat Non Finansial Pengelolaan Aset - LMAN		100	100	100	100	100						
	Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN - LMAN		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							5,063.70	5,063.70	5,063.70	5,063.70	5,063.70	
	Kehumasan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4,178.24	4,178.24	4,178.24	4,178.24	4,178.24	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	559.03	697.03	559.03	559.03	559.03	
	Strategi Komunikasi		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	326.43	188.43	326.43	326.43	326.43	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	267.84	267.84	267.84	267.84	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	-	267.84	267.84	267.84	267.84	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							102,528.12	102,528.12	102,528.12	102,528.12	102,528.12	
	Kerumahtanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	893.91	893.91	893.91	893.91	893.91	
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	49.58	49.58	49.58	49.58	49.58	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	
	Layanan Bantuan Hukum		60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	673.87	673.87	673.87	673.87	673.87	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,711.27	100,711.27	100,711.27	100,711.27	100,711.27	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							4,154.44	170.64	2,004.04	2,004.04	2,004.04	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	2,004.04	170.64	2,004.04	2,004.04	2,004.04	
	Kendaraan Bermotor		5 Unit	-	-	-	-	2,150.40	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,924.40	2,924.40	2,924.40	2,924.40	2,924.40	
	Pengembangan SDM		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	2,600.80	2,770.80	2,600.80	2,600.80	2,600.80	
	Administrasi Kepegawaian		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	323.60	153.60	323.60	323.60	323.60	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							2,052.75	2,052.75	2,052.75	2,052.75	2,052.75	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66.22	66.22	66.22	66.22	66.22	
	Laporan Keuangan Unit		11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,421.61	1,421.61	1,421.61	1,421.61	1,421.61	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	370.87	370.87	370.87	370.87	370.87	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		5 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	194.06	194.06	194.06	194.06	194.06	
	Sistem Informasi Pemerintahan							994.03	1,477.04	994.03	994.03	994.03	
	Sistem TIK		18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	994.03	1,477.04	994.03	994.03	994.03	
	Pengelolaan Aset BUN							45,153.57	45,753.57	47,636.13	47,636.13	47,636.13	
	Perjanjian Pengelolaan Aset		190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	4,251.75	4,251.75	4,485.51	4,485.51	4,485.51	
	Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi		299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	38,869.18	40,149.83	41,006.23	41,006.23	41,006.23	
	Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	2,032.63	1,351.98	2,144.38	2,144.38	2,144.38	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	3,232.95	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)		-	1 Rekomendasi	-	-	-	-	3,232.95	-	-	-	
	Pengelolaan Aset BUN							600.00	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	
Kegiatan	7062 Pelaksanaan Tugas Khusus *(Special Mission)* Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara							15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	15,025.93	***BPPK***
Sasaran Kegiatan	Pendidikan Vokasi yang Berkualitas Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks mutu penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi		365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)	365 (indeks skala 400)						
Output	Pendidikan Tinggi							11,100.38	10,000.38	11,100.38	11,100.38	11,100.38	
	Penerimaan Mahasiswa Baru		7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	7.500 Orang	5,013.60	4,513.60	5,013.60	5,013.60	5,013.60	
	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama		1.000 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	1.250 Orang	6,086.78	5,486.78	6,086.78	6,086.78	6,086.78	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	2,025.30	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							1,000.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Gedung/Bangunan		-	522 m2	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal							900.26	900.26	900.26	900.26	900.26	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	900.26	900.26	900.26	900.26	900.26	
Kegiatan	7774 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							500,948.38	886,722.44	634,424.15	708,257.55	740,199.98	***BaTii***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran		100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							478,724.79	863,063.10	612,200.56	686,033.96	717,540.81	
	Kerumahtanggaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,281.23	3,213.66	3,281.23	3,415.10	3,482.03	
	Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	20.00	20.00	20.00	20.82	21.22	
	Layanan Perkantoran		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	475,423.56	859,829.45	608,899.34	682,598.05	714,037.55	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							22,219.59	23,655.34	22,219.59	22,219.59	22,655.17	
	Kendaraan Bermotor		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	430.08	430.08	430.08	430.08	438.51	
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		15 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	5.39	1,437.14	5.39	5.39	5.49	
	Gedung/Bangunan		500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	21,784.12	21,788.12	21,784.12	21,784.12	22,211.17	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Rencana Strategis Tingkat Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7775 Pengelolaan Organisasi dan SDM							6,715.60	16,886.02	6,715.60	6,989.60	7,126.59	***BaTii***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Pengembangan Talenta Digital		95%	95%	95%	95%	95%						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Perkantoran		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25	
	Layanan Manajemen SDM Internal							2,899.81	4,852.47	2,899.81	3,018.17	3,077.34	
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Eselon I		314 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	326.64	992.20	326.64	339.97	346.63	
	Pengelolaan Jafung		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	424.12	797.21	424.12	441.43	450.08	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		314 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	2,149.05	3,063.06	2,149.05	2,236.77	2,280.63	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7776 Manajemen Sistem Informasi							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	***BaTii***
Sasaran Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi yang Berkualitas dan Efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi yang Bernilai Tambah		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	3,456.48	7,997.76	3,456.48	3,597.51	3,668.02	
	Sistem Informasi Property Nasional (PU) (PPPK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,394.27	1.00	2,394.27	2,394.27	2,441.20	
	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU) (DJPK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1,521.55	1.00	1,521.55	1,548.72	1,579.07	
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	10,709.11	12,777.56	10,709.11	11,146.05	11,364.51	
	Dukungan Teknis Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	194,708.81	618,606.67	194,708.81	194,708.81	198,525.14	
	Layanan Pusat Data dan Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7777 Intelijen Ekonomi dan Keuangan							-	2,175.70	2,175.70	2,175.70	2,175.70	***BaTii***
Sasaran Kegiatan	Intelijen Ekonomi dan Keuangan yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Intelijen Ekonomi Keuangan		100 (Indeks)	-	-	-	-						
	Indeks Efektivitas Rekomendasi Intelijen Keuangan		-	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1,180.96	1,180.96	1,180.96	1,180.96	
	Kebijakan Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1,180.96	1,180.96	1,180.96	1,180.96	
	Pengawasan dan Pengendalian Layanan							-	994.74	994.74	994.74	994.74	
	Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	994.74	994.74	994.74	994.74	
Kegiatan	7778 Manajemen Transformasi Strategik							2,958.98	4,056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	***BaTii***
Sasaran Kegiatan	Transformasi Teknologi Informasi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Terintegrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi ISRBTK		95%	-	-	-	-						
	Persentase Implementasi ISRBTK dan *Data Analytics*		-	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							2,958.98	4,056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	
	Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	116.60	81.80	116.60	121.36	123.74	
	Rekomendasi Transformasi Kemenkeu (CTO)		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,842.38	3,975.16	2,842.38	2,958.35	3,016.33	
Kegiatan	7779 Legislasi dan Litigasi							-	41.95	24.30	25.29	25.79	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		-	85	85	85	85						
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		-	95	95	95	95						
Output	Peraturan Lainnya							-	27.78	12.15	12.65	12.89	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	-	27.78	12.15	12.65	12.89	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	14.18	12.15	12.65	12.89	
	Layanan Bantuan Hukum		-	0 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	14.18	12.15	12.65	12.89	
Kegiatan	7780 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							-	24,740.31	37,236.19	40,292.63	41,788.79	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		-	100	100	100	100						
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	84.1	84.1	84.1	84.1						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	17,873.41	27,066.00	30,081.24	31,377.25	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	2,155.48	2,915.06	3,033.99	3,093.46	
	Kerumahtanggaan		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	111.41	198.52	206.62	210.67	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	30.46	135.87	141.41	144.18	
	Layanan Perkantoran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	15,576.05	23,816.56	26,699.22	27,928.95	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-	6,484.12	9,160.25	9,160.25	9,339.79	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	2 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	-	46.96	2,535.24	2,535.24	2,584.93	
	Kendaraan Bermotor		-	8 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	-	6,437.16	5,222.77	5,222.77	5,325.14	
	Gedung/Bangunan		-	-	400 m2	400 m2	400 m2	-	-	1,402.24	1,402.24	1,429.73	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							-	382.78	1,009.93	1,051.14	1,071.74	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25.57	42.44	44.17	45.03	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	241.88	707.12	735.97	750.40	
	Laporan Keuangan Unit		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	63.28	105.74	110.05	112.21	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	17.30	17.30	18.01	18.36	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	34.75	137.34	142.94	145.75	
Kegiatan	7781 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							-	368.29	2,306.27	2,399.76	2,446.51	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Komunikasi Publik							-	368.29	2,306.27	2,399.76	2,446.51	
	Pembinaan/Edukasi Publik		-	12 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	-	105.44	1,628.34	1,694.78	1,728.00	
	Kehumasan		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	85.98	313.15	325.92	332.31	
	Publikasi Media Cetak		-	2 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	-	49.43	132.08	137.47	140.16	
	Publikasi Media Elektronik		-	2 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	-	60.96	146.64	152.62	155.61	
	Publikasi Media Website		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	51.75	71.33	74.24	75.70	
	Manajemen Pengetahuan		-	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	14.73	14.73	14.73	14.73	
Kegiatan	7782 Pengelolaan Organisasi dan SDM							-	8,433.76	11,410.70	11,876.25	12,109.03	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK		-	94%	94%	94%	94%						
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM		-	96	96	96	96						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	7,217.76	9,165.35	9,539.30	9,726.27	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	1,384.55	4,070.83	4,236.92	4,319.96	
	Layanan Perkantoran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	5,833.21	5,094.53	5,302.38	5,406.31	
	Layanan Manajemen SDM Internal							-	1,216.01	2,245.34	2,336.95	2,382.76	
	Pengembangan SDM		-	271 Orang	476 Orang	476 Orang	476 Orang	-	757.22	1,258.59	1,309.94	1,335.62	
	Administrasi Kepegawaian		-	121 Orang	528 Orang	528 Orang	528 Orang	-	336.38	620.51	645.82	658.48	
	Pengelolaan Jafung		-	44 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	-	122.41	366.24	381.19	388.66	
Kegiatan	7783 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							-	88.98	146.70	152.69	155.68	***DJSEF***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		-	98%	98%	98%	98%						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal		-	82%	82%	82%	82%						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							-	88.98	146.70	152.69	155.68	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	88.98	146.70	152.69	155.68	
Kegiatan	7784 Legislasi dan Litigasi							110.20	67.37	110.20	114.70	116.94	***DJSPSK***
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							110.20	67.37	110.20	114.70	116.94	
	Layanan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	110.20	67.37	110.20	114.70	116.94	
Kegiatan	7785 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum							26,648.01	30,285.50	14,090.35	15,220.23	15,723.72	***DJSPSK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif. dan Akuntabel												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 1		85	85	85	85	85						
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84.1	84.1	84.1	84.1	84.1						
Output	Peraturan lainnya							15.91	-	-	-	-	
	Regulasi Profesi Keuangan		1 Peraturan	-	-	-	-	15.91	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2,985.43	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	2,675.22	-	-	-	-	
	Perizinan Profesi Keuangan		260 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	310.21	-	-	-	-	
	Komunikasi Publik							1,527.45	-	-	-	-	
	Komite dan Sekretariat		1 Layanan	-	-	-	-	1,527.45	-	-	-	-	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12,161.17	23,866.98	13,677.45	14,790.49	15,285.55	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	6,284.66	9,111.50	6,284.66	6,541.08	6,669.28	
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	465.70	798.00	465.70	484.70	494.20	
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.00	211.00	10.00	10.41	10.61	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	5,400.81	13,746.48	6,917.09	7,754.31	8,111.46	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-	5,760.35	-	-	-	
	Gedung/Bangunan		-	1 Paket	-	-	-	-	4,090.00	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	1 Unit	-	-	-	-	1,670.35	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							412.90	658.17	412.90	429.75	438.17	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.22	111.00	21.22	22.08	22.51	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	235.71	111.00	235.71	245.32	250.13	
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.87	111.00	52.87	55.03	56.11	
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.44	211.00	34.44	35.84	36.54	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	68.67	114.17	68.67	71.47	72.87	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							7,218.82	-	-	-	-	
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan		175 Laporan	-	-	-	-	7,218.82	-	-	-	-	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2,326.34	-	-	-	-	
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	2,326.34	-	-	-	-	
Kegiatan	7786 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							663.36	1,204.93	663.36	690.42	703.95	***DJSPSK***
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							663.36	1,204.93	663.36	690.42	703.95	
	Pembinaan / Edukasi Publik		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	663.36	1,204.93	663.36	690.42	703.95	
Kegiatan	7787 Pengelolaan Organisasi dan SDM							3,615.06	7,122.57	3,615.06	3,762.56	3,836.30	***DJSPSK***
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara		96	96	96	96	96						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							2,521.17	5,548.79	2,521.17	2,624.03	2,675.46	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	5.00	211.00	5.00	5.20	5.31	
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	2,516.17	5,337.79	2,516.17	2,618.83	2,670.15	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							1,093.90	1,573.78	1,093.90	1,138.53	1,160.84	
	Pengembangan SDM		327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	772.81	928.48	772.81	804.35	820.11	
	Administrasi Kepegawaian		327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	327 Orang	226.19	403.21	226.19	235.42	240.04	
	Pengelolaan Jafung		87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	94.89	242.09	94.89	98.76	100.70	
Kegiatan	7788 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal							49.22	77.36	49.22	51.23	52.23	***DJSPSK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi		92.5	93	94	95	96						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							49.22	77.36	49.22	51.23	52.23	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	49.22	77.36	49.22	51.23	52.23	
Kegiatan	7789 Pengolahan Data dan Informasi							6,481.27	3,148.33	6,481.27	6,736.12	6,868.15	***DJPK***
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Transformasi dan Informasi yang Andal serta Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas Data. Informasi. dan Interopebalitas Sistem TIK		100	80	80	80	80						
Output	Data dan Informasi Publik							6,481.27	3,148.33	6,481.27	6,736.12	6,868.15	
	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,092.25	791.36	3,092.25	3,208.82	3,271.72	
	Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,080.37	307.23	1,080.37	1,124.45	1,146.49	
	Data Non Keuangan Daerah		3 Data	6 Data	6 Data	6 Data	6 Data	554.80	678.40	554.80	577.43	588.75	
	Data Keuangan Daerah (PU)		132 Data	132 Data	132 Data	132 Data	132 Data	1,753.86	1,371.34	1,753.86	1,825.41	1,861.19	

LAMPIRAN

B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025 - 2029

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
05.03.02 KP: Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik	**Waktu penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor**	**Hari**	**2,90-2,85**	**2,85-2,79**	**2,79-2,72**	**2,72-2,66**	**2,66-2,60**															
05.03.02.01 PRO-P Penguatan Integrasi pade Sistem dan Proses Bisnis Logistik																						
Operasional Sistem INSW		Unit	3	3	3	3	3	23.510,81	28.895,00	23.510,81	24.470,05	24.949,66						23.510,81	28.895,00	23.510,81	24.470,05	24.949,66
Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW		Unit	5	5	5	5	5	24.249,40	32.745,30	24.249,40	25.238,77	25.733,45						24.249,40	32.745,30	24.249,40	25.238,77	25.733,45
Sistem INSW Generasi II		Sistem Informasi	1	1	1	1	1	2.500,00	2.745,00	2.500,00	2.500,00	2.549,00						2.500,00	2.745,00	2.500,00	2.500,00	2.549,00
07.09.03 KP: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	**Pertumbuhan penerimaan pajak daerah**	**Persen**	**6,10**	**6,20**	**6,30**	**6,40**	**6,50**															
07.09.03.01 PRO-P Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah																						
Bimtek BUMDes		Desa	2000	2000	2000	2000	2000	2.386,63	1.139,33	2.386,63	2.484,00	2.532,69						2.386,63	1.139,33	2.386,63	2.484,00	2.532,69
Rekomendasi Kebijakan PDRD		Rekomendasi	2	-	-	-	-	1.018,43	-	-	-	-						1.018,43	-	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data		Rekomendasi	-	5	5	5	5	-	463,12	686,74	755,99	790,62						-	463,12	686,74	755,99	790,62
07.12.01 KP: Ekstensifkasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	**Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi**	**Persen**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**															
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**															
07.12.01.01 PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (core tax) dan Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Stakeholder Terkait, Menuju Data-Driven																						

Dukungan Implementasi/Penerapan Core Tax		Orang	45.315	45.315	45.315	45.315	45.315	5.496,57	5.496,57	5.496,57	5.720,83	5.832,96						5496,57	5496,57	5496,57	5720,83	5832,96
07.12.01.02 PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dan Kelembagaan serta Penguatan Kebijakan																						

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	**Penugasan Indikator**	**Satuan**	**Target**					**Alokasi APBN (dalam juta rupiah)**					**Alokasi non-APBN (dalam juta rupiah)**					**Total (dalam juta rupiah)**				
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak		Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	7	1.844,75	767,50	1.844,75	1.920,01	1.957,64						1.844,75	767,50	1.844,75	1.920,01	1.957,64
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk Sin Tax)																						
Rekomendasi kebijakan penggalian potensi Perpajakan melalui Analisis Input *Output*		Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-						800,00	800,00	800,00	832,64	848,95
Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor		Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	589,27	-	-	-	-						589,27	-	-	-	-
Rekomendasi kebijakan fiskal berupa cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB)		Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	-	-	640,00	-	-	-						-	640,00	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja		Rekomendasi	1	-	-	-	-	412,85	-	-	-	-						412,85	-	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan terkait Perluasan Basis Penerimaan - Bea Keluar Mineral		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	542,39	-	-	-						-	542,39	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Cukai akibat Peralihan Konsumsi Produk Hasil Tembakau Yang Lebih Murah (Downtrading)		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	1.229,17	-	-	-						-	1.229,17	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai dari Aspek Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal		Rekomendasi	-	1	-	-	-	-	2.484,64	-	-	-						-	2.484,64	-	-	-
07.12.01.04 PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan																						
Sistem Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan *(Tax Crime Handling System)*		Sistem Informasi	1	1	-	-	-	1.200,00	664,65	-	-	-						1.200,00	664,65	-	-	-
07.12.02 KP Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	**Rasio capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**															
07.12.02.01 PRO-P Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas																						

Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBP		Laporan	6	6	6	6	6	1.190,36	1.414,67	1.190,36	1.238,93	1.263,21						1.190,36	1.414,67	1.190,36	1.238,93	1.263,21
07.13.01 KP: Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat	**Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**	**Indeks**	**85**	**85,5**	**86**	**86,5**	**87**															

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/RO	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07. 13.01.03 PRO-P Kebijakan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan																						
Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat		Laporan	30	30	30	30	30	4.182,78	1.361,76	4.182,78	4.353,43	4.438,76						4.182,78	1.361,76	4.182,78	4.353,43	4.438,76
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	**Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**															
	Alokasi TKD untuk infrastruktur	**Trilyun Rupiah**	**55,6**	**55,6**	**55,6**	**55,6**	**55,6**															
	Persentase kinerja hibah dan daerah	**persen**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**															
07.13.02.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah																						
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Orang	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.778,06	1.709,78	1.778,06	1.850,60	1.886,87						1.778,06	1.709,78	1.778,06	1.850,60	1.886,87
07.13.02.02 PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L																						
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L		Dokumen	1	1	1	1	1	327,19	157,00	327,19	340,54	347,21						327,19	157,00	327,19	340,54	347,21
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kesinambungan Fiskal	**Imbal hasil (*yield*) SBN**	**Persen**	**7,0**	**6,6-7,2**	**6,3-7,3**	**6,0-7,0**	**6,0-7,0**															
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**															
07.14.01.01 PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan																						
Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia		Dokumen	1	1	1	1	1	118,45	256,69	664,39	764,89	791,83						118,45	256,69	664,39	764,89	791,83
07.14.01.02 PRO-P: Peraturan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Dalam Negeri																						
Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah		RPP	1	1	1	-	-	110,26	220,00	380,20	-	-						110,26	220,00	380,20	-	-

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025 – 2029

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perlelangan	a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang. c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum. d. Digitalisasi proses bisnis dalam era *society 5.0*. e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum. f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang. g. Meminimalisir adanya gugatan. h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945).	Kemenkeu (DJKN)	-	2026
2.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki Undang-Undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam. b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi. c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah transisi energi yang konkret. d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang Keuangan Negara. e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi. f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan. g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara. h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.	Kemenkeu (DJKN)	-	2026

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi)	a. Tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. b. Terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. c. Terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. d. Meningkatnya kredibilitas Rupiah.	Kemenkeu-DJPb	-	2026
4.	RUU tentang Penilai	a. Mandat Konstitusi. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang misalnya Undang-Undang dibidang sumber daya alam dan atau Undang-Undang lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU seperti UU Pengadaan tanah, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan lainnya. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistis. Demikian pula dalam Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk	Kemenkeu-DJKN	-	2025

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya. c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksana pelayanan publik (*beesturzorg*) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai *intermediary information provider*, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu *backbone* kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses *Initial Public Offering* (IPO) sampai dengan likuidasi emiten (perusahaan). d. Mewujudkan tata kelola yang baik. Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *good governance*, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu juga Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Di mana dari profesi tersebut hanya penilailah yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di pasar modal dan perbankan di sektor keuangan yang belum memiliki undang-undang untuk			

No	Arah Kerangka Regulasi /Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mengatur pengawasan, profesional kerahasiaan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang diisyaratkan. f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA